

**AGENDA SETTING DALAM PEMBENTUKAN GREEN KAYEN
SEBAGAI DESA WISATA DI KALURAHAN CONDONGCATUR**

TESIS



Disusun Oleh:

DOMINGGUS NDOU BARU

22610031

**PROGRAM MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA
“APMD” YOGYAKARTA**

2025



**AGENDA SETTING DALAM PEMBENTUKAN GREEN KAYEN
SEBAGAI DESA WISATA DI KALURAHAN CONDONGCATUR**

TESIS

**Untuk Memenuhi Sebagian
Persyaratan Mencapai Derajat
Magister pada Program Studi Ilmu
Pemerintahan**



Disusun Oleh:

DOMINGGUS NDOU BARU

22610031

**PROGRAM MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA
“APMD” YOGYAKARTA**

2025

HALAMAN PELAKSANAAN UJIAN
AGENDA SETTING DALAM PEMBENTUKAN GREEN KAYEN
SEBAGAI DESA WISATA DI KALURAHAN CONDONGCATUR

Disusun Oleh:
DOMINGGUS NDOU BARU
22610031

Telah dipertahankan dihadapan Sidang Penguji Tesis
Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan
Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD"
Pada tanggal: 1 Agustus 2025
dan dinyatakan telah memenuhi syarat lulus

PANITIA PENGUJI TESIS

Nama	Tanda Tangan
Dr. Rumsari Hadi Sumarto, S.I.P., M.P.A. Ketua/Pembimbing	
Dr. Tri Nugroho Emanuel Widayat Penguji Samping I	
Dr. Adji Suradji Muhammad, S.Sos., M.Si Penguji Samping II	

Mengetahui,
Direktur Program Pascasarjana
Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan


Rumsari Hadi Sumarto, S.I.P., M.P.A.
NIDN: 0507106801

HALAMAN PENGESAHAN

TESIS

AGENDA SETTING DALAM PEMBENTUKAN GREEN KAYEN SEBAGAI DESA WISATA DI KALURAHAN CONDONGCATUR

Disusun Oleh:

DOMINGGUS NDOU BARU

22610031

Disahkan oleh Tim Penguji

Pada Tanggal: 1 Agustus 2025

Susunan Tim Penguji

NAMA

Dr. Rumsari Hadi Sumarto., S.I.P, M.P.A

Ketua Penguji/Pembimbing

Dr. Tri Nugroho Emanuel Widayat

Penguji Samping I

Dr. Adji Suradji Muhammad, S.Sos., M.Si

Penguji Samping II

TANDA TANGAN



Mengetahui,

Direktur Program Pascasarjana

Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan



Dr. Rumsari Hadi Sumarto., S.I.P, M.P.A

NIDN: 0507106801

HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : Dominggus Ndou Baru

NIM : 22610031

Program Studi : Magister Ilmu Pemerintahan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis berjudul *Agenda setting* dalam Pembentukan Green Kayen sebagai Desa Wisata di Kalurahan Condongcatur, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman adalah benar karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam tesis tersebut telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan Ijazah dan gelar yang saya peroleh dari tesis tersebut.

Yogyakarta, 28 Juli 2025

Yang membuat pernyataan,



Dominggus Ndou Baru

HALAMAN MOTTO

“Perjalanan hidup membawa tantangan dan peluang. Jadi, tergantung diri kita, memilih untuk merebut peluang atau memilih menjadi penonton.”

"Aku hanyalah anak petani dari ujung Kodi, tapi cinta mengajarkanku bahwa yang sederhana pun layak bermimpi setinggi-tingginya."

(Dominggus Ndou Baru)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Tuhan Yesus dan Bunda Maria yang selalu melindungi, menyertai sampai dengan saat ini, sehingga penulis mampu menyelesaikan Tugas Akhir (Tesis) untuk memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Pemerintahan di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” di Yogyakarta. Oleh karena itu tesis ini saya persembahkan kepada :

1. Kedua orang tua tercinta saya, Bapak Kornelis Kedu Deta dan Ibu Damiana Karere serta adik-adik saya Febrianti Neni Hono, Martina Seldi Jama Nuna, Marta Reni Mone, dan Novita Mone, mereka adalah sosok-sosok penting dalam kehidupan saya. Berkat doa dan dukungan mereka dalam berbagai aspek baik itu moril maupun materil, saya bisa tumbuh dan berkembang sampai sekarang dan bisa menyelesaikan pendidikan S2 saya.
2. Bapa Dominikus Jama Ngandu (Bapa Asni) yang selalu mendukung saya baik secara moril maupun materil, hingga sampai saya menyelesaikan penulisan Tesis ini. Bapak Steven (Bapa Ferry), Bapak Markus Rahono (Bapa Deni), Dotri dan Kondo yang selalu menginspirasi dan mengajarkan banyak hal kepada saya.
3. Ketiga Nenek saya, Inya Bella (Almh), Inya Camo (Almh), Inya Tanggu (Almh) yang semasa hidupnya yang sering memberikan uang jajan kepada saya.
4. Paman, Tante, Kakak, dan Adik-adik saya; Bp. Yanus, Bp Rio, Bp Fenty, Bp Rafi, Bapa Kori, Tante Mery, Lina, Kak Agus, Kak Eli, Kak Chimo, Bunda Fitri, Kak Inko, Vian Bali, Yanus, Wily, Cici, Fery, Deni, Asny, Eren, Cici, Jofan, Figo, Afri Kura.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Tuhan yang Maha Kuasa atas limpahan dan Karunia-nya atas segala daya dan upaya yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini dengan Judul “*Agenda setting* dalam Pembentukan Green Kayen sebagai Desa Wisata di Kalurahan Condongcatur, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman”. Tesis ini penulis susun untuk memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Pemerintahan pada program Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa ‘APMD’ Yogyakarta.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Tesis ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari beberapa pihak. Karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih.

1. Bapak Dr. Sutoro Eko Yunanto selaku Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” di Yogyakarta, terimakasih atas ilmu yang sangat bermanfaat yang telah bapak berikan selama penulis mengenyam pendidikan di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.
2. Almarhum Bapak Dr. Guno Tri Tjahjoko, M.A yang telah memberikan nasehat serta ilmu yang tiada batas selama penulis mengenyam pendidikan di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” di Yogyakarta.
3. Ibu Dr. Rumsari Hadi Sumarto, S.I.P., M.P.A selaku Dosen Pembimbing penulis, dan sebagai direktur Program Magister Ilmu Pemerintahan, terima kasih banyak atas kesabaran, bantuan serta ilmu yang tiada batas yang telah ibu berikan kepada penulis dalam menyelesaikan Tesis ini.
4. Dr. Tri Nugroho Emanuel Widayat, selaku dosen penguji satu
5. Dr. Adji Suradji Muhammad, S.Sos., M.Si. selaku dosen penguji dua
6. Bapak/Ibu Dosen Pengajar Magister Ilmu Pemerintah Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.

7. Seluruh staf pegawai Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta atas segala pelayanan yang telah diberikan selama ini guna untuk menunjang kegiatan perkuliahan.
8. Pemerintah Kalurahan Condongcatur, Pokdarwis Green Kayen, serta Masyarakat di Padukuhan Kayen yang telah memberikan izin penelitian kepada penulis dan juga ikut membantu penulis untuk memberikan informasi dan data sehingga Tesis ini dapat terselesaikan dengan baik.
9. Untuk teman-teman seperjuangan dari organisasi Sumba APMD Yogyakarta terima kasih banyak atas setiap dukungannya.
10. Teman-teman APMD dan seperjuangan Magister Ilmu Pemerintahan angkatan 30 yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.
11. Semua pihak yang telah membantu proses perjuangan penyusunan Tesis ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Yogyakarta, 28 Juli
2025

Dominggus Ndou Baru

DAFTAR ISI

HALAMAN PELAKSANAAN UJIAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN.....	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
INTISARI.....	xv
<i>ABSTRACT</i>	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Kajian Literature Review	9
C. Fokus Penelitian	24
D. Rumusan Masalah	25
E. Tujuan Penelitian.....	25
F. Manfaat Penelitian.....	26
G. Kerangka Konseptual	26
1. Pemerintah dan Pemerintahan.....	26

2.	Kebijakan Publik	33
3.	<i>Agenda setting</i>	36
4.	Pariwisata	38
BAB II METODE PENELITIAN.....		42
A.	Jenis Penelitian	42
B.	Lokasi Penelitian	43
C.	Sumber Data	45
1.	Data Primer	45
2.	Data Sekunder	45
D.	Teknik Pengumpulan Data	46
1.	Observasi	47
2.	Wawancara	47
3.	Dokumentasi.....	48
E.	Teknik Pemilihan Informasi dan Narasumber	49
F.	Teknik Analisis Data	50
G.	Teknik Validasi Data.....	53
BAB III PROFIL WISATA GREEN KAYEN DAN KALURAHAN ...		56
A.	Sejarah Wisata Green Kayen.....	56
B.	Sejarah Kalurahan	61
C.	Visi dan Misi Pemerintah Kalurahan Condongcatur.....	62
D.	Struktur Organisasi.....	63
E.	Tugas Pokok dan Fungsi	67

F. Kondisi Demografi.....	68
G. Gambaran Program Inklusif Kalurahan Condongcatur.....	75
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	77
A. Deskripsi Informan.....	77
B. Aliran Masalah Destinasi Wisata Green Kayen.....	81
1. Analisis Situasi Lingkungan.....	81
2. Analisis Kebutuhan Infrastruktur.....	89
3. Analisis Potensi Perkembangan Ekonomi Wisata.....	103
C. Aliran Kebijakan dalam Pengelolaan Wisata Green Kayen.....	110
D. Aliran Politik Keterlibatan Stakeholder dalam Pembentukan Green Kayen.....	120
E. Faktor Pendukung dan Penghambat.....	129
1. Faktor Pendukung.....	129
2. Faktor Penghambat.....	133
BAB V PENUTUP.....	139
A. Kesimpulan.....	139
B. Saran.....	141
C. Keterbatasan Penelitian.....	141
DAFTAR PUSTAKA.....	143
LAMPIRAN.....	149

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Data Informan Penelitian	49
Tabel 3. 1 Susunan Pengelola Desa Wisata Green Kayen	60
Tabel 3. 2 Daftar Pamong Kalurahan	65
Tabel 3. 3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur	68
Tabel 3. 4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan	72

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Kondisi Green Kayen	6
Gambar 3. 1 Peta Lahan Green Kayen	59
Gambar 3. 2 Chart Jumlah Penduduk.....	72
Gambar 4. 1 Grojokan Green Kayen.....	82
Gambar 4. 2 Pengecoran Jalan Kayen.....	90
Gambar 4. 3 Pendopo Green Kayen.....	92
Gambar 4. 4 Mushola Green Kayen.....	96

INTISARI

Desa Wisata menjadi salah satu strategi pembangunan lokal yang berkelanjutan, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. Green Kayen, sebagai destinasi wisata alam di Padukuhan Kayen, Kalurahan Condongcatur, memiliki potensi besar melalui keindahan alam dan kekhasan lokalnya. Namun, dalam prakteknya, proses pengelolaan dan pembentukan destinasi ini menghadapi berbagai tantangan, terutama pada aspek koordinasi antar-aktor. Ketidaksinkronan antara pemerintah kalurahan, kelompok sadar wisata (Pokdarwis), dan Badan Usaha Milik Kalurahan (Bumkal Nyawiji) menyebabkan stagnasi dalam pengembangan wisata. Lemahnya kolaborasi, minimnya partisipasi masyarakat, serta dominasi keputusan oleh aktor tertentu, menggambarkan dinamika pengambilan kebijakan yang tidak inklusif.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses *agenda setting* dalam pembentukan dan pengelolaan Green Kayen sebagai desa wisata. Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Data dianalisis menggunakan *Three Stream Theory* dari John Kingdon yang mencakup aliran masalah, kebijakan, dan politik. Penelitian ini menggali narasi dari masyarakat serta aktor pengelola wisata untuk melihat bagaimana dinamika internal mempengaruhi keberlangsungan Green Kayen sebagai destinasi yang berbasis komunitas.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *agenda setting* dalam pengelolaan Green Kayen belum mencerminkan prinsip inklusivitas. Pemerintah kalurahan cenderung dominan dalam penetapan arah kebijakan, sementara Pokdarwis dan masyarakat kurang dilibatkan secara aktif. Di sisi lain, Bumkal belum mampu menjalankan peran strategis sebagai penggerak ekonomi lokal. Kendati demikian, terdapat peluang untuk memperkuat sinergi antar-aktor melalui pendekatan kolaboratif dan pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini menekankan pentingnya transparansi, partisipasi, dan dialog antar pemangku kepentingan dalam membangun tata kelola wisata yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Kata Kunci: *Agenda setting*, Pemerintah, Kebijakan, Destinasi Wisata

ABSTRACT

Tourism villages are one of the strategies for sustainable local development, especially in improving the welfare of local communities. Green Kayen, as a natural tourist destination in Padukuhan Kayen, Kalurahan Condongcatur, has great potential due to its natural beauty and local characteristics. However, in practice, the process of managing and establishing this destination faces various challenges, especially in terms of coordination between actors. The lack of synchronization between the village government, the tourism awareness group (Pokdarwis), and the Village-Owned Enterprise (Bumkal Nyawiji) has led to stagnation in tourism development. Weak collaboration, limited community participation, and decision-making dominated by certain actors reflect a non-inclusive policy-making dynamic.

This study aims to analyze the agenda-setting process in the formation and management of Green Kayen as a tourism village. The approach used is descriptive qualitative with data collection techniques through observation, in-depth interviews, and documentation. Data were analyzed using John Kingdon's Three Stream Theory, which includes problem, policy, and politics streams. This study explores narratives from the community and tourism management actors to see how internal dynamics influence the sustainability of Green Kayen as a community-based destination.

The results of the study indicate that agenda setting in the management of Green Kayen does not yet reflect the principle of inclusivity. The village government tends to be dominant in setting policy directions, while Pokdarwis and the community are less actively involved. On the other hand, Bumkal has not been able to play a strategic role as a driver of the local economy. Nevertheless, there are opportunities to strengthen synergies between actors through a collaborative approach and community empowerment. This study emphasizes the importance of transparency, participation, and dialogue among stakeholders in building equitable and sustainable tourism governance.

Keywords: *Agenda setting, Government, Policy, Tourism Destination*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah salah satu negara dengan sebutan negara banyak pulau yang memiliki sumber daya alam yang sangat kaya. Indonesia memiliki alam yang keindahannya sangat memukau yang tersebar di berbagai daerah. Dalam konteks kemajuan, perubahan dari suatu daerah dengan dapat dilihat dengan adanya destinasi wisata, dan tentunya hal ini tidak lepas dari peran dari *government* setempat. Secara khusus model destinasi wisata di Indonesia saat ini tidak lepas dari peran berbagai faktor, termasuk desa.

Desa memiliki peran penting dalam mendukung kemajuan suatu wilayah melalui potensi yang ada. Salah satu potensi tersebut adalah keindahan alam dan sumber daya yang masih alami. Oleh karena itu, desa harus mampu mengelola potensi alam yang dimilikinya. Keberadaan desa juga menjadi salah satu wujud ujung tombak pembangunan Negara Indonesia saat ini. Desa-desa di Indonesia saat ini menjadi sasaran dalam pembangunan ekonomi lewat pariwisata sekaligus menjadi penentu arah pembangunan yang sedang berlangsung dan berkelanjutan.

Pengembangan pariwisata akan dapat mendorong kemajuan suatu desa. Pengembangan pariwisata tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga berdampak pada aspek sosial, budaya, dan lingkungan. Oleh karena itu, pengelolaan destinasi wisata alam perlu memperhatikan keberlanjutan serta kesejahteraan semua pihak

yang terlibat, baik pemerintah setempat, penduduk lokal maupun pengunjung wisata tersebut.

Dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pariwisata akan memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan sosial masyarakat desa. Destinasi wisata dapat membantu dalam menumbuhkan bisnis lokal dan meningkatkan pendapatan, dapat membantu mengurangi kemiskinan dan meningkatkan standar hidup. Selain itu, dengan adanya destinasi wisata, dapat mendorong partisipasi aktif dari masyarakat setempat dalam sektor pariwisata, karena terdapat peluang untuk memberdayakan masyarakat kecil yang mungkin terbatas akses terhadap peluang ekonomi lainnya. Destinasi wisata dapat memperkuat rasa solidaritas dan jati diri masyarakat desa. Artinya, masyarakat desa akan lebih terhubung satu sama lain dan dengan pengunjung dari luar. Dengan adanya peluang, destinasi wisata di desa akan berpotensi menjadi agen positif dalam pembangunan inklusif yang melibatkan berbagai aspek kehidupan masyarakat desa dan meningkatkan kualitas hidup mereka.

Salah satu destinasi wisata adalah destinasi wisata alam. Adanya destinasi wisata alam akan memicu pada hubungan timbal balik antara pengembangan pariwisata alam dan perkembangan ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan di wilayah tersebut. Dari posisi perekonomian, destinasi wisata alam dapat menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi suatu daerah atau desa. Kehadiran wisata alam membuka peluang bisnis baru, seperti akomodasi, restoran/kulineran, toko souvenir, jasa panduan wisata dan lain sebagainya. Hal ini tentunya dapat menciptakan lapangan kerja dan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat lokal. Melalui destinasi

wisata alam juga dapat memberdayakan masyarakat desa dengan melibatkan mereka dalam kegiatan pariwisata seperti pelatihan vokasi, pembukaan usaha kecil dan partisipasi dalam pengelolaan tempat wisata. Selain itu, keberadaan pengunjung di daerah wisata juga dapat mendorong pertumbuhan sektor-sektor terkait seperti Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang selanjutnya disebut UMKM dan lain-lain.

Kegiatan wisata alam di desa juga dapat memperkuat ikatan sosial komunitas pada masyarakat setempat. Hubungan interaksi antara sesama penduduk lokal dan wisatawan dapat memperluas jaringan sosial, meningkatkan toleransi, dan memperkaya pengalaman budaya. Selain itu, pendapatan tambahan dari destinasi wisata alam juga dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur sosial lainnya.

Keberadaan destinasi wisata alam sering kali menjadi peluang untuk mempromosikan dan melestarikan warisan budaya dan tradisional dari suatu daerah terlebih khusus desa. Pengembangan destinasi wisata alam yang berkelanjutan tentu akan memerlukan perlindungan dan pelestarian lingkungan alam yang optimal tanpa harus merusak keseimbangan lingkungan alam sekitar.

Upaya untuk menjaga keasrian dan keindahan alam dapat mendorong praktik konservasi dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Dengan demikian pendapatan yang diperoleh dari kegiatan destinasi wisata alam dapat digunakan untuk pembiayaan program-program perlindungan lingkungan dan keberlanjutan. Peluang destinasi wisata alam akan dapat mendorong kemajuan desa. Pengembangan destinasi wisata alam tidak hanya memberikan

manfaat ekonomi, tetapi juga berdampak pada aspek sosial, budaya, dan lingkungan. Oleh karena itu, pengelolaan destinasi wisata alam perlu memperhatikan keberlanjutan serta kesejahteraan semua pihak yang terlibat, baik penduduk lokal maupun pengunjung. Destinasi wisata alam juga merupakan tempat yang kaya akan keindahan alam, warisan budaya, dan tradisi lokal.

Dengan meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan, masyarakat desa harus lebih memperhatikan dan menjaga kelestarian alam. Dengan mempromosikan keanekaragaman alam, lewat sumber daya alam yang unik, tentunya masyarakat akan dapat memperoleh keuntungan cukup baik lewat mengelola dan mengembangkan wisata alam tersebut. Di sisi lain, destinasi wisata alam juga desa dapat membantu mempromosikan keanekaragaman flora, fauna dan ekosistem lokal sekaligus memberikan insentif untuk menjaga lingkungan alam. Namun, di sisi lain, untuk mendukung keberlanjutan destinasi wisata alam, seringkali diperlukan pembangunan infrastruktur, seperti jalan, tempat parkir, dan fasilitas sanitasi. Hal ini tidak hanya menguntungkan wisatawan tetapi juga meningkatkan kualitas hidup penduduk desa.

Pengelolaan destinasi wisata alam di desa menjadi sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, dan pelaksanaan kegiatan wisata yang dilakukan di wilayah desa. Tujuan utama pengelolaan destinasi wisata alam di desa adalah untuk memajukan dan mengembangkan pariwisata di lingkungan desa secara berkelanjutan dengan memperhatikan aspek ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. Yang paling penting juga adalah spirit dan niat dalam kerja sama untuk mengelola dan mengembangkan sebuah potensi

wisata alam agar tetap berkelanjutan sehingga pada tidak menimbulkan perbedaan pandangan yang akan berdampak tidak baik proses pengelolaan dan pengembangan suatu potensi alam. Selain itu, pengelolaan dan pengembangan destinasi wisata yang ideal juga dapat menunjukkan kepedulian terhadap pelestarian pada lingkungan sekitar, dengan melibatkan berbagai aktor atau stakeholder seperti pemerintah, swasta dan masyarakat lokal.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang selanjutnya disebut UU Desa menyatakan bahwa desa mempunyai hak dan kewenangan untuk mengelola dan mengembangkan potensi atau aset yang dimilikinya. Pemerintah pusat memberikan kewenangan penuh lewat produk hukum UU Desa, dengan tujuan yaitu untuk kemandirian desa itu sendiri.

Berlakunya UU Desa merupakan langkah awal yang dapat menciptakan kemandirian bagi desa. Desa diberdayakan dalam bentuk prinsip rekognisi dan subsidiaritas, serta bertanggung jawab mengembangkan dan memajukan Indonesia yang lebih baik. Kehadiran UU Desa juga menjadi ikhtiar bagi desa dalam menjaga eksistensinya. Dengan semangat kemandirian, desa diberikan kewenangan dalam mengelola dan mengembangkan potensi yang dimilikinya, diantaranya alam yang penuh dengan keunikan, kekayaan, dan keindahan. Dengan kekayaan keindahan alam yang dimiliki oleh desa dan legitimasi hukum yang diberikan oleh negara lewat payung hukumnya/UU Desa, maka desa dapat berekspresi dengan membuat destinasi wisata alam sebagai bentuk ekspresi dalam kemandirian desa.

Destinasi wisata alam tentunya dapat dijumpai di berbagai daerah atau desa di Indonesia. Salah satunya adalah Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut DIY. Destinasi wisata alam menjadi salah satu pendorong ekonomi di DIY. Destinasi wisata alam ini tersebar di berbagai desa/kalurahan yang di daerah DIY. Salah satu destinasi wisata alam berada di Padukuhan Kayen, Kalurahan Condongcatur, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman. Destinasi wisata ini merupakan destinasi wisata yang tergolong baru atau baru memulai rintisan beberapa tahun terakhir. Destinasi Wisata Green Kayen tergolong unik dan mempunyai ciri khas dengan kesejukan alamnya. Pada destinasi tersebut terdapat bendungan yang membentangi, sehingga aliran air sungai yang melewati bendungan terlihat seperti air terjun. Namun, saat ini pengelolaan dan pengembangan destinasi wisata Green Kayen tidak berjalan sebagaimana mestinya.



Gambar 1. 1 Kondisi Green Kayen

Sumber: survei data primer yang diambil langsung oleh peneliti

Beberapa foto di atas merupakan gambaran kondisi wisata Green Kayen saat ini. Air di bawah bendungan yang membentangi sungai kayen, awalnya adalah untuk permandian pengunjung wisata Green Kayen. Namun saat ini telah menjadi tempat memancing oleh warga masyarakat. Di sekitar area sungai dekat bendungan banyak sampah dan semak-semak yang jarang dibersihkan. Area tersebut tidak terawat dan terlihat kotor. Di atas permukaan sebelum masuk area sungai, terdapat gazebo yang area sekitarnya juga masih banyak semak belukar dan jarang dibersihkan. Pada posisi ini Green Kayen tidak dikelola sebagaimana mestinya. Hal ini terjadi karena kurangnya pengawasan di lingkungan wisata Green Kayen. Pengembangan dari pihak pengelola Green Kayen juga lemah. Di sisi juga kurangnya anggaran serta minimnya sumber daya manusia dalam pengelolaan wisata berpengaruh dalam pengelolaan wisata Green Kayen.

Keberadaan destinasi Green Kayen tidak terlepas dari interaksi antar aktor-aktor yang merancang destinasi wisata. Interaksi antar-stakeholder tersebut menjadi elemen krusial dalam mendorong sinergi dan keberlanjutan pengembangan wisata. Namun demikian, dinamika komunikasi dan pengambilan keputusan dalam konteks *agenda setting* kerap menunjukkan ketimpangan, terutama antara kelompok masyarakat penggerak wisata (Pokdarwis) dan pemerintah kalurahan.

Salah satu isu yang mencuat adalah belum diberikannya izin oleh pemerintah kalurahan kepada Pokdarwis untuk menjalin kerja sama dengan pihak investor dalam rangka pengembangan sarana dan prasarana wisata Green Kayen. Pemerintah Kalurahan memberikan

amanah lewat Bumkal Nyawiji untuk menaungi pengelolaan destinasi wisata Green Kayen. Kemudian kebijakan ini menimbulkan ketegangan dalam hubungan antar-stakeholder, khususnya Pokdarwis dan sebagian masyarakat menilai bahwa Badan Usaha Milik Kalurahan (Bumkal) selama ini tidak menunjukkan kinerja yang optimal dalam mendukung pengelolaan wisata Green Kayen. Pandangan ini menguatkan persepsi bahwa peran Bumkal dalam struktur kelembagaan pengelolaan wisata tidak berjalan sebagaimana mestinya, sehingga memperlambat proses inovasi dan akselerasi pembangunan kawasan wisata Green Kayen.

Masalah tersebut memperlihatkan adanya ketidaksinkronan dalam penetapan agenda pembangunan antar-stakeholder. Pemerintah kalurahan cenderung memegang kontrol atas keputusan strategis, sementara Pokdarwis sebagai pelaku utama di lapangan merasa tidak diberi ruang partisipasi yang setara dalam pengambilan kebijakan, khususnya terkait peluang kolaborasi eksternal. Kondisi ini mencerminkan bahwa proses *agenda setting* belum berjalan secara inklusif, dan dominasi aktor tertentu dalam proses tersebut berpotensi menghambat semangat pemberdayaan serta kemandirian masyarakat dalam pengelolaan potensi lokal. Oleh karena peneliti tertarik untuk mengambil tema *agenda setting* dalam pembentukan dan pengelolaan Green Kayen sebagai destinasi wisata di Kalurahan Condongcatur.

Agenda setting dalam konteks kebijakan pariwisata memainkan peran yang sangat penting, melibatkan interaksi kompleks antara berbagai aktor, termasuk pemerintah, sektor swasta, masyarakat lokal, dan organisasi non-pemerintah. Proses ini tidak

hanya menciptakan dinamika pergerakan isu-isu yang berkaitan dengan pariwisata, tetapi juga menentukan isu mana yang akan diangkat ke dalam *agenda setting* kebijakan. Dalam pengelolaan kebijakan suatu destinasi wisata, *agenda setting* berfungsi sebagai mekanisme strategis yang memfasilitasi identifikasi dan prioritas isu-isu yang dianggap krusial untuk pengelolaan sektor pariwisata. Isu-isu ini dapat mencakup keberlanjutan lingkungan, pelestarian budaya, pengembangan infrastruktur, serta peningkatan kualitas layanan dan pengalaman wisatawan. Dengan demikian, proses *agenda setting* berkontribusi pada pembentukan prioritas pemerintah yang lebih tinggi, mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat serta pemangku kepentingan yang terlibat dalam industri pariwisata (Arlinasari & Yuanjaya, 2023).

B. Kajian Literature Review

Studi tentang pengembangan destinasi wisata telah banyak diteliti oleh sebagian besar akademisi atau para peneliti terdahulu. Sebagian besar penelitian terdahulu fokus pada pengelolaan destinasi wisata yang menyebar di berbagai desa di setiap daerah.

1. Penelitian dengan judul “*Agenda setting* dalam Proses Kebijakan Pengembangan Desa Kota Kapur sebagai Destinasi Wisata Sejarah” dilakukan di daerah Bangka. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji serta mendeskripsikan terkait *agenda setting* dalam proses pembuatan kebijakan untuk pengembangan Desa Kota Kapur sebagai destinasi wisata alam yang bersejarah serta tantangan apa saja yang dihadapi dan solusi untuk menangannya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pisau

analisis dari teori *agenda setting* Jhon W. Kingdom. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam proses *agenda setting* kebijakan mengenai pembangunan Desa Kota Kapur sebagai destinasi wisata sejarah belum menuai kepastian. Hal tersebut dikarenakan adanya perbedaan pandangan dari berbagai pihak yaitu; Pemerintah Provinsi, Kabupaten, Desa, serta Masyarakat setempat (Safitri, 2021). Dikutip pada 5 Mei 2024

2. Penelitian dengan judul “*Agenda setting* dalam Program Pembangunan Infrastruktur Pariwisata di Wilayah Prambanan, Sleman, D.I. Yogyakarta”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses *agenda setting* dalam program pembangunan infrastruktur pariwisata di wilayah Prambanan, Sleman, D.I. Yogyakarta. Penelitian ini juga menyoroti *agenda setting* sebagai bentuk strategis dalam realitas kebijakan publik yang ada. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi wawancara serta dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *agenda setting* program pembangunan infrastruktur pariwisata mempunyai 3 aliran yang memiliki dinamika proses yang berjalan formal. Namun dalam beberapa aliran, proses yang terjadi tidak hanya bersifat teknokratis dan normatif sebagaimana seharusnya. Hal ini di dalamnya terjadi tarik-menarik antara stakeholders karena adanya kepentingan terkait sehingga menyebabkan proses politis yang sangat dominan pada *agenda setting*, tetapi setiap stakeholder terkait juga mendukung adanya pembangunan infrastruktur pariwisata (Arlinasari & Yuanjaya, 2023). Dikutip pada 5 Mei 2024

3. Penelitian dengan judul “*Agenda setting* Program One Village One Product (OVOP) di Kabupaten Bantul”. Penelitian ini berfokus pada proses *Agenda setting* program One Village One Product (OVOP) di Kabupaten Bantul, Yogyakarta, yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan dengan memberdayakan masyarakat miskin melalui produk tertentu. Metode yang digunakan adalah deskriptif-kualitatif. Teknik pengumpulan data: wawancara, observasi, dokumentasi. Analisis menggunakan metode Quick Decision Analysis dan Three Stream Theory. Penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Bantul melakukan evaluasi formal terhadap alternatif kebijakan untuk mengatasi masalah kemiskinan. Teknik penyusunan prioritas masalah publik sudah sesuai dengan kemiskinan sebagai isu utama yang diatasi melalui program OVOP. Proses *Agenda setting* telah memenuhi aspek-aspek dalam Three Stream Theory yang dikemukakan oleh John Kingdon (Andwi Aswari et al, 2017). Dikutip pada 5 Mei 2024
4. Penelitian dengan judul “*Agenda setting* Pengelolaan Pariwisata Berbasis Kearifan Lokal Pasca Pembangunan Waduk Mbay di Kabupaten Nagekeo”. Artikel ini berfokus pada konflik yang muncul akibat pembangunan Waduk Mbay dan bagaimana masyarakat berusaha untuk mengangkat isu-isu mereka ke dalam agenda kebijakan pemerintah. Penelitian ini menyoroti pentingnya pengelolaan pariwisata yang mengedepankan kearifan lokal sebagai solusi untuk masalah yang dihadapi oleh masyarakat pasca pembangunan waduk. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan Riset Aksi Partisipatoris (RAP).

Metode ini melibatkan masyarakat secara langsung dalam proses penelitian, mulai dari identifikasi masalah hingga analisis data. Melalui forum terbuka dan diskusi kelompok, peneliti menggali perspektif masyarakat dan mengumpulkan informasi yang relevan untuk merumuskan kebijakan yang lebih baik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses *agenda setting* untuk pengelolaan pariwisata berbasis kearifan lokal dapat berjalan dengan baik jika melibatkan semua pihak terkait. Kebijakan yang dihasilkan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melestarikan budaya lokal, dan menyelesaikan berbagai masalah sosial yang muncul. Namun, untuk mencapai tujuan tersebut, penting bagi pemerintah untuk mempercepat penyelesaian ganti rugi dan memberdayakan masyarakat agar mereka dapat berpartisipasi aktif dalam pengelolaan sumber daya yang ada (Toulwala & Hayon, 2025). Dikutip pada 17 Mei 2025

5. Penelitian dengan judul "*Agenda setting* dalam Proses Pembentukan Kabupaten Bandung Barat". Penelitian ini berfokus pada proses pembentukan Kabupaten Bandung Barat yang terjadi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007. Penelitian ini mengeksplorasi *agenda setting* yang dilakukan oleh berbagai aktor, termasuk pemerintah, LSM, pengusaha, media, dan masyarakat, serta isu-isu subjektif yang mempengaruhi proses pemekaran tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Peneliti mengumpulkan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi kepustakaan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif untuk memahami dinamika dan peran aktor dalam proses pembentukan

Kabupaten Bandung Barat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembentukan Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2007 merupakan hasil dari interaksi kompleks antara berbagai kepentingan elit politik, birokrasi, dan masyarakat. Meskipun pemekaran diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, dalam praktiknya, proses ini dipengaruhi oleh agenda politik yang dapat mendistorsi tujuan utama pemekaran, yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini menekankan perlunya evaluasi lebih lanjut terhadap dampak pemekaran terhadap kesejahteraan masyarakat dan potensi munculnya praktik korupsi serta kolusi dalam pengelolaan pemerintahan daerah yang baru (Maman & Kartini, 2016).
Dikutip pada 5 Mei 2024

6. Penelitian dengan judul “Optimalisasi dan Pengembangan Destinasi Wisata Bendungan Slinga Park di Desa Slinga, Kabupaten Purbalingga”. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji terkait optimalisasi pengelolaan dan pengembangan wisata Slinga Park di Kabupaten Purbalingga terutama pada wisata alam bendungan Slinga Park, dan juga bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan dan pengembangan yang dilakukan serta kendala dan hambatan dalam proses optimalisasi Bendungan Slinga Park. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi serta triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan yang dilakukan di Bendungan Slinga Park masih belum optimal. Hal ini disebabkan karena ketersediaan sarana dan prasarana yang masih minim. Hal tersebut

menyebabkan terhambatnya proses optimalisasi dan pengembangan wisata Slinga Park. Namun, Pokdarwis Banjarandap tidak patah semangat untuk mengelola dan mengembangkan objek wisata tersebut (Roza, dkk., 2022).
Dikutip pada 5 Mei 2024

7. Penelitian dengan judul “Potensi dan Pengembangan Wahana Obyek Wisata Alam sebagai Daya Tarik Wisata Edukasi Keluarga di Kabupaten Magelang”. Penelitian bertujuan untuk mengetahui potensi kabupaten magelang sebagai salah satu destinasi wisata alam di Provinsi Jawa Tengah serta bertujuan untuk mengetahui bagaimana strategi pengelolaan yang menggunakan teknik *SWOT*. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk menggambarkan situasi dan peristiwa yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi dalam pengelolaan dan pengembangan destinasi wisata di Magelang telah melaksanakan pelatihan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pengetahuan masyarakat terkait pariwisata (Hadji, dkk., 2017).
Dikutip pada 5 Mei 2024
8. Penelitian dengan judul “Persepsi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Taman Wisata Alam Telaga Warna Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat”. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan mengetahui pengetahuan serta persepsi masyarakat Desa Tugu Utara terhadap keberadaan, fungsi, peran, dan pengelolaan Taman Wisata Alam Telaga Warna di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran yang lebih mendalam mengenai pemahaman masyarakat terkait kawasan konservasi TWA Telaga

Warna. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik sampling purposive, observasi, wawancara untuk pengumpulan datanya. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pengetahuan masyarakat tentang TWA Telaga Warna dan fungsinya termasuk dalam kategori tinggi. Artinya, bahwa upaya sosialisasi dan edukasi yang telah dilakukan oleh pengelola kawasan telah berjalan dengan baik. Selain itu, pengetahuan masyarakat juga tentang peran pengelola dan pemanfaatan sumber daya juga tinggi. Masyarakat paham bahwa pengelolaan dilakukan Balai Konservasi dan ada regulasi yang mengatur aktivitas di kawasan. Hal ini mencerminkan komunikasi yang baik antara masyarakat dan pengelola. Kemudian persepsi masyarakat terhadap pengelolaan TWA juga positif. Artinya keberadaan kawasan dapat diterima dengan baik oleh masyarakat karena memberikan manfaat lingkungan dan ekonomi. Masyarakat sangat paham peran mereka dalam menjaga kelestarian TWA dan turut menjaga kawasan secara berkelanjutan. Dengan kata lain, hasil penelitian menunjukkan pengetahuan dan dukungan masyarakat terhadap pengelolaan TWA Telaga Warna sudah baik. Komunikasi antara pengelola dan masyarakat juga sinergis (Aspuan et al., 2022).
Dikutip pada 9 Mei 2024

9. Penelitian dengan judul “*Rural tourism in Bali: towards a conflict-based tourism resource typology and management*”. Penelitian ini bertujuan untuk memahami tipologi sumber daya pariwisata berbasis konflik dan mengkonseptualisasikan model pengelolaannya di desa wisata pedesaan Bali melalui studi kasus

perbandingan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus perbandingan. Peneliti memilih dua desa di Bali, yaitu Desa Taro dan Desa Munduk, sebagai lokasi studi kasus. Desa-desa tersebut dipilih karena memiliki karakteristik yang berbeda untuk memungkinkan hasil penelitian dapat digeneralisasi. Penelitian menyimpulkan bahwa terdapat empat tipologi sumber daya pariwisata berdasarkan konflik yang terjadi, yaitu: Pertama, sumber daya berbasis aktivitas dan fasilitas yang bersifat terlokalisasi, seperti air terjun dan kerajinan lokal. Kedua, sumber daya berbasis aktivitas dan fasilitas yang bersifat luas, seperti pemandangan alam dan arsitektur tradisional. Ketiga, sumber daya bersifat spiritual yang bersifat terlokalisasi, seperti pura desa dan sumber air keramat. Keempat, sumber daya bersifat spiritual yang bersifat luas, seperti filsafat Tri Hita Karana. Kemudian konflik utama terjadi ketika ada pertentangan antara nilai ekonomi dan nilai spiritual yang ditempatkan pada suatu sumber daya. Misalnya rencana pembangunan ekowisata dekat danau keramat di Desa Munduk. Selain itu, model pengelolaan sumber daya juga dirumuskan melalui tiga tahap, yaitu: perencanaan, pengaturan, dan implementasi dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan (Rosalina et al, 2023). Dikutip pada 9 Mei 2024

10. Penelitian dengan judul “Peran Stakeholder dalam Pengelolaan Kawasan Taman Wisata Alam Kawah Ijen”. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi peran dari berbagai stakeholder yang terlibat dalam pengelolaan Taman Wisata Alam Kawah Ijen, sehingga diharapkan hasilnya dapat menambah referensi tentang

tipologi pemangku kepentingan dan berimplikasi terhadap pengelolaan wisata di kawasan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi kasus, teknik pengumpulan data melalui wawancara dan observasi, serta teknik analisis data menggunakan analisis stakeholder dan pattern matching. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengklasifikasian stakeholder sesuai dengan proposisi yang telah ditetapkan. Stakeholder dikelompokkan menjadi *key players*, *context setters*, *subjects*, dan *crowd* berdasarkan tingkat kepentingan dan pengaruhnya. Selain itu, peran yang diemban setiap stakeholder seperti policy creator, implementer, fasilitator, dan konservator telah sesuai dengan fungsi dan tanggung jawab masing-masing stakeholder berdasarkan aturan yang berlaku (Wahyuningtiyas & Iskandar, 2023). Dikutip pada 9 Mei 2024

11. Penelitian dengan judul “*Collaborative Governance* dalam Pengelolaan Wisata Alam Green Canyon di Desa Medalsari Kecamatan Pangkalan Kabupaten Karawang”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan *collaborative governance* dalam pengelolaan Wisata Alam Green Canyon di Kabupaten Karawang dengan menggunakan kerangka teori *collaborative governance* menurut Ansell dan Gash yang terdiri atas empat dimensi tersebut. Selain itu, juga bertujuan untuk menganalisis sejauh mana terlaksananya *collaborative governance* dalam pengelolaan wisata tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Metode ini digunakan karena penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis tentang penerapan

collaborative governance dalam pengelolaan Wisata Alam Green Canyon secara alami (natural setting) berdasarkan filosofi postpositivisme. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa masing-masing stakeholder (pemerintah, masyarakat, swasta) memiliki latar belakang yang berbeda, namun memiliki tujuan yang sama untuk meningkatkan kenyamanan dan keselamatan Wisata Alam Green Canyon. Kondisi awal kolaborasi dipengaruhi oleh kepentingan dan visi bersama, ketidakseimbangan sumber daya, serta kecemasan akan permasalahan yang ada seperti fasilitas yang kurang memadai. Namun, dari sisi dimensi desain kelembagaannya, belum terdapat kejelasan mekanisme partisipasi dan forum komunikasi antar stakeholder. Masyarakat hanya berperan sebagai penggerak pasif, sementara peran swasta dan pemerintah belum optimal. Belum ada kerangka kelembagaan yang jelas mengatur kolaborasi. Selain itu, proses kolaborasi juga belum berjalan dengan baik karena kurangnya partisipasi dan pengetahuan dari para pelaku. Peran pemerintah dalam memulai kolaborasi dengan sektor swasta dan masyarakat juga belum terlihat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan *collaborative governance* dalam pengelolaan Wisata Alam Green Canyon belum berjalan optimal. Masih terdapat celah-celah perbaikan terutama dalam aspek desain kelembagaan dan proses kolaborasi (Lestari dkk, 2022). Dikutip pada 13 Mei 2024

12. Penelitian dengan judul “Strategi Pengelolaan Taman Wisata Alam Gunung Meja melalui Penataan Kawasan”. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kondisi atau potensi Kawasan Hutan Wisata Gunung Meja, dan selanjutnya merumuskan upaya-

upaya pengelolaan berdasarkan blok pengelolaan agar dapat lebih mengoptimalkan pengelolaan kawasan hutan ini sesuai dengan fungsinya di masa datang. Metode yang digunakan penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif, ekologi, spasial, partisipatif, serta pendekatan sistematis dalam pengumpulan dan analisis datanya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kawasan Taman Wisata Alam Gunung Meja memiliki keanekaragaman jenis flora, fauna, ekosistem serta potensi sumber daya alam dan lingkungan yang tinggi. Namun pengelolaannya belum optimal dan berkelanjutan. Perlu dilakukan strategi pengelolaan berupa penataan kawasan berdasarkan sistem zonasi yang mencakup blok perlindungan, blok pemanfaatan, dan blok penyangga (*buffer zone*). Tujuannya untuk mengoptimalkan pengelolaan kawasan sesuai dengan fungsinya. Di sisi lain, kebijakan baru perlu mengakomodir kepentingan semua pihak melalui sistem zonasi tersebut agar pengelolaan lebih berkelanjutan dengan tetap melestarikan ekosistem dan sumber daya alamnya. Sebab itu, perlu adanya upaya perlindungan, pemantauan, pemanfaatan yang terawasi, serta keterlibatan masyarakat sekitar dalam pengelolaan kawasan untuk mendukung kelangsungan fungsi kawasan sebagai taman wisata alam (Leonard dkk, 2020). Dikutip pada 13 Mei 2024

13. Penelitian dengan judul “Peran Stakeholders dalam Pengelolaan Objek Wisata Alam Siwang Paradise di Desa Siwang Kota Ambon”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi keterlibatan para stakeholders dalam pengelolaan objek wisata Siwang Paradise, serta manfaat dan kendala yang dihadapi melalui

analisis peran, bentuk keterlibatan, dampak kolaborasi, serta kendala-kendala yang dihadapi para stakeholders. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Metode ini digunakan untuk menggambarkan atau menggambarkan kondisi objek penelitian secara sistematis, faktual dan akurat. Penelitian kualitatif lebih menekankan pada proses daripada hasil. Penelitian ini mengambil lokasi di Desa Siwang, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon. Lokasi ini dipilih secara sengaja (purposive sampling) karena merupakan lokasi objek wisata Siwang Paradise. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, terdapat beberapa poin penting yang dapat disimpulkan oleh penelitian ini yaitu; Stakeholder yang terlibat dalam pengelolaan objek wisata Siwang Paradise teridentifikasi menjadi tiga kelompok, yaitu stakeholder kunci, stakeholder utama, dan stakeholder pendukung. Stakeholder kunci yang diidentifikasi adalah pemilik kawasan objek Siwang Paradise yaitu keluarga Wattimena. Sedangkan stakeholder utama adalah masyarakat sekitar lokasi objek. Stakeholder pendukung yang berpotensi terlibat namun belum terlibat secara optimal adalah pemerintah, LSM, akademisi/peneliti, dan swasta. Peran yang sudah dilakukan stakeholder kunci adalah penyediaan fasilitas dasar dan pengelolaan secara swadaya. Namun perlu ditingkatkan kerja sama dengan stakeholder pendukung lain. Dampak positif awal pengelolaan objek adalah peningkatan ekonomi masyarakat sekitar dan pembukaan akses. Namun, minat kunjungan menurun karena belum adanya keterlibatan stakeholder pendukung secara optimal. Oleh karena itu, untuk pengembangan lebih lanjut

diperlukan keterlibatan dan peran serta stakeholder pendukung seperti pemerintah, LSM, akademisi, dan swasta guna meningkatkan daya tarik dan daya saing objek wisata Siwang Paradise (Soselissa & Seipalla, 2021). Dikutip pada 13 Mei 2024

14. Penelitian dengan judul “Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Objek Wisata Alam (Studi Kasus Wisata Bukit Kapur Setigi, Desa Sekapuk, Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana paparan yang jelas terkait partisipasi masyarakat dalam proses pengelolaan Wisata Alam Setigi. Dengan demikian, penelitian ini berusaha untuk mendeskripsikan dan menganalisis secara detail mengenai berbagai aspek partisipasi masyarakat dalam pengelolaan objek wisata alam Setigi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara mendalam tentang objek penelitian tanpa melakukan perbandingan atau menguji hipotesis. Dengan metode ini, peneliti dapat menggambarkan secara rinci proses dan peristiwa yang terjadi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat Desa Sekapuk ikut serta secara antusias dalam pengelolaan wisata Setigi. Selain itu, terdapat partisipasi masyarakat antara lain berupa partisipasi pemikiran, sumbangan tenaga kerja, sumbangan harta berupa dana lewat Taplus Invest, serta partisipasi keahlian dan keterampilan. Kemudian melalui partisipasi masyarakat yang telah membantu tumbuh kembangnya perekonomian di Desa Sekapuk karena wisata Setigi menjadi sumber pendapatan bagi warga. Aktor utama yang mendukung

adalah kepemimpinan kepala desa, sehingga muncul kesempatan bagi masyarakat untuk terlibat secara langsung dalam pengelolaan wisata. Artinya, hasil penelitian menunjukkan peran aktif masyarakat Sekapuk dalam pengelolaan wisata Setigi melalui berbagai bentuk partisipasi serta manfaat yang dirasakan masyarakat (Bobsuni & Ma'ruf, 2021). Dikutip pada 13 Mei 2024

Kajian literature review yang dianalisis dalam penelitian ini menunjukkan adanya benang merah dalam penggunaan pendekatan kualitatif untuk mengkaji isu-isu pengelolaan destinasi wisata di berbagai daerah. Persamaan yang menonjol dari hampir seluruh penelitian terdahulu adalah fokus pada dinamika antar-stakeholder dan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mendorong pengelolaan wisata yang efektif dan berkelanjutan. Misalnya, penelitian oleh Wahyuningtiyas & Iskandar (2023) maupun Lestari dkk. (2022) secara eksplisit menyoroti peran stakeholder seperti pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam kerangka pengelolaan wisata. Hal serupa juga terlihat dalam studi Ajeng Aspuan & Nugraha (2022) yang menekankan pada pengetahuan dan persepsi masyarakat terhadap kawasan wisata, yang menjadi modal sosial penting dalam keberhasilan tata kelola destinasi.

Di samping itu, beberapa penelitian menggunakan pendekatan teori *agenda setting* seperti yang dikemukakan oleh John W. Kingdom, yang menguraikan pentingnya aliran masalah, kebijakan, dan politik dalam proses penentuan arah pembangunan. Hal ini tampak dalam penelitian Safitri (2021) yang mengkaji proses kebijakan pengembangan Desa Kota Kapur di Bangka, serta Arlinasari & Yuanjaya (2023) yang menelaah *agenda setting* dalam

pembangunan infrastruktur pariwisata di Prambanan, Sleman. Kesamaan dalam penggunaan teori ini menunjukkan bahwa pendekatan *agenda setting* dinilai relevan dan mampu menjelaskan kompleksitas proses kebijakan di sektor pariwisata.

Namun demikian, masing-masing studi memiliki perbedaan signifikan dalam konteks lokasi, fokus isu, serta bentuk keterlibatan masyarakat dan pemerintah. Beberapa penelitian menyoroti konflik kepentingan antara nilai ekonomi dan spiritual seperti dalam studi Rosalina et al. (2023) di Bali, sementara yang lain seperti penelitian di Siwang Paradise Ambon lebih menyoroti minimnya keterlibatan stakeholder pendukung. Variasi ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat kerangka teoritis yang sama, dinamika lokal sangat mempengaruhi pola hubungan dan proses kebijakan yang terjadi.

Berbeda dari penelitian-penelitian tersebut, penelitian ini secara spesifik mengambil studi kasus pada Green Kayen, sebuah destinasi wisata baru yang sedang dirintis di Padukuhan Kayen, Kalurahan Condongcatur, Kabupaten Sleman. Penelitian ini tidak hanya mengkaji dinamika pengelolaan wisata secara umum, tetapi secara khusus mendalami proses *agenda setting* dalam pembentukan dan pengelolaan Green Kayen sebagai destinasi wisata. Penelitian ini memotret adanya ketidaksinkronan dalam aliran kebijakan, khususnya antara pemerintah kalurahan yang memegang kendali strategis melalui Bumkal, dan kelompok Pokdarwis yang justru menjadi pelaku utama di lapangan. Tidak diberikannya kewenangan kepada Pokdarwis untuk menjalin kerja sama dengan investor

menjadi salah satu isu utama yang menghambat proses inovasi pengelolaan wisata.

Perbedaan mencolok dari penelitian ini adalah pada fokus yang lebih tajam dalam melihat bagaimana kekosongan komunikasi dan dominasi kelembagaan tertentu menghambat terbentuknya sinergi. Sementara studi lain banyak menggambarkan pola partisipasi masyarakat atau peran stakeholder dalam konteks yang sudah lebih mapan, penelitian ini menggambarkan situasi di mana konflik peran dan dominasi aktor justru menjadi penghambat utama dalam proses pembangunan destinasi wisata. Di sisi lain, penggunaan pendekatan *agenda setting* melalui teori Three Stream Kingdon dalam konteks Green Kayen memberikan kontribusi baru dalam melihat ketimpangan politik lokal dan hambatan kolaborasi yang terjadi dalam level kalurahan.

Dengan demikian, meskipun memiliki kesamaan metodologis dan teoritis dengan kajian-kajian sebelumnya, penelitian ini menghadirkan konteks yang unik dan aktual, yakni permasalahan kelembagaan dan ketimpangan pengaruh dalam pembentukan wisata berbasis desa yang belum terstruktur secara optimal. Penelitian ini juga memperkaya pemahaman tentang pentingnya penyusunan agenda yang inklusif dan partisipatif dalam pengelolaan potensi lokal berbasis komunitas di tingkat desa.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah konsentrasi atau arah dari suatu penelitian. Fokus penelitian merupakan strategi atau upaya untuk mengumpulkan data dan juga sebagai pedoman dalam mencari

informasi serta sebagai panduan dalam analisis dan pembahasan. Peneliti sangat diharapkan mampu mendapatkan data sesuai dengan fokus yang ditentukan. Selain itu, fokus penelitian juga merupakan batas ruang dalam mengembangkan suatu penelitian, sehingga hasil kajian tersebut akan lebih terarah dan jelas tujuannya. Oleh sebab itu, peneliti menggunakan fokus penelitian dengan indikator/dimensi dengan menggunakan teori Jhon W. Kingdom untuk melihat *agenda setting*. Fokus penelitian ini meliputi:

1. Aliran masalah terkait situasi wisata Green Kayen seperti masalah lingkungan, kebutuhan infrastruktur, atau potensi ekonomi wisata;
2. Aliran kebijakan terkait prioritas pembentukan destinasi wisata Green Kayen;
3. Aliran politik terkait keterlibatan stakeholder dalam industri wisata Green Kayen
4. Faktor pendukung dan penghambat dalam pengembangan destinasi wisata Green Kayen.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan pada latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana *agenda setting* dalam pembentukan Green Kayen sebagai destinasi wisata di Kalurahan Condongcatur?

E. Tujuan Penelitian

Berangkat dari rumusan masalah di atas, maka penelitian bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan hal terkait, sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan *agenda setting* dalam pembentukan desa wisata Green Kayen.
2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menghambat dan mendukung dalam pembangunan destinasi wisata Green Kayen.

F. Manfaat Penelitian

Setiap kajian tentu memiliki manfaat. Dalam kajian penelitian ini, terdapat dua manfaat yaitu; manfaat secara akademis dan manfaat secara praktis:

1. Secara Akademis, kajian ini akan memberikan kontribusi bagi peneliti selanjutnya serta memperkaya pengetahuan bagi kaum akademisi, terlebih khusus pada Ilmu Pemerintahan tentang *agenda setting* dalam pembentukan dan pengelolaan destinasi wisata yang berada di wilayah desa.
2. Secara Praktis, kajian ini akan memberikan informasi pembaca terkait penentuan kebijakan khususnya penentuan kebijakan pada destinasi wisata dengan menggunakan pendekatan *agenda setting* yang dapat digunakan untuk bahan pertimbangan bagi Pemerintah Kalurahan Condongcatur, Pokdarwis serta pihak terkait pembentukan dan pengelolaan wisata Green Kayen.

G. Kerangka Konseptual

1. Pemerintah dan Pemerintahan

Pemerintah dan pemerintahan adalah dua konsep yang saling terkait dalam konteks pengelolaan suatu negara atau wilayah. Pemerintah lebih merujuk pada badan atau lembaga yang memiliki otoritas dan kekuasaan untuk mengatur, mengelola, dan mengendalikan suatu negara atau wilayah. Pemerintah

bertanggung jawab atas penyelenggaraan fungsi-fungsi negara seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif, meskipun bentuk dan strukturnya dapat bervariasi tergantung pada sistem politik suatu negara. Fungsi eksekutif pemerintah mencakup implementasi kebijakan publik, administrasi negara, dan pelaksanaan undang-undang.

Pemerintahan merujuk pada keseluruhan sistem atau proses pengelolaan suatu negara atau wilayah, termasuk lembaga-lembaga, aturan, dan prosedur yang terlibat dalam penyelenggaraan urusan publik. Pemerintahan mencakup semua aspek pengelolaan negara, termasuk pembuatan kebijakan, penyelenggaraan pelayanan publik, penegakan hukum, dan hubungan internasional. Selain itu, juga mencakup partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan, transparansi, akuntabilitas, dan keterlibatan warga dalam urusan pemerintahan. Pemerintah merujuk pada badan atau lembaga konkret yang memiliki kekuasaan untuk mengatur dan mengelola negara. Pemerintahan mencakup keseluruhan sistem atau proses pengelolaan dan penyelenggaraan urusan publik dalam suatu negara atau wilayah.

Kata pemerintah dan pemerintahan pada hakikatnya berasal dari akar kata perintah. Menurut R. Mac Iver, pemerintahan adalah sebagai suatu organisasi dari orang-orang yang mempunyai kekuasaan yang memiliki tujuan bagaimana manusia itu diperintah. Pemerintahan sebagai organisasi negara yang memperlihatkan dan menjalankan kekuasaan (Dahiri, 2020).

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Indonesia yang selanjutnya disebut UUD 1945 pengertian pemerintah dan pemerintahan merujuk pada struktur, fungsi, dan kewenangan lembaga-lembaga negara yang diatur dalam konstitusi. Dalam UUD 1945, pemerintah mengacu pada badan atau lembaga yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan urusan pemerintahan negara. Secara spesifik, pemerintah Indonesia dipimpin oleh presiden sebagai kepala negara dan pemerintahan. Presiden memegang peran penting dalam menjalankan kebijakan negara, mengatur administrasi pemerintahan, dan menjaga stabilitas nasional. Pemerintah juga termasuk kabinet yang dibentuk oleh presiden untuk membantu dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan.

Pemerintahan merujuk pada proses dan sistem penyelenggaraan urusan pemerintahan negara. Dalam UUD 1945, pemerintahan Indonesia didasarkan pada asas kedaulatan rakyat, artinya kekuasaan negara berasal dari rakyat dan dijalankan untuk kepentingan rakyat. Pemerintahan Indonesia juga didasarkan pada prinsip negara hukum, yang menegaskan bahwa setiap tindakan pemerintah harus sesuai dengan hukum dan aturan yang berlaku.

Pemerintah dan pemerintahan dalam UUD 1945 mencerminkan struktur demokrasi, dimana kekuasaan negara dibagi menjadi tiga kekuasaan utama: eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pemerintah bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan sehari-hari, sementara pemerintahan lebih luas merujuk pada proses menyelenggarakan urusan negara secara efektif, efisien, dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan

supremasi hukum. UUD 1945 adalah konstitusi dasar Indonesia yang menerapkan prinsip-prinsip dasar negara, termasuk struktur pemerintahan dan pembagian kekuasaan antara lembaga-lembaga negara.

Pemerintah adalah struktur politik konkrit yang penting dalam pengelolaan sistem negara. Kata “pemerintah” diturunkan dari bahasa Latin “*Gubernare*” yang artinya “mengarahkan”, menjejaki, dan “mengemudi”. Pemerintah merupakan sekumpulan khusus dari individu-individu yang telah menetapkan dan tanggung jawab untuk mempertahankan atau mengadaptasi sistem, di mana mereka menjadi bagian di dalamnya. Pemerintah juga merupakan satuan anggota yang paling umum dan memiliki tanggung jawab tertentu untuk mempertahankan sistem yang mencakupnya dan monopoli praktis yang menyangkut kekuasaan paksaannya. Pemerintah adalah organisasi dari negara yang memperlihatkan dan menjalankan kekuasaannya (Makalew dkk., 2021).

Secara etimologis pemerintah berarti badan atau organisasi yang melakukan kekuasaan memerintah. Pemerintahan berarti perbuatan, cara, hal atau urusan dari badan yang memerintah tersebut. Di beberapa negara bagian pemerintah dan pemerintahan tidak dibedakan: Inggris menyebutnya “*Government*” dan Prancis menyebutnya “*Gouvernement*”, keduanya berasal perkataan Latin “*Gubernaculum*”, dalam bahasa Arab disebut “*Hukumat*”, di Amerika disebut “*Administration*”, sedangkan di Belanda disebut “*Regering*” sebagai penggunaan kekuasaan negara oleh yang

berwenang untuk melakukan keputusan dan kebijakan (Mulyawan, 2015: 7)

Pemerintahan dalam pengertian yang lebih luas, merujuk pada sistem dan proses penyelenggaraan kebijakan publik, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan aturan di suatu negara. Ini mencakup struktur kelembagaan, fungsi, dan interaksi antara berbagai aktor dalam menjalankan urusan publik. Pemerintahan melibatkan hubungan antara pemerintah (lembaga-lembaga resmi yang memiliki kekuasaan) dengan masyarakat, sektor swasta, dan sektor lainnya dalam rangka mencapai tujuan-tujuan negara dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Tujuan dari pemerintahan dapat bervariasi tergantung pada konteks sosial, politik, dan ekonomi suatu negara. Salah satu tujuan utama pemerintahan adalah memastikan ketertiban dan keamanan dalam masyarakat. Hal ini mencakup penegakan hukum, perlindungan terhadap hak-hak individu, serta pencegahan dan penanganan kejahatan dan konflik. Pemerintah bertanggung jawab atas penyediaan berbagai layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, transportasi, infrastruktur, dan lain-lain. Tujuan utamanya adalah memastikan bahwa kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi secara merata dan efisien.

Pemerintah memiliki peran dalam pembuatan kebijakan dan regulasi, baik melalui badan legislatif maupun melalui keputusan eksekutif. Pada hakikatnya pemerintah hadir sebagai organisasi yang mengatur dan melayani masyarakat dan juga dituntut untuk senantiasa mengalami perubahan dari masa ke masa. Perubahan-perubahan ini akan menandakan bahwa pemerintah hadir sebagai

organisasi yang modern dan senantiasa mengikuti kehendak rakyatnya yang dinamis (Solihah, 2019).

Pemerintah juga memiliki peran penting dalam mengembangkan ekonomi negara dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Hal ini dapat dilakukan melalui pembangunan infrastruktur, kebijakan ekonomi yang mendukung pertumbuhan, dan pemberian bantuan kepada kelompok-kelompok yang membutuhkan. Pemerintah juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kebijakan dan program-program yang diimplementasikan memperhatikan keadilan sosial dan kesetaraan bagi semua warga negara. Hal ini mencakup redistribusi sumber daya, perlindungan terhadap kelompok-kelompok rentan, dan peningkatan akses terhadap layanan publik.

Pemerintah bertanggung jawab atas hubungan negara tersebut dengan negara-negara lain di dunia. Tujuan pemerintahan dalam konteks ini yaitu mempromosikan kepentingan nasional, memelihara perdamaian dan keamanan global, serta memfasilitasi kerja sama internasional dalam berbagai bidang. Pemerintah diharapkan dapat memfasilitasi partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan dan penyelenggaraan pemerintahan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa kebijakan dan keputusan yang diambil mencerminkan kepentingan dan aspirasi masyarakat secara luas.

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2021 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam Pasal 1 Angka 12 menyatakan bahwa "Kalurahan" adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah, berwenang

untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa, aspirasi, dan kebutuhan masyarakat serta sesuai dengan nilai-nilai budaya masyarakat setempat. Dalam Pasal 15 mengatur bahwa kalurahan merupakan bagian dari pemerintahan daerah yang memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur urusan pemerintahan yang diserahkan kepada kalurahan.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 memberikan kerangka hukum yang mendukung perubahan status desa menjadi pemerintah kalurahan di DIY. Dengan penekanan pada partisipasi masyarakat dan pengakuan terhadap nilai-nilai budaya lokal, diharapkan perubahan ini dapat memperkuat pemerintahan lokal dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan menyebutkan bahwa kalurahan merupakan bentuk pemerintahan asli dan terdepan di Daerah Istimewa Yogyakarta dalam kerangka sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan mendayagunakan kearifan lokal yang telah mengakar sebagaimana keistimewaan Yogyakarta dalam konteks kekinian dan masa depan.

Dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2023 Tentang Reformasi Kalurahan menyebutkan bahwa Kalurahan merupakan bagian tidak terpisahkan dari keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta yang

berhak mengatur dan mengurus urusan pemerintahan berdasarkan hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Kebijakan Publik

Kebijakan adalah sebuah rangkaian konsep dan azas yang dijadikan garis besar dari dasar sebuah masalah juga digunakan untuk manajemen di dalam usaha mencapai tujuan atau sasaran. Dengan kata lain, kebijakan adalah pedoman dalam bertindak bagi pengambilan sebuah keputusan. Secara terminologi, pengertian kebijakan publik itu memiliki banyak arti. Semua itu tergantung dari sudut mana seseorang mengartikannya. Kebijakan publik adalah sebuah kewenangan yang dimiliki pemerintah.

Kebijakan publik secara sederhana dapat didefinisikan sebagai segala sesuatu yang dinyatakan oleh pemerintah untuk dikerjakan atau tidak dikerjakan. Kebijakan publik merupakan bentuk perwujudan dari sebuah tindakan pemerintah dalam menanggapi sesuatu, bukan semata-mata berupa pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat publik. Pilihan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu juga merupakan bagian dari kebijakan publik, karena pilihan tersebut memiliki pengaruh atau dampak yang sama dengan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu.

Menurut Thomas R. Dye dan Inu Kencana Syafiie dalam (Tahir, 2018), kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Apabila pemerintah melakukan sesuatu, tentu harus disertai dengan tujuan dan kebijakan negara tersebut harus meliputi semua tindak

pemerintah, dan bukan hanya semata-mata bahwa itu hanya keinginan pemerintah atau pejabatnya.

Kebijakan publik adalah keputusan atau langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah atau lembaga pemerintah lainnya untuk mengatasi atau mengelola masalah-masalah yang ada dalam masyarakat. Tujuan dari kebijakan publik bisa bermacam-macam, seperti meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menjaga stabilitas ekonomi, melindungi lingkungan, atau mempromosikan keadilan sosial. Kebijakan publik juga melibatkan proses pengambilan keputusan yang melibatkan identifikasi masalah, penentuan tujuan, pemilihan strategi, implementasi, dan evaluasi. Selain itu kebijakan publik juga mencakup berbagai bidang, seperti ekonomi, pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan keamanan.

Kebijakan publik juga merupakan proses pembuatan keputusan yang melibatkan analisis masalah, identifikasi solusi yang mungkin, pengambilan keputusan, implementasi keputusan, dan evaluasi dampak dari kebijakan yang diambil. Proses ini seringkali melibatkan banyak pihak, termasuk pemerintah, kelompok kepentingan, akademisi, dan masyarakat umum. Selain itu, kebijakan publik juga mencakup regulasi, peraturan, program, dan proyek yang dikerjakan atau dilaksanakan oleh pemerintah untuk mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat. Ini bisa termasuk kebijakan dalam berbagai bidang seperti ekonomi, pendidikan, kesehatan, transportasi, lingkungan, dan lain sebagainya.

Dari definisi-definisi tersebut, kita bisa melihat bahwa para ahli kebijakan publik di Indonesia menggarisbawahi pentingnya keputusan pemerintah dalam menanggapi masalah-masalah sosial, ekonomi, politik, dan lingkungan di tingkat nasional dan lokal. Hal ini juga menekankan pentingnya proses perumusan, implementasi, dan evaluasi kebijakan untuk memastikan efektivitas dan keberhasilannya dalam mencapai tujuan pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2020 Tentang Kelompok Sadar Wisata Dan Desa/Kampung Wisata. Dalam pasal 1 Ayat (1) bahwa Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Desa Wisata. Desa wisata mempunyai peranan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerataan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, optimalisasi potensi ekonomi dan karakteristik daerah, mengangkat dan melindungi nilai-nilai budaya, agama, adat istiadat, serta menjaga kelestarian lingkungan. Selain itu, pemberdayaan desa wisata perlu didukung dengan peningkatan kualitas sumber daya desa melalui penetapan kebijakan, program, dan pendampingan oleh pemerintah daerah. Pengaturan desa wisata ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi pengelolaan dan pengembangan kepariwisataan berbasis budaya lokal sesuai dengan perencanaan pembangunan Daerah.

3. *Agenda setting*

Menurut William Dunn dalam (Aswari dkk, 2017) *agenda setting* adalah sebuah proses di mana terdapat ruang yang dapat memaknai apa yang disebut sebagai masalah publik dan agenda publik, jika sebuah isu telah menjadi masalah publik, dan mendapatkan prioritas utama dalam agenda publik. Kemudian isu tersebut mendapatkan alokasi sumber daya publik yang lebih daripada isu lainnya. Selain itu *agenda setting* juga termasuk dalam tahap pertama proses suatu kebijakan, (Jhon Kingdon dalam (Aswari dkk, 2017). Kingdon menjelaskan bahwa *agenda setting* merupakan proses mempersempit suatu persoalan yang sedang terjadi di masyarakat untuk menjadi fokus bagi pemerintah. Menurutnya dalam pengambilan keputusan dan kebijakan publik terdapat tiga aspek yang dikenal dengan *Three Stream Theory*, yang meliputi: *Problem Stream* yaitu aliran masalah yang menjadi perhatian banyak pihak, *Policy Stream* yaitu membahas tentang aliran politik, dan *Political Stream* yaitu membahas tentang arus dari kebijakan tersebut.

Dalam konteks ini yang menjadi alarin masalah adalah keadaan di lingkungan area wisata yang dapat dijadikan sebagai isu utama dan dirasakan oleh masyarakat, kemudian mendapatkan perhatian publik. Aliran kebijakan adalah permasalahan yang diidentifikasi dan masuk dalam skala prioritas, kemudian aktor penyusun kebijakan menentukan solusi pemecahan masalahnya. Aliran politik adalah digambarkan sebagai bentuk keterlibatan berbagai stakeholder atau bentuk hubungan afiliasi antara aktor

yang punya kepentingan dalam pembentukan dan pengelolaan wisata (Arlinasari & Yuanjaya, 2023).

Karin dkk., (2022), *agenda setting* merupakan tahapan dan proses yang sangat strategis dalam realitas kebijakan publik. Di sisi lain *agenda setting* juga diartikan sebagai sebuah kegiatan yang membuat masalah publik menjadi masalah kebijakan (Maman & Kartini, 2016).

Agenda setting memberikan kesempatan untuk memahami dan memberikan makna pada permasalahan publik serta menentukan prioritas dalam agenda publik yang sedang diperdebatkan. Ketika suatu isu berhasil diakui sebagai masalah publik, isu tersebut berhak untuk ditindaklanjuti dan mendapatkan alokasi sumber daya utama. Selain itu, *agenda setting* juga adalah proses yang mempersempit berbagai persoalan yang ada di masyarakat agar dapat menjadi fokus perhatian pemerintah (Arlinasari, 2023).

Agenda setting merupakan proses di mana isu-isu tertentu diangkat dan diprioritaskan dalam diskursus publik, sehingga isu tersebut dianggap penting dan memerlukan perhatian dari pemerintah dan masyarakat (Maman & Kartini, 2016)

Dalam hal ini *agenda setting* dalam konteks pengelolaan wisata mengacu pada proses memilih, menentukan, dan memprioritaskan isu-isu atau topik-topik yang akan diberikan perhatian dan fokus oleh para pengambil keputusan, stakeholders, atau masyarakat dalam upaya mengelola destinasi wisata. Dalam pengelolaan wisata, *agenda setting* berarti menetapkan prioritas tentang hal-hal apa yang akan diutamakan dalam upaya

pengelolaan destinasi wisata. Ini bisa meliputi berbagai aspek, seperti pelestarian lingkungan, pembangunan infrastruktur, pengembangan ekonomi lokal, pendidikan lingkungan, promosi pariwisata, dan lain sebagainya (Toulwala & Hayon, 2025).

4. Pariwisata

Pariwisata adalah industri yang berkaitan dengan perjalanan, penginapan, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang-orang yang bepergian ke tempat-tempat di luar lingkungan. Ini juga bisa meliputi wisata alam, wisata budaya, wisata sejarah, dan berbagai jenis perjalanan lainnya. Pariwisata juga mencakup segala sesuatu mulai dari kunjungan singkat ke tempat wisata lokal hingga perjalanan lintas benua yang panjang. Pariwisata juga melibatkan aspek-aspek seperti promosi destinasi wisata, infrastruktur pariwisata, pengelolaan sumber daya alam dan budaya, serta pelayanan kepada wisatawan. Ini adalah sektor yang penting dalam banyak ekonomi, menyediakan pekerjaan, pendapatan, dan peluang investasi, sambil juga mempromosikan pertukaran budaya dan pemahaman antar negara dan masyarakat.

Pariwisata adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan wisata termasuk pengusahaan obyek dan daya tarik serta usaha yang terkait di bidang tersebut. Pariwisata merupakan suatu kegiatan perjalanan yang dilakukan untuk sementara waktu, dengan bepergian dari suatu tempat ke tempat lain dan tinggal sebagai bukan penduduk, dengan tujuan untuk liburan, bisnis, dan tujuan lainnya (Sa'ban et al., 2023).

Menurut Pitana (2007), pariwisata adalah suatu sistem yang multi kompleks dengan berbagai aspek yang saling berhubungan

satu sama lain, dan mempengaruhi antar sesama. Sedangkan Wahab (2008) pariwisata adalah salah satu jenis industri baru yang dapat mampu menghasilkan pertumbuhan ekonomi dan tergolong cepat dalam menyediakan lapangan pekerjaan (Takome et al., 2021). Pariwisata merupakan fenomena yang sedang terjadi dan termasuk populer untuk dikembangkan sebagai penghasil devisa negara dari non migas karena industri pariwisata relatif tidak menimbulkan polusi ataupun kerusakan lingkungan (Riani, 2021).

Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pariwisata, pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang dapat dilakukan dan didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat lokal, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. Artinya, bahwa pariwisata merupakan perjalanan yang dilakukan manusia ke daerah yang bukan merupakan tempat tinggalnya dalam waktu paling tidak satu malam, dengan tujuan perjalanannya bukan untuk mencari nafkah, pendapatan atau penghidupan di tempat tujuan (Lumansik et al., 2022).

Dari definisi-definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pariwisata sebagai aktivitas wisata atau perjalanan. Mereka menyoroti pentingnya dampak ekonomi, sosial, dan budaya yang ditimbulkan oleh sektor pariwisata serta kompleksitas hubungan antara wisatawan, tuan rumah, dan lingkungan. Definisi-definisi ini memberikan pandangan yang holistik tentang peran pariwisata dalam pembangunan berkelanjutan.

Pariwisata dalam konteks wisata alam adalah jenis wisata yang memfokuskan pada eksplorasi dan pengalaman alam liar atau alam terbuka. Ini melibatkan kunjungan ke taman nasional, hutan, gunung, pantai, dan area alam lainnya yang belum banyak terganggu oleh aktivitas manusia. Wisata alam menawarkan kesempatan bagi pengunjung untuk menikmati keindahan alam, melihat keanekaragaman hayati, dan terlibat dalam aktivitas luar ruangan seperti hiking, berkemah, berenang, dan observasi satwa liar. Pengalaman wisata alam seringkali menekankan aspek keaslian, keindahan alam, dan keragaman ekosistem. Berbeda dengan wisata urban atau wisata budaya, wisata alam menawarkan pengalaman yang lebih terhubung dengan alam dan lingkungan alamiah (Hadji et al., 2017).

Beberapa tujuan dari wisata alam yaitu:

- a. Wisata alam dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan alam. Dengan memperkenalkan pengunjung pada keindahan dan keragaman alam, wisata alam dapat meningkatkan dukungan untuk konservasi alam.
- b. Wisata alam juga dapat berperan sebagai alat pendidikan yang efektif tentang lingkungan alam. Pengunjung dapat belajar tentang ekologi, keanekaragaman hayati, dan tantangan pelestarian alam yang dihadapi.
- c. Pengelolaan wisata alam yang bijaksana dapat memberikan manfaat ekonomi bagi komunitas lokal, melalui peningkatan kunjungan wisatawan yang membawa dampak positif bagi

bisnis lokal, termasuk akomodasi, makanan, dan barang kerajinan.

- d. Wisata alam menyediakan kesempatan untuk rekreasi dan kegiatan luar ruangan yang bermanfaat bagi kesehatan fisik dan mental. Aktivitas seperti hiking, berenang, atau piknik dapat meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi stres.
- e. Wisata alam memberikan kesempatan bagi pengunjung untuk mendapatkan pengalaman unik dan menarik di alam liar. Ini dapat mencakup penjelajahan alam, observasi satwa liar, dan partisipasi dalam aktivitas konservasi.

Dengan memahami dan menghargai keindahan serta pentingnya alam, wisata alam memainkan peran penting dalam mempromosikan kesadaran lingkungan dan pelestarian alam sambil memberikan manfaat ekonomi dan pengalaman positif bagi pengunjung.

BAB II

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah langkah-langkah sistematis yang digunakan untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi penelitian dalam upaya memperoleh pengetahuan baru, memperdalam pemahaman, atau menjawab pertanyaan penelitian. Metode penelitian membantu peneliti dalam merumuskan kerangka kerja, merencanakan prosedur, mengumpulkan data, menganalisis hasil, dan menyimpulkan temuan.

Pada dasarnya metode penelitian merupakan cara yang ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Terdapat empat kunci yang perlu diperhatikan dalam metode penelitian, yaitu cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan. Cara ilmiah merupakan kegiatan penelitian yang didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yaitu; yang rasional, empiris, dan sistematis. Rasional, artinya kegiatan penelitian dapat dilakukan cara yang masuk, sehingga dapat dimengerti oleh penalaran manusia. Empiris, artinya cara yang dapat dilakukan melalui pengamatan dengan menggunakan indera manusia. Sistematis, artinya proses yang digunakan dalam penelitian dengan menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis (Sugiyono, 2013).

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Metode penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, yang digunakan untuk meneliti pada objek yang alamiah. Sebagai lawannya adalah eksperimen, di mana peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih

menekankan makna daripada generalisasi, serta mampu menemukan hipotesis yang bersifat struktural/konstruktif (Sugiyono, 2013).

Menurut Creswell (Sugiyono, 2013), penelitian kualitatif berarti proses eksplorasi dan memahami makna perilaku individu dan kelompok tertentu, dengan menggambarkan masalah sosial atau masalah kemanusiaan. Proses penelitian ini mencakup membuat pertanyaan penelitian dan prosedur yang bersifat sementara, dengan mengumpulkan data pada setting partisipan/narasumber, analisis data secara induktif, membangun data, yang parsial ke dalam tema tersebut. Metode kualitatif memberikan interpretasi terhadap makna pada suatu data. Pada kegiatan akhir adalah membuat laporan kesimpulan ke dalam struktur yang fleksibel.

Creswell (Sugiyono, 2017) menyatakan bahwa penelitian yang bersifat kualitatif akan berfungsi bagi peneliti sebagai bekal agar bisa memahami konteks secara lebih luas dan mendalam. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkapkan fenomena sosial yang sedang terjadi secara jelas dan cermat. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif. Creswell juga memberikan definisi mengenai penelitian kualitatif sebagai suatu pendekatan atau penelusuran untuk mengeksplorasi dan memahami suatu gejala sentral (Sugiyono, 2017)

B. Lokasi Penelitian

Pemilihan Wisata Green Kayen sebagai lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan strategis dan relevansi akademis terhadap tema pengembangan pariwisata berbasis lokal. Wisata Green Kayen merupakan destinasi wisata yang tergolong baru dan berkembang di wilayah Padukuhan Kayen, Kalurahan Condongcatur,

Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Keberadaan destinasi ini menarik untuk dikaji karena muncul dari inisiatif masyarakat lokal yang memanfaatkan potensi alam berupa sungai dan kawasan hijau di tengah kepadatan wilayah perkotaan.

Sebagai destinasi yang masih dalam tahap pengembangan, Green Kayen mencerminkan dinamika awal dalam proses pembangunan wisata berbasis partisipasi masyarakat. Hal ini memberikan ruang kajian yang luas, terutama dalam melihat bagaimana aktor-aktor lokal, seperti pemerintah kalurahan, komunitas warga, serta pelaku usaha kecil, bekerja sama dalam membangun citra dan infrastruktur destinasi. Dengan statusnya sebagai wisata baru, Green Kayen belum banyak dijadikan objek kajian akademis, sehingga penelitian ini sekaligus diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah terhadap literatur pengelolaan wisata alternatif di daerah urban-rural fringe.

Selain itu, lokasi ini juga menyimpan potensi sosial-ekonomi yang signifikan. Terletak di wilayah yang cukup strategis dan dekat dengan pusat pendidikan serta permukiman, Green Kayen memiliki peluang untuk berkembang sebagai destinasi edukatif, rekreatif, sekaligus inklusif. Oleh karena itu, meneliti Green Kayen memberikan peluang untuk memahami secara lebih dalam bagaimana suatu destinasi wisata baru dibangun melalui pendekatan *agenda setting*, serta bagaimana antara pemerintah, Pokdarwis Green Kayen, Bumkal Nyawiji dan masyarakat terbentuk dalam konteks pengelolaan pariwisata lokal.

C. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari kejadian atau fenomena yang sedang diteliti. Pengumpulan data primer dapat dilakukan dengan metode seperti survei, wawancara, observasi langsung, atau pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian. Data primer yaitu termasuk hasil wawancara yang diperoleh dari narasumber secara langsung, catatan observasi yang didokumentasikan langsung dari kegiatan yang diamati, atau hasil pengukuran yang diperoleh lewat pengamatan yang dilakukan oleh peneliti (Sugiyono, 2017). Adapun data yang didapat dalam penelitian ini adalah gambaran umum objek penelitian, meliputi: awal pembentukan wisata Green Kayen, stakeholder yang terlibat dalam pembentukan wisata Green Kayen, pengambilan keputusan dalam pembentukan wisata tersebut. Sumber data primer dalam penelitian ini dapat diperoleh dari informan yaitu: Pemerintah Kalurahan Condongcatur, Pokdarwis Green kayen , Karang Taruna, Bumkal Nyawiji dan Tokoh Masyarakat.

2. Data Sekunder

Data yang telah dikumpulkan dan diproses sebelumnya oleh pihak lain, dan kemudian digunakan kembali oleh peneliti atau analis untuk tujuan tertentu. Data ini tidak diperoleh langsung dari sumber aslinya, tetapi berasal dari sumber-sumber seperti publikasi jurnal ilmiah, laporan pemerintah, basis data komersial, atau sumber lainnya. Misalnya dari data sekunder termasuk data

statistik yang dipublikasikan oleh badan statistik nasional, laporan penelitian yang diterbitkan oleh lembaga akademis, atau hasil survei yang sudah ada dan dipublikasikan sebelumnya (Sugiyono, 2017). Dalam konteks pengembangan Green Kayen, data sekunder yang relevan dapat mencakup statistik kunjungan wisatawan, dokumen perencanaan pembangunan dari pemerintah kalurahan, serta hasil kajian terdahulu yang dilakukan oleh lembaga akademis atau lembaga swadaya masyarakat. Data-data tersebut memberikan gambaran awal mengenai potensi, tantangan, serta dinamika aktor-aktor yang terlibat dalam pengembangan kawasan wisata.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah metode atau prosedur yang digunakan untuk mengumpulkan informasi atau data yang diperlukan untuk tujuan analisis, penelitian, atau pengambilan keputusan. Teknik ini dapat bervariasi tergantung pada jenis data yang diinginkan, lingkungan penelitian, sumber data, dan tujuan penelitian. Catherine Marshall dkk, dalam (Sugiyono, 2017) metode pengumpulan data yang utama dalam penelitian kualitatif adalah, peneliti harus berpartisipasi di obyek yang diteliti, melakukan observasi langsung, melakukan wawancara dan serta studi dokumentasi secara mendalam. Sesuai dengan penelitian kualitatif dan jenis sumber data yang dimanfaatkan maka teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu;

1. Observasi

Metode ini menggunakan pengamatan atau penginderaan langsung terhadap suatu benda, kondisi, situasi, proses atau perilaku. Pengumpulan data dengan menggunakan alat indera dan diikuti dengan pencatatan secara sistematis terhadap gejala-gejala/fenomena yang sedang diteliti. Observasi dilakukan bila belum banyak keterangan yang dimiliki tentang masalah yang diselidiki. Dari hasil observasi, dapat diperoleh gambaran yang lebih jelas tentang masalahnya dan mungkin petunjuk-petunjuk tentang cara memecahkan masalah, (Sugiyono, 2017).

Creswell (Sugiyono, 2017) observasi adalah ketika peneliti turun langsung kelapangan untuk mengamati perilaku aktivitas individu-individu di lokasi penelitian. Dalam penelitian ini, hal-hal yang diobservasi yaitu: pembentukan awal destinasi wisata Green Kayen, stakeholder mana saja yang terlibat dan bagaimana partisipasi masyarakat setempat dalam pembentukan destinasi wisata Green Kayen.

2. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan dua orang atau maupun lebih, dengan tujuan untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan dalam makna suatu topik tertentu Esterberg dalam (Sugiyono, 2017). Penggunaan wawancara mendalam (*depth interview*) dalam penelitian ini adalah untuk mendapatkan data primer dari subyek penelitian dengan cara wawancara mendalam yang tidak berstruktur, dengan pertimbangan supaya dapat berkembang sesuai dengan

kepentingan penelitian. Wawancara ini dilakukan karena peneliti untuk mendapatkan informasi yang jelas dan mendalam terkait *agenda setting* pembentukan destinasi wisata Green Kayen. Wawancara tersebut dilakukan dengan tatap muka langsung (*face to face*).

Wawancara yang dilakukan merupakan data primer, di mana peneliti melakukan wawancara secara mendalam dengan tujuan untuk memperoleh/mendapatkan informasi yang lengkap dan akurat. Dalam penelitian ini pengambilan informan menggunakan teknik *purposive* dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu untuk memasukkan unsur-unsur yang dianggap bisa memberikan informasi yang akurat tentang *agenda setting* pembentukan dan pengembangan destinasi wisata Green Kayen. Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah Pemerintah Kalurahan Condongcatur, Pokdarwis Green Kayen, Karang Taruna, Bumkal Nyawiji dan Tokoh Masyarakat.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah bukti otentik bagi peneliti dengan menggunakan alat yang dipersiapkan/seadanya untuk mengambil data yang diperlukan secukupnya, (Sugiyono, 2017). Dokumen lain juga adalah dokumen yang berbentuk tulisan misalnya gambaran umum Kalurahan Condongcatur, sejarahnya dalam profil kalurahan, kebijakan yang digunakan dalam pengelolaan wisata Green Kayen, serta dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto. Hasil dokumen yang ada kemudian diolah sedemikian rupa, agar dapat melengkapi data yang sudah diperoleh dari metode observasi dan wawancara.

E. Teknik Pemilihan Informasi dan Narasumber

Teknik pemilihan narasumber adalah serangkaian strategi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, memilih, dan mengumpulkan informasi atau narasumber yang relevan dan berkualitas untuk mendukung penelitian, penulisan, atau kegiatan lainnya. Tujuan dari teknik ini adalah untuk memastikan bahwa informasi yang diperoleh merupakan sumber yang valid, kredibel, dan sesuai dengan kebutuhan penelitian atau proyek yang sedang dilakukan. Teknik pemilihan narasumber adalah bagian penting dari proses penelitian dan pengumpulan informasi yang efektif. Dengan menggunakan teknik ini dengan cermat, peneliti dapat memastikan bahwa informasi yang mereka peroleh berkualitas tinggi dan dapat diandalkan, (Sugiyono, 2017).

Tabel 2. 1 Data Informan Penelitian

No	Instansi	Pertimbangan
1	Pemerintah Kalurahan Condongcatur	Sebagai pemerintah setempat, Pemerintah Kalurahan Condongcatur memiliki wewenang dan informasi yang lebih detail tentang kebutuhan dan kebijakan masyarakat setempat. Mereka dapat memberikan penjelasan yang lebih spesifik tentang bagaimana pengembangan wisata Green Kayen dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan meningkatkan perekonomian setempat.
2	Pokdarwis Green Kayen	Sebagai organisasi yang berfokus pada pengembangan lingkungan, Pokdarwis Green Kayen memiliki pengetahuan yang luas tentang isu-isu lingkungan dan dapat memberikan saran yang lebih spesifik tentang

No	Instansi	Pertimbangan
		bagaimana mengembangkan wisata Green Kayen yang lestari dan berkelanjutan.
3	Masyarakat	Masyarakat, adalah mereka memiliki pengalaman dan pengetahuan tentang kebutuhan dan kebijakan. Mereka dapat memberikan penjelasan yang lebih spesifik tentang bagaimana pengembangan wisata Green Kayen dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan meningkatkan perekonomian setempat.
4	Karang Taruna	Sebagai organisasi yang berfokus pada pengembangan masyarakat, Karang Taruna memiliki pengetahuan tentang kebutuhan dan kebijakan masyarakat setempat. Mereka dapat memberikan saran yang lebih spesifik tentang bagaimana mengembangkan wisata Green Kayen yang lebih sejahtera dan berkelanjutan, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengembangan wisata.
5	Bumkal (Badan Usaha Milik Kalurahan)	BUMKal merupakan lembaga ekonomi desa yang dapat mengelola unit-unit usaha milik kalurahan, termasuk sektor pariwisata. Dalam pengelolaan wisata Green Kayen, BUMKal dapat memainkan peran penting sebagai pengelola kelembagaan dan keuangan.

Sumber: Data diolah 2024-2025

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah serangkaian proses atau metode yang digunakan untuk mengubah, membersihkan, memeriksa, dan menginterpretasikan data sehingga dapat diambil kesimpulan atau informasi yang berarti. Tujuannya adalah untuk mengungkap pola, tren, hubungan, atau insight yang terkandung dalam data tersebut.

Sugiyono, (2017) analisis data merupakan proses memilih mana yang penting dan yang tidak penting, mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengkoordinasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola hubungan antar kategori, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.

Dalam penelitian ini untuk menganalisis data penelitian kualitatif menggunakan tiga tahapan yang ditemukan oleh Miles & Huberman dalam (Sugiyono, 2017) yaitu:

1. Reduksi Data (*data reduction*)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok dan memfokuskan pada hal-hal penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk mengumpulkan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan. Data yang direduksi adalah hasil wawancara dengan pemangku kepentingan (seperti pemerintah kalurahan, pokdarwis, karang taruna dan masyarakat) tentang pandangan mereka terhadap Green Kayen. Artinya bahwa setelah mengumpulkan data tersebut, peneliti memilih informasi yang paling relevan dan penting untuk menjawab pertanyaan penelitian, serta mengidentifikasi tema dan pola yang muncul dari data mengenai *agenda setting*.

2. Penyajian Data (*data display*)

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori dan

sejenisnya. Penyajian data dilakukan berdasarkan data yang telah dikumpulkan dari semua informan. Setelah data terkumpul langkah selanjutnya peneliti menganalisis untuk selanjutnya dikategorikan mana yang diperlukan dan tidak diperlukan. Data yang disajikan adalah ringkasan dari hasil wawancara dan observasi yang menggambarkan pandangan masyarakat dan para pemangku kepentingan tentang Green Kayen. Kemudian peneliti menggambarkan hubungan antara berbagai faktor yang mempengaruhi pembentukan Green Kayen, seperti dukungan masyarakat, kebijakan pemerintah, dan potensi alam. Penyajian data ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas dan terstruktur tentang situasi dan potensi Green Kayen sebagai destinasi wisata.

3. Penarikan Kesimpulan (*conclusion drawing*)

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono, (2017) adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Penarikan kesimpulan dapat diambil setelah melakukan analisis data dengan melakukan verifikasi, dapat terlihat apakah rumusan masalah telah terjawab, dan tujuan penelitian tercapai. Penarikan kesimpulan atau verifikasi dilakukan untuk menguji kebenaran serta mencocokkan yang ada untuk kemudian diperoleh data yang valid dan jelas. Selain itu, penarikan kesimpulan dilakukan untuk memberikan deskripsi dari banyaknya informasi yang diperoleh serta mendapatkan informasi akhir. Dalam hal ini penarikan kesimpulan adalah mengidentifikasi pola dan tema yang muncul dari data yang telah disajikan melalui *agenda setting*.

G. Teknik Validasi Data

Teknik validasi data adalah serangkaian prosedur atau metode yang digunakan untuk mengevaluasi, memeriksa, dan memastikan keakuratan, keandalan, dan konsistensi data yang dikumpulkan dalam suatu penelitian atau analisis. Tujuan utama dari teknik validasi data adalah untuk memastikan bahwa data yang digunakan dalam analisis atau penelitian dapat dipercaya dan memberikan hasil yang akurat serta relevan. Karena penelitian kualitatif sering berfokus pada pemahaman mendalam tentang pengalaman, persepsi, dan konteks subjek penelitian, validasi data menjadi krusial untuk memastikan bahwa interpretasi dan analisis yang dihasilkan tepat dan dapat dipercaya (Sugiyono, 2017). Teknis validasi data tersebut meliputi:

1. Uji Derajat Kepercayaan

Uji derajat kepercayaan yaitu menunjukkan sejauh mana data dan temuan penelitian dapat dipercaya, benar-benar mewakili pandangan dan pengalaman partisipan. Tujuannya adalah untuk mengetahui tingkat kepercayaan data yang dihasilkan dari suatu penelitian, apakah dapat percaya atau tidak. Hal ini dilakukan dengan cara memperpanjang pengamatan selama enam bulanan pada saat penelitian berlangsung, meningkatkan ketekunan dan ketelitian saat penelitian, dan melakukan triangulasi. Perpanjangan pengamatan yaitu memberikan waktu kepada peneliti untuk kembali ke lapangan melakukan pengamatan dan wawancara terhadap informan baru maupun yang lama, sehingga informasi yang didapatkan lebih akurat. Meningkatkan ketekunan dan ketelitian yaitu untuk menghindari kesalahan dalam mengambil kesimpulan apabila ada data yang

terlewatkan sehingga perlu dilakukan ketekunan dan ketelitian. Triangulasi yaitu menguji derajat kepercayaan informasi yang diperoleh peneliti dengan membandingkan dari berbagai sumber. Uji derajat kepercayaan *agenda setting* dalam pembentukan Green Kayen sebagai destinasi wisata di Kalurahan Condongcatur.

2. Uji Keteralihan

Uji keteralihan yaitu menggambarkan sejauh mana temuan dapat diterapkan ke konteks lain yang serupa. Peneliti menyajikan deskripsi mendalam tentang *agenda setting* dalam pembentukan dan pengelolaan Green Kayen sebagai objek wisata di Kalurahan Condongcatur, termasuk sejarahnya sebagai kawasan pemandian warga, transformasinya menjadi destinasi wisata, serta peran aktif masyarakat dalam pembentukan dan pengelolaan serta pelestarian budaya. Informasi rinci mengenai struktur organisasi Pokdarwis, jenis kegiatan yang dilakukan, dan interaksi antara masyarakat dan pengunjung disajikan untuk memungkinkan pembaca menilai relevansi temuan dengan konteks lain. Uji derajat kepercayaan dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, ketekunan dan ketelitian, triangulasi, serta diskusi dengan rekan sejawat.

3. Uji Ketergantungan

Uji ketergantungan yaitu menunjukkan stabilitas data dari waktu ke waktu dan sejauh mana proses penelitian bisa dilacak. Hal ini peneliti mendokumentasikan semua proses penelitian, termasuk perubahan metode wawancara, penyesuaian jadwal observasi,

dan keputusan analisis data. Temuan dan interpretasi data dibahas dengan rekan sejawat atau pembimbing untuk mendapatkan masukan dan memastikan konsistensi analisis mengenai *agenda setting* dalam pembentukan dan pengelolaan objek wisata.

4. Uji Kepastian

Uji kepastian yaitu menjamin bahwa temuan penelitian berdasarkan data, bukan persepsi atau bias peneliti. Selain untuk kebergantungan, dokumentasi lengkap juga digunakan untuk memastikan bahwa temuan dapat ditelusuri kembali ke data asli. Peneliti mencatat dan merefleksikan pengaruh pribadi, seperti latar belakang budaya atau hubungan dengan informan, terhadap proses pengumpulan dan interpretasi data mengenai *agenda setting* dalam pembentukan dan pengelolaan Green Kayen sebagai objek wisata di Kalurahan Condongcatur.

BAB III

PROFIL WISATA GREEN KAYEN DAN KALURAHAN

A. Sejarah Wisata Green Kayen

Pembentukan wisata di Green Kayen yang terletak di Kalurahan Condongcatur, Kapanewon Depok, Sleman merupakan inisiatif baru dalam sektor pariwisata di Yogyakarta. Konsep *agenda setting*, yang berfokus pada isu-isu tertentu diprioritaskan dalam kebijakan publik digunakan untuk menganalisis proses pembentukan pengembangan ini. Dalam konteks ini, *agenda setting* membantu memahami bagaimana informasi tentang Green Kayen disampaikan kepada masyarakat dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi persepsi serta partisipasi publik.

Wisata Green Kayen di Kalurahan Condongcatur, Yogyakarta, mulai dikembangkan sekitar tahun 2017. Awalnya, area ini hanya sebuah lahan kosong yang dipenuhi semak-semak karena berada di pinggir sungai. Beberapa warga sekitar memiliki gagasan untuk mengubah lahan tersebut menjadi sebuah destinasi wisata yang dapat menarik minat pengunjung. Inisiatif pembentukan wisata Green Kayen berasal dari kelompok pemuda di Padukuhan Kayen Condongcatur yang tergabung dalam Karang Taruna serta masyarakat setempat. Mereka melihat potensi lahan tersebut untuk dikembangkan menjadi tempat wisata yang dapat mendatangkan manfaat bagi warga setempat. Kelompok pemuda tersebut kemudian mengajak warga lainnya, termasuk pihak pemerintah desa, untuk bersama-sama mewujudkan rencana pembentukan lahan menjadi tempat wisata. Melalui gotong royong dan partisipasi aktif warga, area lahan kosong pun mulai bersihkan, dibanahi dan didesain sedemikian rupa sehingga tercipta

sebuah kawasan wisata yang asri dan menarik. Kemudian tempat tersebut beri nama menjadi wisata Green Kayen karena tepatnya berada di padukan kayen.

Lewat musyawarah dan juga campur tangan dari Pemerintah Kalurahan, berbagai fasilitas pendukung seperti taman, gazebo, sarana edukasi pun dibangun secara bertahap. Inisiatif warga ini mendapat dukungan dari Pemerintah Kalurahan dan instansi terkait, sehingga pembentukan dan pengembangan wisata Green Kayen dapat berjalan dengan baik. Sejak dibuka untuk umum pada tahun 2018, wisata Green Kayen semakin dikenal luas dan menjadi salah satu destinasi populer di Kalurahan Condongcatur. Keberadaannya tidak hanya memberikan manfaat ekonomi bagi warga sekitar, tetapi juga menjadi sarana rekreasi dan edukasi bagi pengunjung.

Inisiatif awal terbentuknya destinasi wisata Green Kayen merupakan representasi nyata dari peran pemuda sebagai agen perubahan dalam pembangunan berbasis lokal. Aktivitas padusan yang merupakan tradisi budaya menjelang bulan Ramadhan dimaknai tidak hanya sebagai kegiatan religius, tetapi juga menjadi pemicu kesadaran terhadap potensi lingkungan sekitar. Fenomena ini menunjukkan bahwa proses penciptaan destinasi wisata tidak selalu harus diawali oleh kebijakan formal dari pemerintah, melainkan dapat tumbuh secara organik dari inisiatif masyarakat, khususnya generasi muda yang memiliki kreativitas dan sensitivitas terhadap lingkungan sosial dan alam.

Keterlibatan pemuda dalam mengidentifikasi potensi alam, yakni bendungan Sungai Boyong yang menyerupai air terjun, memperlihatkan kemampuan mereka dalam melihat peluang pariwisata dari sudut pandang lokal. Proses transformasi dari aktivitas tradisional menuju gagasan

pengembangan wisata mencerminkan pemanfaatan aset budaya dan alam sebagai basis pembentukan destinasi. Selanjutnya, komunikasi yang dibangun oleh para pemuda dengan tokoh masyarakat dan struktur kepemimpinan informal seperti RT/RW menunjukkan bahwa proses sosial dan kultural tetap menjadi pondasi penting dalam melegitimasi ide-ide pembangunan di tingkat komunitas.

Respons positif dari Pemerintah Kalurahan terhadap gagasan tersebut menandakan adanya hubungan yang sinergis antara masyarakat dan pemerintah desa dalam pengelolaan potensi lokal. Dukungan yang diberikan oleh Kalurahan bukan hanya memberikan legitimasi formal terhadap inisiatif masyarakat, tetapi juga membuka jalan bagi dukungan struktural lainnya seperti pelatihan, infrastruktur, dan promosi. Kasus Green Kayen ini menjadi contoh praktik baik dari model pembangunan partisipatif yang berangkat dari bawah (bottom-up), di mana ide kreatif warga didukung secara kelembagaan demi terwujudnya destinasi wisata yang berkelanjutan dan berbasis kearifan lokal.

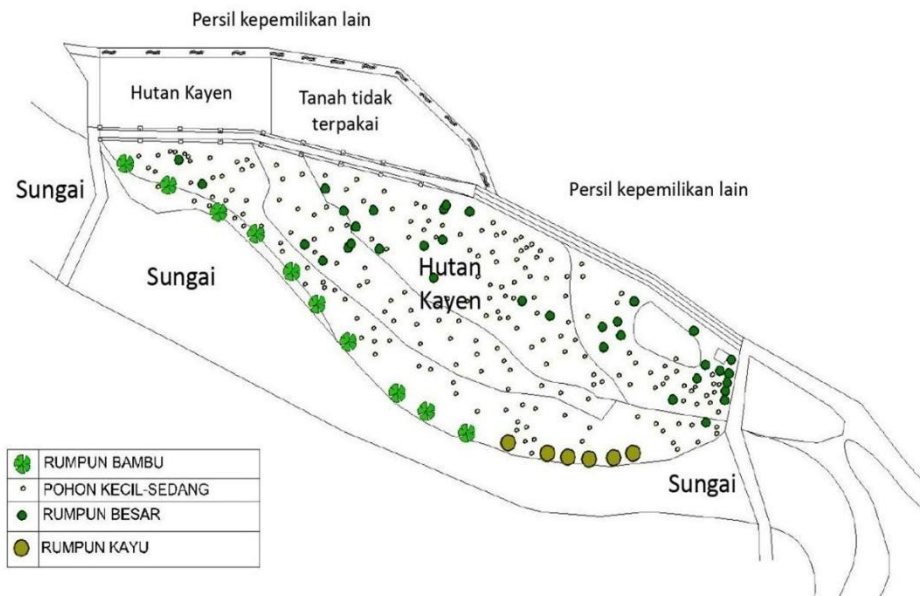
1. Geografis

Secara geografis, Green Kayen memiliki posisi yang cukup unik dan strategis. Terletak di bagian paling barat Kalurahan Condongcatur, Padukuhan ini juga merupakan wilayah terujung di sisi barat Kapanewon Depok. Dalam konteks spasial yang lebih luas. Keunikan ini semakin menonjol karena Green Kayen berada di antara dua Kapanewon yang dikenal prestisius, yakni Kapanewon Mlati dan Kapanewon Ngaglik. Kondisi geografis ini menghadirkan dinamika tersendiri yang turut mempengaruhi arah pembangunan dan peluang pengembangan wilayah, termasuk dalam sektor pariwisata berbasis lokal.

Batas wilayah Green Kayen:

- Utara Berbatasan dengan Padukuhan Krikilan Kalurahan Sariharjo Kapanewon Nganglik
- Selatan Berbatasan dengan Padukuhan Sono Kalurahan Sinduadi, Kapanewon Mlati
- Barat Berbatasan dengan Padukuhan Lempong, Kalurahan Sariharjo, Kapanewon Nganglik
- Timur Berbatasan dengan Padukuhan Joho, Kalurahan Condongcatur, Kapanewon Depok

Gambar 3. 1 Peta Lahan Green Kayen



Tabel 3. 1 Susunan Pengelola Desa Wisata Green Kayen

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Pengelola
1	Reno Candra Sangaji	Lurah Condongcatur	Pelindung
2	Purwanto	Dukuh Kayen	Penasehat
3	Dadang Hermawan	Tokoh Masyarakat	Ketua
4	Warsidik	Tokoh Masyarakat	Wakil Ketua
5	Rahmat Tri Susetyo	Tokoh Masyarakat	Sekretaris
6	Muhammad Sariyanto	Tokoh Masyarakat	Wakil Sekretaris
7	Jindarto	Tokoh Masyarakat	Bendahara
8	Terbit Dwipo Harjono	Pemuda	Sarana, Prasarana, Kebersihan, dan Keindahan
9	Taufik Yossy Marwantono	Pemuda	Sarana, Prasarana, Kebersihan, dan Keindahan
10	Warijo	Tokoh Masyarakat	Sarana, Prasarana, Kebersihan, dan Keindahan
11	Eko Sunarto	Tokoh Masyarakat	Sarana, Prasarana, Kebersihan, dan Keindahan
12	Seno Aji Saputro	Pemuda	Daya Tarik Wisata dan Kenangan
13	Adhityas Setyo Nugroho	Pemuda	Daya Tarik Wisata dan Kenangan
14	Eka Putri Febrianna	Pemuda	Daya Tarik Wisata dan Kenangan
15	Iswara Dhani Widyawati	Pemuda	Daya Tarik Wisata dan Kenangan
16	Suci Winarti	Tokoh Masyarakat	Kemitraan, Usaha dan Pengembangan SDM
17	Titi Nugraheni	Tokoh Masyarakat	Kemitraan, Usaha dan Pengembangan SDM
18	Ninik Setyarini	Tokoh Masyarakat	Kemitraan, Usaha dan Pengembangan SDM
19	Sukirman	Tokoh Masyarakat	Keamanan dan Ketertiban

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Pengelola
20	Haris Panigoro	Pemuda	Keamanan dan Ketertiban
21	Tyas Abimanyu	Pemuda	Promosi dan Dokumentasi
22	Wahyu Setyo Nugroho	Pemuda	Promosi dan Dokumentasi

Sumber: SK Kalurahan Condongcatur 2020

B. Sejarah Kalurahan

Pemerintahan Kalurahan Condongcatur dibentuk pada tahun 1946, tepatnya pada tanggal 26 Desember. Awal diproklamirkannya Pemerintahan Condongcatur adalah berdasarkan Maklumat Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 pada tahun 1948. Sebelum tahun 1946, awal mulanya Kalurahan Condongcatur tersebut terbagi menjadi 4 (empat) Kalurahan, yang terdiri dari:

1. Kalurahan Manukan dipimpin oleh Lurah: Jayeng Sumanto
2. Kalurahan Gorongan dipimpin oleh Lurah: R. Ng (Raden Ngabehi) Hadi Prasodjo
3. Kalurahan Gejayan dipimpin oleh Lurah: Sastro Diharjo
4. Kalurahan Kentungan dipimpin oleh Lurah: Kromoredjo

Kalurahan Condongcatur terletak di wilayah Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, DIY. Nama Kalurahan Condongcatur memiliki arti yang cukup unik, dan berbeda dengan beberapa kalurahan yang ada di wilayah Sleman. Kata “Condong” artinya mengumpul dan “Catur” artinya 4 (empat). Jadi, arti “Condongcatur” adalah mengumpulkan 4 Kalurahan dan menjadi satu, sesuai dengan Maklumat Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 pada tahun 1946. Kalurahan Condongcatur meliputi 18 Padukuhan yang tergabung dari 64 RW dan 211 RT.

Kalurahan Condongcatur mempunyai letak geografis yang cukup strategis, dan juga dilintasi oleh jalan arteri (Jalan Ring road Utara), yang berfungsi sebagai prasarana transportasi dan menjadi jalur umum, sehingga dapat menunjang perkembangan perekonomian di kawasan Kalurahan Condongcatur serta kawasan Sleman pada umumnya. Selain itu, Kalurahan Condongcatur juga mempunyai batas wilayah, sebagai berikut:

1. Sebelah Barat berbatasan dengan Kalurahan Sinduadi dan Kapanewon Mlati.
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kalurahan Maguwoharjo, Kapanewon Depok.
3. Sebelah Utara berbatasan dengan Kalurahan Minomartani, Kapanewon Ngaglik.
4. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kalurahan Caturtunggal, Kapanewon Depok.

C. Visi dan Misi Pemerintah Kalurahan Condongcatur

1. Visi Pemerintah Kalurahan Condongcatur

Terwujudnya Kalurahan Condongcatur yang Lebih Maju, Bermartabat, Transparan dan Pelayanan Prima bagi seluruh lapisan masyarakat.

2. Misi Pemerintah Kalurahan Condongcatur

1) Memperkokoh bangunan birokrasi yang berkualitas untuk pelayanan masyarakat dan mengembangkan sistem layanan berbasis IT	8) Optimalisasi Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan (PKK, Karang Taruna, RT/RW, LPMK, Posyandu)
--	--

2) Mempertahankan Kesejahteraan dan Kinerja Pamong Kalurahan beserta Staf Kalurahan melalui peningkatan kapasitas, budaya kerja dan kedisiplinan. 3) Mempertahankan Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kalurahan 4) Optimalisasi penyampaian informasi melalui media sosial yang mudah dijangkau masyarakat (transparansi) 5) Mewujudkan masyarakat yang sehat dengan mengoptimalkan klinik Kalurahan / Polindes dan mendorong partisipasi masyarakat melalui pemberdayaan kader kesehatan serta menjalin mitra dengan swasta 6) Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan pengentasan kemiskinan. 7) Mendorong peran perempuan di masyarakat dalam rangka realisasi Pengarusutamaan Gender (PUG)	9) Pengembangan Kampung KB, Ramah Anak, RTH dan Padukuhan Bersinar 10) Pemberian ruang dan fasilitas bagi disabilitas 11) Meningkatkan dan Mempertahankan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, empati, efisien dan bertanggung jawab 12) Optimalisasi keamanan lingkungan melalui Linmas dan Kelompok Jaga Warga 13) Merealisasikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) 14) Penyampaian Bantuan Pembangunan kepada 64 RW di 18 Padukuhan sebesar Rp.40.000.000 per tahun 15) Menjalin Kerja sama dengan instansi terkait untuk memberikan pelayanan prima. 16) Menanamkan nilai religius dan kearifan lokal melalui program pengembangan Spiritual dan adat istiadat secara mandiri
--	---

Sumber: Profil Kalurahan Condongcatur Tahun 2024

D. Struktur Organisasi

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan merupakan wujud penyelenggaraan pemerintahan asli dan terdepan di

Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan memadukan kearifan lokal yang berakar kuat sebagai bagian dari kekhasan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Untuk mewujudkan Kalurahan yang mandiri, berbudaya, rukun, tangguh, demokratis, maju, dan sejahtera, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur tentang pedoman penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2017 tentang Kelembagaan Pemerintahan Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta telah berupaya memberikan berbagai keuntungan penggunaan sebutan dan sebutan pemerintahan asli pada lembaga kabupaten, kota, dan desa yang melaksanakan tugas yang berkaitan dengan urusan keistimewaan

Nilai-nilai kearifan lokal yang menjadi ciri khas dalam penamaan desa di Daerah Istimewa Yogyakarta yang membedakannya dari desa-desa lain di Indonesia. Hal ini tersirat dalam prinsip-prinsip yang tercantum dalam Undang-Undang Desa, seperti prinsip Pengakuan dan Subsidiaritas. Posisi desa dalam hal pemberian wewenang terkait hak asal usul dan nilai-nilai adat yang diatur dalam undang-undang. Desa memiliki kewenangan untuk mengurus pemerintahannya sendiri, dan negara mengakui kewenangan tersebut.

Dalam struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Daerah Condongcatur, Kepala Desa (Lurah) dibantu oleh Sekretaris Desa (Carik) serta beberapa Perangkat Daerah lainnya, seperti Kepala Seksi Pemerintahan (Jagabaya), Kepala Seksi Kesejahteraan (Ulu-Ulu), Kasi Pelayanan (Kamituwo), Kaur TU dan Umum (Tatalaksana), Kepala Urusan Keuangan (Danarta), Kepala Urusan Perencanaan (Pangripta),

dan Kepala Dusun (Dukuh). Struktur ini membantu dalam mengatur tugas dan wewenang di Pemerintah Kalurahan Condongcatur.

Tabel 3.2 Daftar Pamong Kalurahan

No	Nama	Jabatan
1.	Reno Candra Sangaji,S.IP., M.IP.	Lurah
2.	Riska Dian Nur Lestari, S.Tp., M.Sc.	Carik
3.	Rusmanto Wagiman, SH	Jagabaya
4.	Murgiyanta, S.E.	Ulu-ulu
5.	Al Thaufik Sofisalam, Amd	Kamituwo
6.	Fernandya Riski Hartantri, S.T	Kaur Tata Laksana
7.	Eko Karyanto, SE	Kaur Danarta
8.	Wahyu Nurendra	Kaur Pangripta
9.	Suratman	Dukuh Tiyanan
10.	Beti Kartiningrum, ST. MT., M.I.P	Dukuh Manukan
11.	Irfani Reza Pahlevi, S.Pd, M.Pd.	Dukuh Pondok
12.	Suparman	Dukuh Sanggrahan
13.	Ari Susanti, S.T., M.I.P	Dukuh Gempol
14.	Ribut Suparman, Amd	Dukuh Dero
15.	Muji Purwanta, A.Md.	Dukuh Ngringin
16.	Drs. Mujiyono	Dukuh Ngropoh
17.	H. Ahmad Sunarya	Dukuh Dabag
18.	H. Nuryanto, S.Pd., M.I.P.	Dukuh Gejayan
19.	Widiyatmoko	Dukuh Kaliwaru
20.	Shalahudin Kamal, S.Pd.	Dukuh Soropadan
21.	Sahid Fahrudin	Dukuh Pringwulung
22.	Purwanto	Dukuh Kayen
23.	Suhartini	Dukuh Kentungan
24.	Tri Setiawan, S.Hum	Dukuh Pikgondang
25.	Supriyono Atmojo	Dukuh Gandok
26.	Retnaningsih, A.Md.	Dukuh Joho
27.	Surono	Staf. Jogoboyo
28.	H.A. Trisusetyanto, S.IP.	Staf. Jogoboyo
29.	Hery Supriyono	Staf. Jogoboyo
30.	Rudi Antariksawan	Staf Jogoboyo

No	Nama	Jabatan
31.	Wanda Wira Sahputra, SE	Staf Ulu-ulu
32.	Heri Sunanta	Staf Ulu-ulu
33.	Candra Widianoro, A.Md	Staf Kamituwo
34.	Nur Amalina Dwi Astuti, S.Si	Staf Kamituwo
35.	Amalia Diah Ayu Kiranti, ST	Staf Urusan. Tatalaksana
36.	Sudarna, B.A.	Staf Urusan. Tatalaksana
37.	Marsana	Staf Urusan. Tatalaksana
38.	Nefdia Erlina	Staf Urusan. Tatalaksana
39.	Ririn Ardiana A.Md. AK	Staf Urusan. Tatalaksana
40.	Tri Sugiyatno	Staf Urusan. Tatalaksana
41.	Erna Setyaningsih Hardani, SPd	Staf Urusan Danarta
42.	Eko Kadaryanto, S.E.	Staf Urusan Danarta
43.	Apri Nugroho, S.I.P.	Staf Urusan Pangripto
44.	Wasana, S.H.	Staf Carik
45.	Felicita Erma Gista	Staf Ulu-ulu

Sumber: Profil Kalurahan Condongcatur Tahun 2024

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa sebagian besar Pamong Kalurahan Condongcatur memiliki gelar sarjana dengan spesialisasi bidang yang beragam. Hal ini diharapkan dapat mendukung pelaksanaan fungsi manajerial dengan baik. Pendidikan yang dimiliki oleh pamong rata-rata minimal S1, bahkan ada yang mencapai jenjang S2. Dengan pendidikan yang memadai, diharapkan dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi Pembinaan Kalurahan dengan baik.

E. Tugas Pokok dan Fungsi

Struktur organisasi pemerintahan desa di Daerah Istimewa Yogyakarta mengikuti pedoman yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati Sleman Nomor 2.9 Tahun 2020 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa sebagaimana diatur dalam Pasal 2. (1) Pemerintah desa terdiri atas Kepala Desa dan Perangkat Desa. (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Sekretariat yang terdiri atas 3 (tiga) bagian; b. Pelaksana Teknis yang terdiri atas 3 (tiga) bagian; dan c. Pelaksana Daerah yaitu dusun. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa diatur dengan Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal jenjang pendidikan rata-rata, Pamong Kalurahan Condongcatur memiliki perangkat/pamong yang telah menyelesaikan pendidikan hingga jenjang sarjana. Secara keseluruhan, hampir semua perangkat/petugas, mulai dari Kasi, Kaur, hingga staf Administrasi Condongcatur, memiliki latar belakang pendidikan sarjana. Hal ini tentu berdampak pada pelaksanaan tugas dan tanggung jawab mereka. Melalui pelatihan dan berbagai kegiatan lainnya, diharapkan dapat meningkatkan kualitas tata pemerintahan di daerah.

Penempatan pamong di Kalurahan Condongcatur melibatkan berbagai lembaga akademis dalam proses penjurangan pamong melalui tahapan rekrutmen. Keluhan umum dari Kalurahan lain terkait penempatan pamong yang tidak sesuai dengan kompetensinya. Oleh karena itu, pemerintah Kalurahan berupaya melibatkan lembaga tersebut sebagai pelaksana teknis untuk memastikan pamong memiliki kompetensi yang sesuai.

F. Kondisi Demografi

1. Jumlah Penduduk Menurut Umur

Penduduk adalah bagian penting dari suatu wilayah yang memiliki pemerintahan, jadi sangat penting untuk memperhatikan pentingnya penduduk. Jika suatu wilayah memiliki warganya sendiri, pemerintahannya akan diakui. Orang-orang di dalam suatu pemerintahan pasti bukan hanya objek; mereka juga subjek. Oleh karena itu, untuk mengetahui potensi sumber daya manusia (SDM) di Kalurahan Condongcatur, dibutuhkan klasifikasi penduduk berdasarkan umur.

Tabel 3. 3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur

No	Kelompok	Jumlah	Laki-laki	Perempuan
1	Dibawah 1 Tahun	4	1	3
2	2 s/d 4 Tahun	12	8	4
3	5 s/d 9 Tahun	3071	1555	1515
4	10 s/d 14 Tah	3674	1867	1796
5	15 s/d 19 Tahun	3870	2014	1838
6	20 s/d 24 Tahun	4067	2117	1929
7	25 s/d 29 Tahun	3939	2041	1876
8	30 s/d 34 Tahun	3837	1859	1943
9	35 s/d 39 Tahun	4423	2253	2153
10	40 s/d 44 Tahun	5538	2982	2529
11	45 s/d 49 Tahun	4777	2637	2120
12	50 s/d 54 Tahun	4187	2289	1882
13	55 s/d 59 Tahun	3784	2068	1703

No	Kelompok	Jumlah	Laki-laki	Perempuan
14	60 s/d 64 Tahun	3054	1585	1451
15	65 s/d 69 Tahun	2672	1362	1301
16	70 s/d 74 Tahun	2134	1187	938
17	Diatas 75 Tahun	4171	2154	2004
TOTAL		57375	29788	26815

Sumber: Profil Kalurahan Condongcatur Tahun 2024

Data distribusi penduduk berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin menunjukkan bahwa total jumlah penduduk adalah 57.375 jiwa, yang terdiri dari 29.788 jiwa laki-laki dan 26.815 jiwa perempuan. Dari data ini tampak bahwa jumlah laki-laki lebih banyak dibandingkan perempuan, dengan selisih sebanyak 2.973 jiwa.

Jika dilihat berdasarkan kelompok umur, mayoritas penduduk berada dalam rentang usia produktif, yaitu usia 15 hingga 64 tahun. Kelompok ini mencakup total 36.401 jiwa, atau sekitar 63,46% dari total populasi. Ini menunjukkan bahwa wilayah tersebut memiliki potensi tenaga kerja yang besar, yang dapat menjadi modal penting dalam mendukung pembangunan ekonomi dan sosial masyarakat.

Sementara itu, penduduk usia 0 hingga 14 tahun, yang tergolong sebagai kelompok usia muda, berjumlah 6.761 jiwa atau sekitar 11,78%. Angka ini mencerminkan adanya kebutuhan yang cukup besar terhadap layanan dasar seperti pendidikan anak, kesehatan ibu dan anak, serta infrastruktur pendukung untuk perkembangan usia dini.

Di sisi lain, kelompok usia lanjut (65 tahun ke atas) mencakup 8.977 jiwa atau sekitar 15,65% dari total populasi. Angka ini menunjukkan bahwa terdapat jumlah lansia yang cukup signifikan, yang membutuhkan perhatian lebih dalam hal pelayanan kesehatan, jaminan sosial, dan kesejahteraan lanjut usia.

Dari sisi jenis kelamin, jumlah laki-laki lebih tinggi pada hampir semua kelompok umur, termasuk kelompok usia muda dan usia produktif. Namun, mulai dari usia 30–34 tahun, terjadi kecenderungan perimbangan antara jumlah laki-laki dan perempuan, bahkan pada kelompok 65–69 tahun jumlahnya hampir sama. Meskipun secara umum, di beberapa wilayah perempuan lebih dominan di usia tua karena harapan hidup yang lebih panjang, dalam data ini laki-laki tetap mendominasi hingga kelompok usia 75 tahun ke atas.

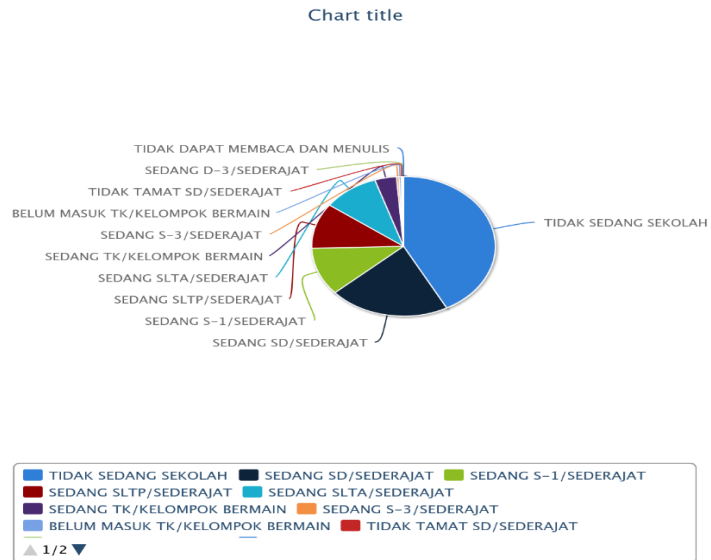
2. Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan

Pendidikan adalah satu hal yang paling penting dalam kehidupan seseorang, dan juga dalam kehidupan bermasyarakat, karena pendidikan memiliki konsep tersendiri untuk menentukan keahlian dan keterampilan seseorang. Pendidikan dapat menentukan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), pendidikan bukan lagi suatu hal yang baru, karena pendidikan pada umumnya merupakan tolak ukur dari kualitas seseorang. Dalam kehidupan bermasyarakat pendidikan penting, dikarenakan pendidikan merupakan suatu proses pembelajaran dalam kehidupan guna untuk meningkatkan pengetahuan dalam berpikir, dan dapat menentukan tindakan seseorang dalam bermasyarakat. Pendidikan juga merupakan salah satu yang dapat mempengaruhi bagaimana keterlibatan seseorang di

dalam pemerintahan, adapun seseorang yang berpendidikan tidak dapat terlibat langsung dalam ranah pemerintahan. Namun pendidikan juga berguna untuk menciptakan cara berpikir kritis individu maupun kelompok. Selain itu, pendidikan berguna untuk melakukan transformasi rakyat menjadi warga negara yang memiliki tanggung jawab sosial. Pendidikan merupakan hal sangat penting untuk menopang demokratisasi. Sebab tidak ada demokrasi yang murni tanpa publik yang berwawasan luas.

Cara berpikir kritis dan berwawasan yang luas dapat menjadi modal berharga untuk menimbang segala usulan yang disampaikan dalam musyawarah desa maupun musyawarah dusun/dukuh. Dengan berpikir kritis dan mempunyai wawasan yang luas, masyarakat dapat melihat secara jernih apakah sebuah usulan merupakan kebutuhan yang mendesak untuk dipenuhi atau masih bisa ditunda pemenuhannya. Dengan kalimat lain, cara berpikir kritis dan berwawasan yang luas merupakan basis untuk menentukan program-program prioritas. Sebab itu, sangat perlu untuk mengklasifikasikan penduduk berdasarkan tingkat pendidikan guna untuk melihat potensi masyarakat yang di Kalurahan Condongcatur.

Gambar 3. 2 Chart Jumlah Penduduk



Sumber: Profil Kalurahan Condongcatur tahun 2024

Tabel 3. 4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan

No	Kelompok	Jumlah	Laki-Laki	Perempuan
1	SLTA / Sederajat	1080	620	460
2	Diploma IV/ Strata I	424	220	204
3	SLTP/Sederajat	312	157	155
4	Tamat SD / Sederajat	307	144	163
5	Tidak / Belum Sekolah	145	88	57
6	Belum Tamat Sd/Sederajat	127	74	53

No	Kelompok	Jumlah	Laki-Laki	Perempuan
7	Akademi/ Diploma Iii/S. Muda	84	40	44
8	Strata II	44	25	19
9	Diploma I / II	16	10	6
10	Strata III	8	6	2
TOTAL		57375	29788	26815

Sumber: Profil Kalurahan Condongcatur Tahun 2024

Data yang disajikan menunjukkan sebaran tingkat pendidikan penduduk dengan total populasi sebanyak 57.375 jiwa, yang terdiri dari 29.788 laki-laki dan 26.815 perempuan. Tingkat pendidikan penduduk bervariasi dari yang belum sekolah hingga jenjang pendidikan tinggi seperti Strata III (S3).

Sebagian besar penduduk tercatat menempuh pendidikan hingga jenjang SLTA/ sederajat, yaitu sebanyak 1.080 orang, terdiri dari 620 laki-laki dan 460 perempuan. Ini menunjukkan bahwa pendidikan menengah atas menjadi jenjang pendidikan yang paling umum ditempuh masyarakat. Disusul oleh penduduk yang menyelesaikan pendidikan di tingkat Diploma IV atau Strata I (S1) sebanyak 424 orang (220 laki-laki dan 204 perempuan), dan tingkat SLTP/ sederajat sebanyak 312 orang (157 laki-laki dan 155 perempuan).

Sementara itu, penduduk yang hanya menyelesaikan pendidikan dasar (SD/ sederajat) berjumlah 307 orang, dengan komposisi 144 laki-laki dan 163 perempuan. Selain itu, terdapat pula

127 orang yang belum tamat SD dan 145 orang yang tidak atau belum pernah bersekolah sama sekali. Hal ini mengindikasikan bahwa masih terdapat tantangan dalam memastikan akses pendidikan dasar yang menyeluruh, terutama di kalangan masyarakat usia tua atau yang tinggal di wilayah dengan keterbatasan akses pendidikan.

Untuk jenjang pendidikan tinggi lainnya, tercatat 84 orang menyelesaikan pendidikan Akademi/Diploma III/Sarjana Muda, serta 44 orang menyelesaikan pendidikan Strata II (S2) dan hanya 8 orang yang menamatkan Strata III (S3). Jumlah ini menunjukkan bahwa meskipun sebagian masyarakat telah menempuh pendidikan tinggi, namun masih dalam jumlah yang sangat terbatas dibandingkan total penduduk.

Dari sisi gender, tidak terdapat kesenjangan yang terlalu mencolok antara laki-laki dan perempuan dalam sebagian besar jenjang pendidikan. Namun, pada jenjang pendidikan menengah dan tinggi, laki-laki sedikit lebih dominan dalam hal capaian pendidikan dibandingkan perempuan.

Data di atas menggambarkan bahwa mayoritas penduduk telah memperoleh pendidikan dasar dan menengah, namun angka partisipasi pendidikan tinggi masih perlu ditingkatkan. Selain itu, adanya kelompok penduduk yang belum atau tidak pernah sekolah menjadi catatan penting bagi pemerintah dan pemangku kebijakan untuk terus mendorong pemerataan akses pendidikan yang inklusif dan berkeadilan.

G. Gambaran Program Inklusif Kalurahan Condongcatur

Sejak tahun 2022 Pemerintah Kalurahan Condongcatur membuat inovasi terbaru yang berbeda dengan kalurahan yang lain yang ada di Kapanewon Depok, program ini namanya SULAPAN (Studi Lanjut Pamong Kalurahan). Kalurahan Condongcatur memberikan bantuan pendidikan bagi pamong beserta stafnya, dengan jumlah yang cukup bervariasi sesuai dengan tingkat pendidikan yang akan ditempuh. Mahasiswa D3 mendapatkan 2 juta rupiah, mahasiswa S1 mendapatkan 3 juta rupiah, mahasiswa S2 mendapatkan 5 juta rupiah, dan mahasiswa S3 10 juta rupiah. Pemerintah Kalurahan Condongcatur sangat memprioritaskan pengetahuan untuk para pamong dan stafnya, karena pendidikan itu sangat penting bagi keberlangsungan Pemerintahan Condongcatur. Rata-rata pamong dan staf kalurahan melanjutkan studinya di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta. Kampus ini pembahasannya lebih fokus pada desa dan daerah, sehingga sangat sinkron sekali bagi para pamong dan staf desa lanjut studi disitu.

Selain itu, pada 14 September 2023 Pemerintah Kalurahan Condongcatur juga telah melakukan penandatanganan Memorandum Of Agreement (MoA) dengan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD”. Dengan tujuan untuk peningkatan dan pengembangan potensi sumber daya kalurahan melalui kerjasama di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Kampus APMD merupakan kampus yang pembahasannya lebih fokus pada desa dan daerah, sehingga sangat sinkron sekali bagi para pamong dan staf desa lanjut studi disitu.

Selasa Melayani Semua, Mudah dan Terpadu (SEMANIS MADU) merupakan program donor darah rutin sesuai dengan jadwal triwulan Kalurahan Condongcatur, kegiatan ini bertempat di ruang Wacana Loka di kalurahan Condongcatur. Kegiatan ini bertujuan menjadikan donor darah sebagai gaya hidup sehat dan wahana membantu sesama. Pemerintah kalurahan Condongcatur juga rutin melaksanakan kegiatan Pos Binaan Terpadu (POSBINDU) bagi Pamong dan Staf Kalurahan dalam rangka monitoring kesehatan dan deteksi dini faktor risiko penyakit tidak menular (PTM) terintegrasi.

Pembangunan Terpadu Pembangunan Merata (BATU BATA KALI) merupakan program pembangunan yang berbasis RW. Pemerintah Kalurahan Condongcatur memberikan bantuan dana setiap tahun Rp. 40.000.000 kepada 64 RW yang tersebar di 18 Padukuhan. Program berbasis RW ini telah melalui Perencanaan musyawarah setiap Padukuhan. Kalurahan Condongcatur adalah satu-satunya kalurahan yang membuat program seperti ini. Dengan adanya program berbasis RW ini tentu akan membuka peluang besar akan kesejahteraan masyarakat Condongcatur.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Informan

Subjek penelitian atau informan yang diambil dalam penelitian ini adalah narasumber yang dinilai paham dan bergerak langsung dalam pembentukan wisata Green Kayen. Informasi yang diterima berupa data primer melalui hasil wawancara tentang *agenda setting* dalam pembentukan wisata Green Kayen di Kalurahan Condongcatur. Data primer yaitu hasil wawancara yang telah dikumpulkan, kemudian disajikan ke dalam bentuk paparan dan penjelasan:

1. Dadang, selaku Ketua Pokdarwis Green Kayen. Sebagai Ketua Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Green Kayen, Dadang memiliki peran strategis dalam mengarahkan visi dan misi pengelolaan wisata. Pemilihan beliau sebagai narasumber didasarkan pada kepemimpinannya yang langsung bersinggungan dengan dinamika internal organisasi, strategi pengembangan destinasi, serta proses kolaborasi lintas sektor. Pengalamannya menjadi garda terdepan dalam membangun partisipasi masyarakat menjadikan pandangannya penting untuk memahami praktik pengelolaan wisata dari tingkat akar rumput.
2. Rahmat selaku Sekretaris Pokdarwis Green Kayen. Rahmat dipilih karena keterlibatannya sebagai sekretaris dalam

Pokdarwis, yang mewakili suara pelaksana teknis dan administrasi di lapangan. Perspektif Rahmat memberikan gambaran konkret tentang kerja kolektif dalam pengelolaan fasilitas, pelayanan wisata, dan interaksi dengan pengunjung. Kesaksiannya memperkaya sudut pandang tentang realitas keseharian anggota Pokdarwis yang tidak selalu terekam dalam dokumen formal.

3. Jindarto selaku Pengurus Pokdarwis Green Kayen. Jindarto memiliki latar belakang pengalaman dalam bidang sosial kemasyarakatan dan menjadi bagian dari pengurus inti Pokdarwis. Ia dipilih karena mampu mengelaborasi hubungan antara struktur organisasi Pokdarwis dan pola komunikasi dengan masyarakat serta pemerintah.
4. Taufik Yosi selaku Pengurus Pokdarwis Green Kayen. Taufik Yosi dihadirkan sebagai narasumber karena keterlibatannya dalam pengelolaan Desa Wisata Green Kayen. Sebagai salah satu anggota Pokdarwis tentu mempunyai peran penting juga dalam interaksi dengan masyarakat sekitar maupun dengan pengunjung.
5. Ari Wibowo selaku Warga Padukuhan Kayen. Sebagai warga lokal, Ari Wibowo dipilih untuk merepresentasikan pandangan masyarakat terhadap pengembangan Green Kayen. Pertimbangan akademis dalam memilihnya terletak pada keterlibatannya sebagai saksi langsung perubahan sosial dan ekonomi di lingkungan sekitar destinasi.

6. Rahawa Hamim selaku Warga Padukuhan Kayen. Rahawa Hamim adalah tokoh masyarakat yang turut aktif dalam kegiatan lingkungan dan sosial. Ia dipilih karena representatif dalam menyuarakan dinamika kehidupan warga, harapan terhadap wisata, serta respons masyarakat terhadap aktivitas pariwisata. Suaranya merepresentasikan aspek afektif dan sosial budaya yang menjadi dasar partisipasi warga dalam mendukung atau mengkritisi pembangunan wisata Green Kayen.
7. Reno Candra Sangaji selaku Lurah Kalurahan Condongcatut. Sebagai kepala wilayah, Lurah memiliki kewenangan formal dalam kebijakan dan arah pembangunan Kalurahan, termasuk sektor pariwisata. Ia merupakan narasumber kunci karena perannya dalam merumuskan kebijakan, memfasilitasi sinergi antara masyarakat, swasta, dan instansi terkait. Pemilihannya dilandasi atas kapasitas strategis dan legitimasi struktural yang ia miliki.
8. Riska Dian Nur Lestari selaku Carik Kalurahan Condongcatut. Riska dipilih karena posisinya sebagai Carik (Sekretaris Kalurahan) yang mendukung administrasi dan koordinasi program pembangunan. Ia menjadi narasumber penting untuk menelusuri aspek birokrasi, pengelolaan data, serta perencanaan kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan wisata. Wawasannya melengkapi perspektif teknokratis dalam proses tata kelola Kalurahan.

9. Murgiyanto selaku Ulu-ulu Kalurahan Condongcatur. Sebagai Ulu-ulu yang bertanggung jawab dalam urusan sumber daya alam dan irigasi, Murgiyanto memiliki pemahaman mendalam mengenai tata kelola lingkungan. Ia dipilih karena Green Kayen terletak di area sempadan sungai yang memerlukan perlindungan ekologis. Penjelasannya penting dalam mengaitkan aspek keberlanjutan lingkungan dengan aktivitas wisata.
10. Febri Aji Saputro selaku Pengurus Bumkal Nyawiji. Febri Aji diundang sebagai narasumber karena posisinya dalam Badan Usaha Milik Kalurahan (Bumkal) Nyawiji yang memiliki potensi mendukung pembiayaan dan pengelolaan wisata. Pemilihan ini didasarkan pada upaya membangun konektivitas antara sektor ekonomi desa dengan sektor pariwisata. Pandangannya memberi penekanan pada aspek kelembagaan dan pemberdayaan ekonomi lokal.
11. Muhammad Irfan selaku Sekretaris Bumkal Nyawiji. Sebagai sekretaris, Irfan memberikan informasi terkait tata kelola administratif, rencana bisnis, dan kolaborasi antara Bumkal dengan Pokdarwis. Ia dihadirkan untuk menggambarkan keterlibatan struktur ekonomi lokal dalam mendukung keberlanjutan wisata dan bagaimana kebijakan investasi disusun dari tingkat desa.
12. Arif Budi Sasongko selaku Ketua Karang Taruna Padukuhan Kayen. Arif dipilih karena keterwakilannya sebagai pemuda yang menjadi motor penggerak kegiatan sosial dan ekonomi.

Sebagai Ketua Karang Taruna, ia menjembatani partisipasi generasi muda dalam mengembangkan wisata. Pertimbangannya sebagai narasumber adalah untuk menyoroti potensi regenerasi dan inovasi dalam membangun wisata yang adaptif dan inklusif.

B. Aliran Masalah Destinasi Wisata Green Kayen

1. Analisis Situasi Lingkungan

Suatu destinasi wisata tentu harus mempunyai daya tarik (ikon) yang cukup menarik perhatian orang sehingga menarik untuk dikunjungi. Selain daya tarik, kondisi pengelolaan lingkungan juga perlu untuk diperhatikan dengan baik, seperti sampah, keteraturan dalam parkir dan lain sebagainya. Dengan kondisi lingkungan yang baik tentu dapat meningkatkan eksistensi destinasi wisata. Tidak kalah penting di tempat wisata adalah infrastruktur yang cukup memadai, seperti akses jalan, kamar mandi/toilet, tempat parkir dan lain sebagainya. Dengan adanya infrastruktur yang memadai tentu dapat menopang keberlangsungan tempat wisata tersebut. Apabila semuanya memadai, maka perkembangan pariwisata tentu akan meningkat baik. Orang-orang akan sering berkunjung karena merasa nyaman ketika berada di tempat wisata tersebut.

Berdasarkan hasil observasi di lapangan, destinasi wisata Green Kayen memiliki daya tarik yang khas dan membedakannya dari destinasi lainnya pada umumnya, yakni keberadaan Grojokan atau air terjun kecil yang terbentuk secara alami. Grojokan ini tidak hanya menjadi elemen visual yang mempercantik lanskap

kawasan, tetapi juga menyimpan nilai ekologi dan budaya yang melekat kuat pada masyarakat setempat. Suara gemericik air yang mengalir dari sela-sela bebatuan, ditambah dengan vegetasi hijau yang tumbuh alami di sekitarnya, menciptakan suasana yang tenang dan memberi kesan damai bagi para pengunjung. Tidak sedikit masyarakat sekitar maupun wisatawan lokal yang menjadikan area Grojokan sebagai titik refleksi, tempat berkumpul, hingga spot fotografi yang ikonik.

Lebih dari sekedar keindahan alam, Grojokan juga menjadi simbol keterhubungan antara manusia dan lingkungan di Green Kayen. Masyarakat setempat tidak hanya menjaga keberlanjutan kawasan ini secara fisik, namun juga menyematkan nilai-nilai kearifan lokal dalam pengelolaannya.

Gambar 4. 1 Grojokan Green Kayen



Sumber: Kompos.Com Jernih Melihat Dunia

Dalam wawancara bersama Dadang selaku Ketua Pokdarwis wisata Green Kayen, menyampaikan bahwa,

“Daya tarik awal dari kawasan ini terletak pada grojokan atau aliran air yang menyerupai air terjun, yang berasal dari jatuhnya air di atas bendungan. Di bagian bawahnya berbentuk semacam kolam, yang dahulu sering dimanfaatkan oleh anak-anak muda untuk mandi dan bermain air.” (Wawancara 5 Agustus 2024)

Daya tarik awal yang memikat perhatian masyarakat terhadap kawasan Green Kayen terletak pada keberadaan grojokan, yaitu aliran air yang jatuh dari atas bendungan dan membentuk visualisasi menyerupai air terjun. Fenomena alam ini memberikan nilai estetika tersendiri yang menjadi pemicu tumbuhnya minat untuk beraktivitas di lokasi tersebut, terutama oleh kalangan anak muda. Dalam konteks pengelolaan wisata berbasis alam, elemen visual seperti air terjun atau kolam alami memiliki daya tarik yang kuat karena menyuguhkan nuansa relaksasi, kealamian, dan keunikan.

Keberadaan grojokan yang sering digunakan oleh anak-anak muda untuk mandi juga memperkuat aspek rekreasi dari tempat tersebut. Aktivitas mandi bersama atau sekadar bermain air menunjukkan bahwa lokasi ini menjadi ruang sosial yang hidup, sebelum secara formal diresmikan sebagai destinasi wisata. Hal ini mendukung kedekatan emosional masyarakat terhadap suatu tempat dan menjadi landasan penting bagi terbentuknya nilai guna dan identitas suatu destinasi. Kegiatan informal semacam ini sering kali menjadi cikal bakal pengelolaan wisata berbasis

komunitas karena lahir dari kebutuhan dan kenyamanan warga itu sendiri.

Fenomena Green Kayen juga mencerminkan bagaimana destinasi wisata dapat terbentuk dari kombinasi antara potensi lanskap buatan dan dinamika sosial masyarakat. Kawasan ini berkembang karena kealamian grojokan serta aktivitas lokal yang secara alami menciptakan pengalaman wisata yang otentik. Hal ini sejalan dengan pendekatan *low-impact tourism*, di mana pemanfaatan sumber daya alam dilakukan dengan tetap mempertahankan karakter lokal dan tanpa mengubah struktur ekologis secara signifikan. Oleh karena itu, pengelolaan daya tarik seperti ini perlu diarahkan secara bijak agar tetap mempertahankan keasrian lingkungan dan nilai sosial yang telah terbentuk.

Dalam wawancara bersama Rahmat selaku anggota Pokdarwis menyampaikan bahwa:

“Daya tarik awal kawasan ini sebenarnya terletak pada keberadaan aliran air dan area pemandian di sekitar bendungan. Kami melihat bahwa potensi tersebut cukup menjanjikan sehingga perlu dikembangkan lebih lanjut. Atas dasar itu, kami berinisiatif untuk melakukan gotong royong dalam membersihkan lahan di sekitar bendungan.” (Wawancara 7 Agustus 2024)

Green Kayen memiliki daya tarik utama yang sangat alami, yakni aliran air di bendungan yang mengalir jernih dan tenang. Keberadaan aliran air ini bukan hanya menjadi tempat permandian, tetapi juga menawarkan suasana yang menyegarkan dan menyenangkan bagi pengunjung. Daya tarik semacam ini adalah modal awal yang sangat potensial untuk mengembangkan

kawasan wisata, karena menyentuh langsung pada kebutuhan dasar manusia akan relaksasi dan keindahan alam. Dengan kata lain, kawasan ini sudah memiliki sesuatu yang istimewa sejak awal, jadi tinggal bagaimana kita mengelolanya secara tepat.

Ketika masyarakat menyadari bahwa bendungan ini menyimpan potensi besar untuk menjadi destinasi wisata, ini menjadi titik tolak yang sangat penting. Tidak semua komunitas bisa dengan mudah melihat dan percaya bahwa wilayahnya punya nilai jual. Kesadaran ini merupakan langkah awal dari apa yang dalam kajian pembangunan disebut sebagai *agenda setting*, yaitu saat masyarakat bersama-sama mulai menetapkan apa yang penting untuk diperjuangkan. Dalam hal ini, potensi wisata lokal mulai dianggap penting dan layak dikembangkan.

Yang paling menarik dari proses ini adalah munculnya gerakan gotong royong. Ini bukan sekadar kerja bakti biasa, tapi simbol dari rasa memiliki. Ketika pemuda dan masyarakat turun langsung membersihkan area sekitar bendungan, itu menunjukkan bahwa mereka tidak hanya menonton proses pembangunan, tapi menjadi bagian aktif di dalamnya. Semangat ini mencerminkan kuatnya solidaritas sosial dan kebersamaan warga yang menjadi pondasi utama dalam membangun pariwisata yang tahan lama dan berpihak pada masyarakat.

Gotong royong juga menggambarkan bagaimana masyarakat memanfaatkan kekuatan yang mereka miliki: kepercayaan, jaringan sosial, dan kerja sama. Ini adalah bentuk dari modal sosial, sesuatu yang sering diabaikan dalam pengelolaan wisata yang terlalu fokus pada investasi fisik. Di Green Kayen, yang jadi

kekuatan adalah sumber daya manusianya. Mereka saling membantu, saling mendukung, dan saling memberi kepercayaan bahwa tempat mereka bisa menjadi lebih baik.

Pendekatan yang digunakan di Green Kayen ini jelas berakar pada nilai-nilai lokal. Tidak ada program instan dari luar, tidak ada proyek besar yang tiba-tiba masuk, melainkan tumbuh dari bawah, dari kesadaran warga sendiri. Inilah yang membuat pengelolaan ini berjalan lancar dan berkelanjutan. Ketika masyarakat memulai dan terlibat sejak awal, maka hasilnya pun akan lebih membumi dan tidak mudah ditinggalkan.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Jindarto selaku pengurus Pokdarwis Green Kayen:

“Dahulu, area sekitar grojokan yang menyerupai air terjun sering digunakan anak-anak untuk mandi. Kemudian, komunitas Sungai Boyong yang terdiri dari para pemuda melakukan kegiatan bersih-bersih di lokasi tersebut dan melihat adanya potensi wisata. Potensi ini lalu disampaikan kepada RT dan RW setempat. Awalnya, kondisi sekitar grojokan dipenuhi sampah, namun secara bertahap dibersihkan oleh para pemuda dan warga setempat. Setelah Pemerintah Kalurahan mengetahui adanya potensi tersebut, mereka memberikan dukungan, termasuk hibah pendopo dan penyediaan beberapa sarana prasarana dari Kalurahan maupun Dinas Pariwisata”.
(Wawancara 12 Agustus 2024)

Pengelolaan wisata berbasis komunitas di sekitar grojokan yang menyerupai air terjun ini mencerminkan dinamika partisipasi masyarakat yang tumbuh secara organik. Inisiatif awal berasal dari pengalaman kolektif masyarakat, khususnya anak-anak yang secara turun-temurun menjadikan lokasi tersebut sebagai tempat

bermain air. Aktivitas ini mencerminkan adanya keterikatan emosional dan relasi sosial yang kuat antara masyarakat dengan ruang alam di sekitarnya. Ketika para pemuda yang tergabung dalam komunitas Sungai Boyong mulai melakukan aksi bersih-bersih, hal tersebut menandai momen penting yaitu transformasi ruang dari sekedar tempat bermain menjadi ruang yang memiliki nilai ekologis dan potensi ekonomi.

Langkah komunitas pemuda dalam mengidentifikasi potensi wisata menunjukkan proses *agenda setting* dari bawah ke atas (*bottom-up*). Mereka tidak hanya menjadi pelaku perubahan, tetapi juga agen yang mampu membaca peluang dalam lanskap sosial dan lingkungan sekitarnya. Proses penyampaian gagasan kepada RT dan RW adalah bentuk pengorganisasian yang berbasis struktur sosial lokal yang mencerminkan bahwa komunitas memahami pentingnya legitimasi dan koordinasi dalam struktur pemerintahan paling dasar di tingkat kampung.

Situasi awal kawasan grojokan yang dipenuhi sampah menjadi simbol dari tantangan yang dihadapi oleh banyak kawasan potensial di pedesaan. Namun, upaya kolektif para pemuda dan warga dalam membersihkannya adalah bentuk nyata dari praktik ekologi sosial, di mana alam tidak hanya dijaga karena fungsi ekologisnya, tetapi juga karena ia menjadi bagian dari identitas komunitas. Proses ini bisa dibaca sebagai bentuk partisipasi aktif, bukan hanya dalam pengambilan keputusan, tetapi juga dalam tindakan langsung di lapangan. Di sinilah muncul aspek penting dari keberlanjutan yaitu keterlibatan emosional dan tenaga dari

masyarakat sendiri dalam menjaga dan mengelola ruang hidupnya.

Silfiana & Samsuri, (2019) menyampaikan bahwa keterlibatan pemuda dalam pelestarian lingkungan merupakan aspek penting dalam pembangunan berkelanjutan. Gerakan kewarganegaraan ekologis yang melibatkan generasi muda dapat menjadi jembatan menuju pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Mereka menekankan bahwa partisipasi aktif pemuda dalam gerakan lingkungan memiliki dampak signifikan terhadap keberlanjutan lingkungan.

Keterlibatan Pemerintah Kalurahan juga menandai tahapan penting dalam penguatan kelembagaan. Dukungan berupa hibah pendopo dan penyediaan sarana prasarana menunjukkan bahwa sinergi antara masyarakat dan pemerintah dapat mendorong percepatan pengelolaan potensi lokal. Intervensi pemerintah di tahap ini bisa dilihat sebagai bentuk pengakuan atas kerja komunitas serta komitmen untuk mengintegrasikan potensi lokal dalam kerangka pembangunan wilayah. Dukungan dari Dinas Pariwisata menunjukkan adanya arus komunikasi lintas level pemerintahan, dari komunitas, kalurahan, hingga pemerintah kabupaten atau kota.

Dengan demikian hal ini mencerminkan praktik baik dalam pengelolaan wisata berbasis komunitas yang bertumpu pada partisipasi, gotong royong, dan penguatan kapasitas lokal. Prosesnya tidak instan, melainkan melalui tahapan yang penuh dengan interaksi sosial, negosiasi, serta komitmen jangka panjang dari berbagai pihak. Pengalaman ini tidak hanya menghasilkan

perubahan fisik di kawasan grojokan, tetapi juga membangun rasa kepemilikan, tanggung jawab, dan kebanggaan kolektif.

2. Analisis Kebutuhan Infrastruktur

Pengelolaan infrastruktur merupakan elemen krusial dalam mendukung keberlanjutan dan pertumbuhan ekonomi sektor pariwisata, khususnya pada destinasi wisata alam. Infrastruktur yang memadai tidak hanya meningkatkan kenyamanan dan aksesibilitas bagi wisatawan, tetapi juga berperan sebagai katalisator dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat setempat. Dengan infrastruktur dasar seperti akses jalan, fasilitas sanitasi, penerangan, dan amenitas lainnya menjadi prasyarat utama dalam pengelolaan destinasi wisata alam.

Hadi, (2018) menjelaskan bahwa ketersediaan infrastruktur yang memadai, termasuk jalan penghubung, pelabuhan, dan fasilitas pendukung lainnya, sangat penting untuk meningkatkan daya tarik wisata dan mendukung kegiatan pariwisata yang berkelanjutan. Ketiadaan infrastruktur tersebut dapat menghambat pertumbuhan sektor pariwisata dan membatasi partisipasi masyarakat lokal dalam aktivitas ekonomi terkait pariwisata.

Destinasi wisata alam Green Kayen merupakan destinasi wisata alam yang sedang dalam tahap pengelolaan. Meskipun memiliki potensi alam yang menarik, pengelolaan infrastruktur di kawasan ini masih menghadapi berbagai tantangan. Akses jalan menuju lokasi wisata telah diperbaiki melalui program padat karya dengan pembangunan jalan cor blok sepanjang 154 meter,

namun masih terdapat jalur yang belum dilengkapi dengan papan petunjuk yang memadai, sehingga dapat menyulitkan wisatawan dalam menemukan lokasi.

Gambar 4. 2 Pengecoran Jalan Kayen



Sumber: Dari media Center Sembada Kabupaten Sleman 2024

Gambar di atas merupakan bentuk dukungan dari Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan menunjukkan komitmennya dalam mendukung pembangunan berbasis potensi lokal dengan melanjutkan pengelolaan Desa Wisata Green Kayen di Kalurahan Condongcatur. Melalui program Padat Karya yang dibiayai oleh Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Dana Keistimewaan DIY Tahun Anggaran 2022, masyarakat setempat diberdayakan secara langsung dalam pembangunan infrastruktur akses jalan cor blok Green Kayen.

Pembangunan ini tidak hanya mencerminkan pemanfaatan Dana Keistimewaan untuk meningkatkan infrastruktur desa, tetapi juga menjadi sarana aktualisasi nilai-nilai keistimewaan Yogyakarta seperti gotong royong dan persatuan masyarakat.

Dengan pendekatan partisipatif dan keterlibatan sumber daya lokal, pemerintah mendorong masyarakat untuk menjadi pelaku utama pembangunan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan dan daya beli warga melalui penciptaan lapangan kerja.

Artinya bahwa Green Kayen dapat memanfaatkan kawasan Kali Boyong sebagai destinasi wisata alam, memiliki potensi besar dalam menghadirkan pengalaman wisata yang menggabungkan unsur alam, budaya, dan kearifan lokal. Dukungan pemerintah dalam bentuk infrastruktur dan sarana wisata seperti gazebo dan jalan akses menjadi bagian penting dari upaya mewujudkan kawasan ini sebagai desa wisata mandiri dan berkelanjutan.

Hal ini sejalan dengan pandangan (Hidayat & Dzulkarnain, (2024) yang menjelaskan bahwa dukungan pemerintah penting dalam bentuk kebijakan, regulasi, dan promosi untuk mengatasi keterbatasan infrastruktur di destinasi wisata yang dikelola oleh masyarakat. Artinya bahwa, kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat lokal sangat penting dalam mengembangkan infrastruktur yang mendukung pariwisata berkelanjutan.

Berdasarkan hasil observasi, salah satu fasilitas penunjang yang menjadi bagian penting dari destinasi wisata Green Kayen adalah keberadaan Pendopo. Bangunan ini tidak hanya berfungsi sebagai ruang terbuka untuk berkumpul, tetapi juga merepresentasikan identitas lokal dan nilai-nilai budaya masyarakat sekitar. Pendopo Green Kayen kerap dimanfaatkan untuk berbagai aktivitas, mulai dari forum diskusi warga, pertemuan komunitas, hingga kegiatan seni dan budaya. Secara

arsitektural, pendopo dirancang dengan nuansa tradisional yang menyatu harmonis dengan alam sekitar, menciptakan atmosfer ramah dan inklusif.

Gambar 4. 3 Pendopo Green Kayen



Sumber: Dokumen Peneliti 2025

Gambar di atas merupakan pendopo yang dihibahkan oleh Pemerintah Kalurahan kepada kawasan wisata Green Kayen. Hal ini merupakan bentuk nyata dari komitmen kelembagaan dalam mendorong partisipasi aktif terhadap pembangunan berbasis potensi lokal. Pendopo, sebagai simbol ruang publik dan kultural dalam tradisi Jawa, tidak sekadar berfungsi sebagai bangunan fisik semata, melainkan menjadi ruang kolektif yang memungkinkan terjadinya interaksi sosial, edukasi, hingga aktivitas ekonomi masyarakat. Keputusan ini menunjukkan bahwa pemerintah tingkat lokal mampu berperan sebagai fasilitator, bukan hanya regulator, dalam upaya pengembangan destinasi wisata yang inklusif dan berkelanjutan.

Hibah pendopo ini membuka ruang kolaborasi antar aktor, baik dari kalangan masyarakat, pelaku wisata, maupun pemerintah itu sendiri. Dalam semangat desentralisasi pembangunan, langkah ini patut diapresiasi sebagai model praktik baik yang mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat sekaligus memperkuat identitas lokal dalam wajah destinasi wisata Green Kayen. Pengelolaan pendopo ke depan perlu dirawat dengan pendekatan partisipatif agar ruang ini tetap hidup, tidak hanya secara fisik, tetapi juga secara sosial dan kultural.

Wawancara bersama Dadang selaku Ketua Pokdarwis wisata Green Kayen, menyampaikan bahwa;

“Kalau infrastruktur saat ini alhamdulillah beberapa sudah ada, itu juga berkat partisipasi dari Pemerintah Kalurahan dan Dinas Pariwisata. Sekarang akses jalan dari jalan besar menuju wisata Green Kayen udah bagus, terus yang mengarah langsung ke grojokan juga sudah bagus. Kamar mandi/toilet kita ada dua di dekat pendopo dan samping mushola. Nah yang paling besar itu pendopo sama mushola itu. Pendopo itu dihibahkan oleh Kalurahan, sedangkan mushola dari danaids, dan 3 gazebo dekat grojokan itu juga termasuk fasilitas yang diberikan oleh pemerintah. Namun, kita juga masih membutuhkan tambahan toilet lagi, karena yang 2 itu tidak cukup” (Wawancara 5 Agustus 2024)

Ketersediaan infrastruktur merupakan komponen esensial dalam menunjang kelangsungan dan kenyamanan aktivitas wisata. Di kawasan Green Kayen, perkembangan infrastruktur menunjukkan tren positif berkat sinergi antara Pemerintah Kalurahan, Dinas Pariwisata, dan pengelola lokal. Akses jalan yang kini telah diperbaiki, baik dari jalan utama hingga ke area grojokan, secara langsung meningkatkan keterjangkauan destinasi

oleh wisatawan. Aksesibilitas yang baik tidak hanya mempercepat aliran kunjungan, tetapi juga memperbesar peluang pengelolaan ekonomi lokal melalui kemudahan mobilitas bagi pedagang dan pelaku usaha wisata.

Selain infrastruktur akses, fasilitas pendukung seperti kamar mandi, pendopo, mushola, dan gazebo turut berperan dalam menciptakan kenyamanan dan memperpanjang durasi tinggal pengunjung. Pendopo yang dihibahkan oleh kalurahan berfungsi sebagai ruang serbaguna untuk aktivitas wisata, edukasi, maupun kegiatan komunitas. Sementara mushola yang berasal dari dana keistimewaan (danais) menunjukkan adanya dukungan lintas institusi dalam pengelolaan kawasan ini. Ketiga gazebo di sekitar grojokan juga memberikan nilai tambah, baik dari sisi estetika maupun kenyamanan wisatawan. Keberadaan fasilitas ini mengindikasikan bahwa pembangunan fisik telah diarahkan secara strategis untuk mendukung fungsionalitas kawasan wisata berbasis alam.

Dalam wawancara bersama Rahmat selaku Pokdarwis, menyampaikan bahwa:

“Saat ini, kawasan Green Kayen telah dilengkapi dengan beberapa infrastruktur dasar, seperti gazebo, mushola, pendopo, toilet, serta akses jalan menuju grojokan yang telah dicor. Keberadaan infrastruktur tersebut tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak, terutama Pemerintah Kalurahan dan Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman. Meskipun demikian, kami masih memerlukan penambahan fasilitas, seperti toilet tambahan, gazebo, dan sarana pendukung lainnya yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi wisata di kawasan ini.” (Wawancara 7 Agustus 2024)

Keberadaan infrastruktur dasar di kawasan wisata Green Kayen, seperti gazebo, mushola, pendopo, toilet, serta akses jalan yang sudah dicor menuju grojokan, menunjukkan adanya tahapan awal dalam proses pengelolaan destinasi wisata berbasis masyarakat. Infrastruktur ini tidak hanya menjadi simbol fisik dari pembangunan, tetapi juga mencerminkan keseriusan para pihak dalam menyiapkan kawasan yang layak dan aman bagi wisatawan. Dalam konteks pengelolaan pariwisata, infrastruktur merupakan faktor penting yang mempengaruhi persepsi dan kenyamanan pengunjung, yang pada akhirnya berdampak terhadap kepuasan dan kemungkinan kunjungan ulang.

Namun demikian, adanya kebutuhan tambahan terhadap fasilitas seperti toilet dan gazebo baru menunjukkan bahwa infrastruktur yang ada masih belum mampu memenuhi beban kunjungan wisata secara maksimal, atau belum cukup mendukung kenyamanan wisatawan dalam jangka panjang. Hal ini penting untuk dicermati karena kekurangan fasilitas dasar dapat berdampak negatif terhadap citra destinasi, terutama apabila wisatawan merasa tidak mendapatkan layanan yang layak. Dengan kata lain, keberadaan infrastruktur yang memadai bukan hanya sebagai pelengkap, tetapi menjadi syarat mutlak dalam menunjang daya saing destinasi.

Permintaan atas penambahan fasilitas juga mengindikasikan adanya peningkatan kesadaran masyarakat lokal terhadap pentingnya kualitas layanan wisata. Hal ini perlu diapresiasi sebagai bentuk modal sosial yang penting dalam pembangunan pariwisata yang berkelanjutan. Ketika masyarakat menyuarakan

kebutuhan terhadap peningkatan infrastruktur, itu berarti mereka telah memahami dinamika pasar wisata dan ingin terlibat lebih aktif dalam pengelolaan serta pengelolaan destinasi mereka sendiri. Sikap ini perlu difasilitasi melalui mekanisme partisipatif yang terbuka dan responsif dari pihak pemerintah daerah.

Berdasarkan hasil observasi, destinasi wisata Green Kayen juga dilengkapi dengan fasilitas ibadah berupa mushola yang sederhana namun fungsional. Keberadaan mushola ini mencerminkan kepedulian pengelola wisata terhadap kebutuhan spiritual para pengunjung, khususnya umat Muslim, sehingga mereka tetap dapat menjalankan ibadah di tengah aktivitas rekreasi.

Gambar 4. 4 Mushola Green Kayen



Sumber: Dokumen Peneliti 2025

Keberadaan mushola di kawasan wisata Green Kayen mencerminkan komitmen pengelola dalam menyediakan ruang ibadah yang layak bagi pengunjung, sekaligus bentuk penghargaan terhadap nilai-nilai spiritual masyarakat. Mushola

tidak hanya menjadi fasilitas pelengkap, tetapi juga bagian penting dari infrastruktur wisata yang mendukung kenyamanan dan keseimbangan antara aktivitas rekreasi dan kebutuhan religius. Dalam konteks destinasi wisata berbasis lokal, ini menunjukkan bahwa pembangunan tidak hanya berorientasi pada fisik dan ekonomi, tetapi juga menyentuh aspek batiniah dan kultural.

Mushola di Green Kayen berperan sebagai ruang jeda yang menenangkan, sekaligus memperkuat citra kawasan sebagai destinasi yang ramah dan inklusif. Peran masyarakat dalam merawat kebersihan dan keberlanjutan fungsi mushola memperlihatkan keharmonisan antara pengelola dan warga. Dengan demikian, mushola bukan sekadar bangunan, melainkan simbol bahwa Green Kayen adalah tempat wisata yang tidak melupakan akar nilai dan kebutuhan rohani pengunjungnya, menjadikannya lebih manusiawi dan bermakna.

Dalam wawancara bersama oleh Jindarto selaku pengurus Pokdarwis Green Kayen, menyampaikan bahwa;

“Saat ini, kebutuhan utama adalah pembangunan talud untuk mencegah erosi tanah di belakang pendopo, terutama saat musim hujan karena terdapat aliran sungai kecil yang menyebabkan tanah mudah terkikis”. (Wawancara 12 Agustus 2024)

Kebutuhan akan pembangunan talud di area belakang pendopo mencerminkan kesadaran akan pentingnya mitigasi risiko dalam pengelolaan destinasi wisata berbasis alam. Meskipun pembangunan sarana fisik seperti pendopo telah menjadi langkah maju dalam pengelolaan kawasan, perhatian terhadap aspek lingkungan, khususnya potensi erosi tanah, menunjukkan bahwa

masyarakat dan pengelola telah mulai memikirkan keberlanjutan jangka panjang. Kehadiran aliran sungai kecil yang mengikis tanah saat musim hujan menjadi peringatan alam bahwa ruang wisata ini tak lepas dari ancaman degradasi ekologis bila tidak ditangani dengan tepat.

Pembangunan talud dalam konteks ini bukan hanya proyek infrastruktur teknis, melainkan bentuk kepedulian terhadap keselamatan pengunjung, keamanan fasilitas, dan perlindungan terhadap lanskap ekologis lokal. Ia mencerminkan upaya adaptif komunitas dalam menanggapi tantangan lingkungan yang nyata. Ini sekaligus menunjukkan bahwa pembangunan wisata tidak semata soal estetika dan ekonomi, tetapi juga soal bagaimana masyarakat setempat membangun relasi yang bertanggung jawab dengan alam. Kesadaran ini adalah cerminan dari pemahaman bahwa pariwisata tidak bisa dilepaskan dari dinamika ekosistem tempat ia tumbuh.

Dalam wawancara bersama Taufik Yosi selaku pengurus Pokdarwis menyampaikan bahwa;

“Saat ini, hal yang paling mendesak untuk dibenahi adalah pengamanan yang berkaitan dengan infrastruktur, seperti pemasangan penerangan di sekitar kawasan wisata Green Kayen. Secara umum, kawasan ini belum dapat dikategorikan ramah anak maupun ramah warga karena kondisinya masih menyerupai hutan. Pengamanan yang dimaksud mencakup pemasangan pagar di sepanjang tepi kali dan penerangan di jalan masuk menuju kawasan. Kami juga telah merencanakan pembangunan talud untuk mencegah erosi tanah akibat air hujan. Namun, hingga kini belum ada pembahasan mendalam terkait rencana jangka pendek maupun jangka panjang. Pengelolaan

masih bersifat fleksibel dan mengikuti perkembangan yang ada. Selama ini, pendanaan kami peroleh dari Dana Keistimewaan (Danais), Pemerintah Kalurahan, serta CSR yang berasal dari pelaku usaha lokal, bukan dari BUMN atau pihak luar. Beberapa warga Padukuhan Kayen juga turut berkontribusi secara sukarela. Green Kayen sendiri merupakan inisiatif pemuda setempat, dan terwujud berkat kolaborasi antara masyarakat, karang taruna, Pemerintah Kalurahan, serta dukungan dari Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman. Dalam setiap kegiatan atau acara yang diselenggarakan, kami selalu melakukan musyawarah bersama dengan masyarakat, pemuda, dan Pemerintah Kalurahan.” (Wawancara 6 September 2024)

Rencana untuk menambah penerangan di sekitar area wisata mencerminkan perhatian yang mendalam terhadap keselamatan pengunjung, terutama anak-anak. Ini menunjukkan bahwa pengelola tidak hanya memikirkan aspek estetika, tetapi juga kenyamanan dan keamanan, yang sangat penting untuk menciptakan pengalaman positif bagi keluarga yang berkunjung. Kemudian usulan untuk memagari pinggir kali adalah langkah konkret untuk melindungi pengunjung dari potensi bahaya. Ini menunjukkan bahwa pengelola sangat peduli terhadap keselamatan masyarakat dan pengunjung, menciptakan rasa aman yang sangat dibutuhkan di area yang masih terkesan alami dan liar.

Keterlibatan masyarakat lokal dalam memberikan dukungan finansial dan sumber daya menunjukkan rasa kepemilikan yang kuat terhadap Green Kayen. Ini bukan hanya tentang membangun infrastruktur, tetapi juga tentang membangun komunitas yang saling mendukung dan berkolaborasi untuk menciptakan sesuatu

yang lebih baik. Fakta bahwa inisiatif ini berasal dari pemuda Kayen menunjukkan semangat dan kreativitas generasi muda dalam mengembangkan potensi daerah mereka. Ini adalah contoh inspiratif tentang bagaimana generasi muda dapat berkontribusi secara positif terhadap lingkungan mereka.

Kerjasama antara pemuda, Pemerintah Kalurahan, karang taruna, dan Dinas Pariwisata menciptakan sinergi yang kuat. Ini menunjukkan bahwa ketika berbagai pihak bersatu dengan tujuan yang sama, mereka dapat mencapai hasil yang lebih baik. Musyawarah yang dilakukan sebelum mengadakan acara menunjukkan bahwa keputusan diambil secara kolektif, menghargai pendapat semua pihak. Penggunaan grup WhatsApp sebagai alat koordinasi mencerminkan adaptasi terhadap teknologi modern untuk mempermudah komunikasi. Ini menunjukkan bahwa pengelola sangat menghargai transparansi dan keterlibatan semua pihak dalam proses pengambilan keputusan.

Wawancara bersama Ari Wibowo, selaku masyarakat di Padukuhan Kayen, menyampaikan:

“Saat ini, menurut saya, yang perlu segera dibenahi adalah aspek infrastruktur. Jika fasilitasnya memadai, tentu pengunjung akan merasa lebih nyaman. Selain itu, tempat kuliner juga perlu difasilitasi. Di beberapa tempat wisata, daya tarik tidak hanya terletak pada keindahan alamnya, tetapi juga pada sajian kuliner yang khas. Apabila Green Kayen mampu menghadirkan kuliner yang mencerminkan kekhasan lokal, hal tersebut berpotensi menarik lebih banyak pengunjung. Harapannya, keberadaan Green Kayen dapat memberikan dampak ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat, seperti meningkatkan daya beli dan

pendapatan warga sekitar.” (Wawancara 9 September 2024)

Ketersediaan infrastruktur yang memadai, seperti akses jalan, fasilitas parkir, dan sarana pendukung lainnya akan meningkatkan kenyamanan pengunjung. Infrastruktur yang baik tidak hanya memudahkan akses bagi wisatawan, tetapi juga menjadi faktor penentu dalam meningkatkan jumlah kunjungan. Dengan demikian, perbaikan infrastruktur dapat menjadi langkah awal yang strategis untuk meningkatkan daya saing Green Kayen sebagai destinasi wisata.

Kuliner tidak hanya merupakan kebutuhan dasar bagi wisatawan, tetapi juga menjadi bagian dari pengalaman wisata yang berkesan. Dalam konteks ini, pengelolaan kuliner khas masyarakat sekitar Green Kayen dapat menjadi salah satu strategi untuk membedakan destinasi ini dari tempat wisata lainnya yang di daerah Sleman. Melalui pengelolaan kuliner lokal, tentu tidak hanya meningkatkan daya tarik wisata, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi langsung kepada masyarakat sekitar, seperti peningkatan pendapatan dan kesempatan kerja.

Namun, perlu diperhatikan bahwa pengelolaan wisata ini harus dilakukan dengan prinsip keberlanjutan. Dalam arti, pengelolaan infrastruktur atau tempat kuliner harus sejalan dengan pelestarian lingkungan dan budaya setempat. Dengan demikian, Green Kayen dapat menjadi contoh destinasi wisata yang tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga menjaga kelestarian alam dan budaya lokal.

Dalam wawancara bersama Rahawa Hamim selaku masyarakat di Padukuhan Kayen, menyampaikan bahwa:

“Mungkin yang perlu dibenahi lebih dulu itu kebersihan di belakang pendopo yang arah grojokan tersebut, karena masih kotor dan penuh dengan semak-semak. Kemudian terdapat gundukan-gundukan yang kurang di belakang pendopo. Nah itu juga perlu dirapikan terlebih dahulu biar searah semuanya. Selain itu juga tambah tempat sampah yang cukup, sehingga sampah-sampah plastik di taruh di sana.” (Wawancara 11 Oktober 2024)

Pernyataan tersebut merupakan bentuk perhatian masyarakat terhadap aspek kebersihan dan kerapian lingkungan di kawasan wisata Green Kayen, khususnya pada area pendopo yang mengarah ke grojokan. Kepedulian ini menunjukkan keterlibatan masyarakat lokal dalam menjaga kualitas ruang publik yang tidak hanya menunjang kenyamanan pengunjung, tetapi juga mengandung nilai estetika serta tanggung jawab ekologis. Dalam konteks pengelolaan destinasi wisata berbasis komunitas, kebersihan dan penataan ruang menjadi elemen dasar yang berdampak langsung terhadap citra dan daya tarik kawasan wisata.

Informasi mengenai gundukan tanah di belakang pendopo yang belum diratakan menggambarkan adanya kebutuhan terhadap penataan infrastruktur sederhana yang bersifat fungsional. Keteraturan tata ruang memberi pengaruh terhadap persepsi visual kawasan dan kenyamanan pengunjung. Keberadaan elemen-elemen fisik yang tertata juga menciptakan kesan keterkelolaan yang mencerminkan kapasitas pengelolaan

pihak lokal, baik dari aspek teknis maupun kesadaran terhadap standar ruang publik wisata.

Selain itu, tentang kebutuhan penambahan tempat sampah memperlihatkan ekspektasi masyarakat terhadap keberadaan fasilitas pendukung yang memadai. Ketersediaan tempat sampah berperan sebagai bagian dari sistem kebersihan lingkungan sekaligus sebagai media edukasi bagi pengunjung dalam menjaga kebersihan bersama. Dalam kerangka pembangunan pariwisata yang berkelanjutan, kondisi ini menggambarkan kesiapan kawasan dalam menghadapi peningkatan jumlah kunjungan tanpa mengabaikan aspek kelestarian lingkungan.

3. Analisis Potensi Perkembangan Ekonomi Wisata

Pengelolaan destinasi wisata alam merupakan strategi penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal yang berkelanjutan, khususnya di wilayah pedesaan yang memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah. Zulaika dkk, (2023) menjelaskan bahwa, wisata alam tidak hanya menawarkan keindahan lanskap, tetapi juga berkontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, dan pelestarian lingkungan melalui pendekatan ekowisata.

Namun dalam hal ini potensi pengelolaan ekonomi di destinasi wisata alam Green Kayen masih sangat minim. Meskipun memiliki potensi alam yang menjanjikan, pengelolaan Wisata Green Kayen hingga saat ini belum menunjukkan dampak ekonomi yang signifikan bagi masyarakat sekitar. Lanskap alami yang indah dan suasana yang sejuk memang berhasil menarik

sejumlah wisatawan, namun keberadaan wisata ini belum sepenuhnya terintegrasi dengan mekanisme pemberdayaan ekonomi lokal. Sebagian besar aktivitas wisata masih bersifat pasif, dan belum mampu mendorong terciptanya peluang usaha atau lapangan kerja yang berkelanjutan bagi warga setempat.

Wawancara bersama Dadang selaku Ketua Pokdarwis wisata Green Kayen, menyampaikan bahwa;

“Perkembangan ekonomi dari sektor wisata sejauh ini masih sangat minim, bahkan dapat dikatakan belum ada sama sekali. Saat terjadi pandemi COVID-19, tidak ada kunjungan wisata sehingga tidak ada pemasukan yang diperoleh. Akibatnya, area sekitar grojokan sempat kembali menjadi semak-semak karena jarang dibersihkan. Namun demikian, keberadaan pendopo yang dihibahkan oleh Pemerintah Kalurahan sangat membantu. Pendopo tersebut kerap dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan, seperti pertunjukan jathilan, acara syawalan, hingga kegiatan pra-Pilkada Sleman. Selain itu, pendopo juga sesekali disewa untuk acara-acara kecil masyarakat. Akan tetapi, jika berbicara khusus mengenai aktivitas pariwisata, hingga saat ini belum memberikan dampak ekonomi yang berarti.” (Wawancara 5 Agustus 2024)

Perkembangan ekonomi di kawasan wisata Green Kayen hingga saat ini masih terbilang terbatas. Hal ini sebagian besar dipengaruhi oleh dampak pandemi COVID-19 yang menyebabkan terhentinya aktivitas wisata secara total. Tidak adanya kunjungan selama masa pandemi secara langsung memutus aliran pendapatan dari sektor pariwisata, baik bagi pengelola maupun masyarakat sekitar yang menggantungkan penghasilan dari aktivitas pendukung seperti parkir, makanan, dan jasa lainnya. Kejadian ini menunjukkan kerentanan destinasi

wisata berbasis komunitas terhadap guncangan eksternal, khususnya ketika belum memiliki sistem ketahanan ekonomi yang mapan.

Kondisi pasifnya sektor wisata juga berdampak pada degradasi fisik kawasan, seperti kembalinya area grojokan menjadi semak karena kurangnya perawatan. Ini mencerminkan hubungan erat antara aspek ekonomi dan keberlanjutan lingkungan, di mana stagnasi ekonomi dapat menyebabkan terbengkalainya tata kelola kawasan. Meski demikian, keberadaan pendopo yang dihibahkan oleh kalurahan menjadi penyelamat dalam mempertahankan fungsi ruang publik. Pendopo ini dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan sosial dan budaya seperti jatilan, syawalan, hingga acara pra-pilkada, yang tidak hanya menjaga eksistensi tempat tetapi juga memberi pemasukan alternatif melalui penyewaan ruang.

Namun, secara ekonomi murni dari sektor pariwisata, terutama kunjungan berbasis atraksi alam seperti grojokan, kontribusinya terhadap pendapatan lokal masih belum signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa wisata Green Kayen masih berada dalam fase awal perkembangan, di mana aspek infrastruktur dan kelembagaan telah mulai terbentuk, tetapi belum diikuti dengan optimalisasi ekonomi.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Jindarto selaku pengurus Pokdarwis Green Kayen, menyampaikan bahwa;

“Sejauh ini dampak ekonomi dari wisata Green Kayen masih belum signifikan, karena dalam beberapa tahun terakhir, kawasan pendopo dan grojokan lebih banyak

dimanfaatkan sebagai tempat bersantai oleh para pemuda setempat.” (Wawancara 12 Agustus 2024)

Pernyataan bahwa dampak ekonomi dari wisata Green Kayen masih belum signifikan menunjukkan bahwa pengelolaan pariwisata tidak serta-merta menghadirkan manfaat ekonomi yang instan bagi masyarakat. Meskipun kawasan ini telah mengalami perubahan fisik dan mulai dikenal sebagai ruang publik berbasis alam, pemanfaatannya yang lebih dominan sebagai tempat bersantai oleh pemuda setempat menandakan bahwa fungsi sosial kawasan masih lebih kuat dibanding fungsi ekonominya. Ini adalah hal yang lumrah dalam fase awal pengelolaan destinasi wisata berbasis komunitas, di mana ruang wisata lebih dulu tumbuh sebagai ruang sosial dan rekreasi sebelum berkembang menjadi sumber pendapatan.

Kondisi ini juga mencerminkan bahwa ekosistem wisata yang menopang aktivitas ekonomi belum terbentuk secara utuh. Belum adanya warung, jasa sewa alat, atau kegiatan ekonomi kreatif lokal yang terorganisir bisa menjadi indikator dari keterbatasan kapasitas lokal dalam memanfaatkan potensi ekonomi kawasan. Namun demikian, kehadiran para pemuda yang menggunakan ruang tersebut secara aktif bisa menjadi aset sosial yang sangat penting. Mereka bukan hanya pengguna, tetapi juga calon pengelola dan penggerak ekonomi lokal apabila didorong dan difasilitasi secara tepat. Artinya, meskipun belum menghasilkan dampak ekonomi yang besar, kawasan ini telah memiliki fondasi sosial yang kuat sebagai modal awal pembangunan ekonomi berbasis pariwisata.

Dalam wawancara Lurah Condongcatur Reno Candra Sangaji, menyampaikan bahwa;

“Fokus utama dalam waktu dekat adalah peningkatan kualitas layanan dan daya tarik wisata, termasuk penambahan fasilitas pendukung seperti area parkir, tempat istirahat, dan wahana edukasi lingkungan. Sedangkan rencana jangka panjangnya adalah pengelolaan desa wisata Green Kayen sebagai ikon wisata edukasi di Sleman, dengan target menjadi destinasi unggulan berbasis ekowisata dan budaya”. (Wawancara 13 November 2024)

Ketika berbicara tentang kualitas layanan, sebenarnya berbicara tentang pengalaman manusia. Setiap interaksi antara pengunjung dan staf adalah kesempatan untuk menciptakan kenangan yang positif. Pelatihan staf untuk memberikan layanan yang ramah dan informatif akan membuat pengunjung merasa dihargai dan diakui. Ini bukan hanya tentang memenuhi kebutuhan, tetapi juga tentang menciptakan hubungan yang hangat dan menyenangkan.

Penambahan fasilitas seperti area parkir dan tempat istirahat bukan hanya tentang kenyamanan fisik, tetapi juga tentang menciptakan ruang bagi pengunjung untuk bersantai dan menikmati momen bersama keluarga atau teman. Wahana edukasi lingkungan akan memberikan pengalaman yang mendalam, di mana pengunjung tidak hanya melihat, tetapi juga belajar dan merasakan keterhubungan dengan alam.

Ketika seseorang tiba di suatu destinasi dan mendapati area parkir yang luas, tertata rapi, dan mudah diakses, hal tersebut menciptakan kesan awal yang positif. Kenyamanan ini menjadi

aspek penting, terutama setelah menempuh perjalanan yang panjang. Ketersediaan fasilitas parkir yang memadai tidak hanya memberikan rasa lega bagi pengunjung, tetapi juga menjadi indikator awal dari tata kelola destinasi yang baik serta berkontribusi terhadap pengalaman wisata yang menyenangkan secara keseluruhan. Tempat istirahat yang nyaman bisa menjadi oasis bagi pengunjung. Ini adalah tempat di mana mereka bisa berbagi cerita, tertawa, dan menikmati makanan ringan sambil menikmati pemandangan. Momen-momen kecil ini sering kali menjadi kenangan yang tak terlupakan.

Menjadikan Green Kayen sebagai ikon wisata edukasi adalah langkah yang berani dan visioner. Ini menunjukkan bahwa desa ini tidak hanya ingin menarik pengunjung, tetapi juga ingin memberikan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan. Ini adalah tentang menciptakan warisan yang akan dikenang oleh generasi mendatang. Dengan fokus pada ekowisata dan budaya, Green Kayen berpotensi menjadi tempat di mana pengunjung dapat merasakan keaslian dan kekayaan budaya lokal. Ini adalah kesempatan untuk berbagi cerita, tradisi, dan nilai-nilai yang membuat komunitas ini unik. Pengunjung tidak hanya menjadi penonton, tetapi juga bagian dari pengalaman yang lebih besar.

Dalam wawancara bersama Riska Dian Nur Lestari selaku Carik Kalurahan Condongcatur, menyampaikan bahwa;

“Fokus kita dalam jangka waktu tertentu mungkin yaitu penyuntikan dana dari Kalurahan melalui Bumkal Nyawiji untuk usaha wisata Green Kayen. Namun, untuk jangka panjangnya, harapan kita wisata Green Kayen dapat menarik pasar-pasar yang cukup

besar dan bukan hanya lintas Kalurahan maupun Kapanewon saja”. (Wawancara 8 januari 2025)

Pernyataan mengenai fokus jangka pendek dan jangka panjang pengelolaan wisata Green Kayen mencerminkan adanya visi strategis yang cukup jelas dari para pengelola lokal. Pada tahap awal, penyuntikan dana dari Kalurahan melalui Badan Usaha Milik Kalurahan (Bumkal) Nyawiji menjadi bentuk intervensi fiskal yang penting untuk menggerakkan aktivitas wisata. Pendekatan ini merupakan cerminan dari prinsip *developmental state* di tingkat lokal, di mana negara atau pemerintah desa berperan aktif dalam memfasilitasi pertumbuhan sektor ekonomi potensial seperti pariwisata. Di tahap ini, fungsi pembiayaan publik dianggap krusial untuk mendorong percepatan infrastruktur, promosi, dan kegiatan operasional dasar destinasi wisata.

Namun, ketergantungan pada dana publik tidak dapat berlangsung secara terus-menerus. Oleh karena itu, adanya harapan jangka panjang agar Green Kayen mampu menarik pasar yang lebih luas menjadi langkah logis yang perlu dipersiapkan secara bertahap dan sistematis. Perluasan pasar wisata ke luar wilayah Kalurahan atau Kapanewon menjadi indikator bahwa pengelola sudah mulai berpikir dalam kerangka ekonomi skala yang lebih besar. Ini juga menunjukkan bahwa pembangunan pariwisata tidak hanya dimaknai sebagai aktivitas lokal semata, tetapi sebagai instrumen yang bisa mendatangkan nilai ekonomi lintas batas administratif.

Dalam konteks ini, penting bagi pengelola untuk mulai menyusun strategi pemasaran yang lebih terstruktur. Target pasar yang lebih luas membutuhkan pendekatan promosi yang lebih profesional, termasuk pemanfaatan media digital, kolaborasi dengan agen perjalanan, serta penyusunan paket wisata yang menarik dan kompetitif. Di samping itu, Green Kayen juga perlu mengidentifikasi dan memperkuat keunikan lokal (*local uniqueness*) sebagai daya tarik utama. Keberadaan grojokan, nilai-nilai budaya lokal, serta keterlibatan aktif masyarakat bisa menjadi modal naratif yang kuat untuk membangun citra destinasi yang otentik dan berbeda.

C. Aliran Kebijakan dalam Pengelolaan Wisata Green Kayen

Dalam pengelolaan wisata bukan hanya sekedar dibentuk dan dikelola begitu saja, tapi harus mempertimbangkan berbagai hal yang perlu dieksekusi seperti urgensi, dampak potensi serta kebutuhan bagi masyarakat sekitar area wisata. Prioritas dalam pengelolaan wisata yang berbasis potensi lokal dan pemberdayaan masyarakat harus mempunyai prioritas dalam waktu tertentu baik dalam jangka waktu pendek maupun panjang. Anjani dkk, (2024) menjelaskan bahwa prioritas utama dalam pengelolaan ekowisata adalah peningkatan kualitas objek wisata, peningkatan aksesibilitas, optimalisasi media informasi, serta peningkatan kapasitas dan keterlibatan masyarakat.

Sebagai prioritas dalam pengelolaan wisata Budiasa dkk, (2024) menjelaskan bahwa pentingnya perbaikan infrastruktur sebagai prioritas utama dalam pengelolaan wisata yang mencakup peningkatan akses jalan, pembangunan fasilitas seperti toilet umum, gazebo, dan tempat sampah, serta pengelolaan pusat informasi yang

lengkap dengan peta dan informasi tentang ekowisata. Strategi ini bertujuan untuk meningkatkan kenyamanan pengunjung dan mendukung pengelolaan ekowisata secara berkelanjutan.

Dalam wawancara bersama Lurah Condongcatur Reno Candra Sangaji, menyampaikan bahwa;

“Kalurahan Condongcatur memiliki kebijakan untuk mengembangkan sektor wisata berbasis potensi lokal dan pemberdayaan masyarakat. Salah satu fokus utama adalah desa wisata Green Kayen, yang mengusung konsep wisata alam dan edukasi lingkungan. Untuk program yang sudah berjalan yaitu pengelolaan Green Kayen sebagai destinasi wisata berbasis lingkungan, memfasilitasi pelatihan bagi pengelola desa wisata, peningkatan aksesibilitas dengan perbaikan infrastruktur jalan menuju lokasi wisata. Program yang akan dilakukan adalah pengelolaan paket wisata edukatif dan budaya. Kolaborasi lebih lanjut dengan komunitas lokal untuk event pariwisata, serta pemanfaatan teknologi digital untuk promosi wisata Green Kayen. Kalau pengalokasian anggaran untuk wisata, anggaran dialokasikan dari dana desa serta kerja sama dengan pihak ketiga seperti CSR perusahaan dan bantuan dari instansi pemerintah terkait. Selain itu, Bumkal Nyawiji Kalurahan Condongcatur turut berperan dalam mendukung pengelolaan wisata melalui skema bisnis yang berkelanjutan”. (Wawancara 11 November 2024)

Di balik nama Green Kayen, terdapat harapan dan impian masyarakat untuk mengubah lingkungan mereka menjadi tempat yang lebih baik. Ini bukan hanya tentang menarik wisatawan, tetapi juga tentang merayakan keindahan alam dan budaya yang mereka miliki. Masyarakat merasa bangga ketika potensi lokal mereka diakui dan dihargai. Konsep wisata yang mengedepankan alam dan edukasi menciptakan kesempatan bagi pengunjung untuk terhubung dengan lingkungan. Ini juga memberikan masyarakat kesempatan untuk berbagi pengetahuan dan cerita tentang alam mereka, menciptakan jembatan antara generasi dan memperkuat identitas lokal.

Kebijakan Kalurahan Condongcatur menunjukkan komitmen dalam mengembangkan sektor pariwisata berkelanjutan yang mengedepankan potensi lokal dan pemberdayaan masyarakat. Fokus kebijakan ini tidak hanya pada aspek ekonomi, tetapi juga pada penguatan komunitas agar tumbuh rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap pengelolaan wisata. Desa wisata Green Kayen, dengan konsep edukatif dan lingkungan, menjadi wujud nyata dari pendekatan ini, sejalan dengan tren wisata yang menekankan keberlanjutan.

Program pelatihan untuk pengelola dan perbaikan infrastruktur seperti jalan telah dilakukan sebagai langkah konkrit meningkatkan kualitas destinasi. Selain memperlancar akses, pelatihan juga memperkuat kapasitas masyarakat dalam pengelolaan wisata. Rencana pengembangan paket wisata edukatif dan budaya melibatkan komunitas lokal sebagai aktor utama, memberi mereka ruang untuk berpartisipasi aktif dan mendapatkan manfaat langsung dari pariwisata.

Pelatihan bukan sekadar transfer ilmu, melainkan sarana membangun rasa percaya diri dan pemberdayaan. Ketika masyarakat terlibat langsung dalam pengelolaan dan kegiatan wisata, mereka merasa menjadi bagian penting dari masa depan komunitas. Infrastruktur yang lebih baik juga mendukung aktivitas harian warga, memperkuat koneksi dengan dunia luar, serta membuka peluang ekonomi melalui penjualan produk lokal dan promosi budaya.

Pengembangan wisata berbasis edukasi dan budaya memberi ruang bagi masyarakat untuk berbagi cerita dan tradisi. Selain menjadi strategi pelestarian budaya, hal ini juga memperkuat hubungan

emosional antara pengunjung dan tuan rumah. Pemanfaatan teknologi untuk promosi menambah nilai positif, sekaligus membuka peluang belajar dan adaptasi digital bagi masyarakat, memperkaya kapasitas mereka dalam menghadapi perubahan zaman.

Pendanaan dari dana desa, CSR, dan kerja sama pihak ketiga mencerminkan pendekatan pengelolaan yang inklusif dan beragam. Hal ini memberi rasa kontrol kepada masyarakat dan mendorong tanggung jawab kolektif. Peran Bumkal Nyawiji dalam mendukung model bisnis pariwisata berkelanjutan mempertegas komitmen untuk menciptakan pengelolaan wisata yang ramah lingkungan dan inklusif secara sosial. Keseluruhan kebijakan Kalurahan Condongcatur menunjukkan upaya serius membangun pariwisata yang bukan hanya membawa manfaat ekonomi, tetapi juga memperkuat komunitas secara menyeluruh.

Dalam wawancara bersama Riska Dian Nur Lestari selaku Carik Kalurahan Condongcatur, menyampaikan bahwa;

“Saat ini, pengelolaan Green Kayen berada di bawah tanggung jawab Pokdarwis. Pada akhir tahun 2024, juga telah diresmikan Bumkal Nyawiji sebagai salah satu pemangku kepentingan yang memiliki wewenang dalam pengambilan keputusan bersama stakeholder lainnya. Program yang telah berjalan antara lain pemanfaatan pendopo untuk kegiatan seperti rapat dinas, simulasi Pilkada Sleman, senam pagi masyarakat, serta acara Kalurahan. Untuk anggaran, sebelumnya difokuskan pada pembangunan, khususnya pemindahan pendopo dari Kalurahan ke Green Kayen. Namun, saat ini anggaran dari Kalurahan dialihkan ke wilayah lain sehingga tidak lagi dialokasikan untuk Green Kayen.”
(Wawancara 8 Januari 2025)

Kebijakan pengelolaan Green Kayen yang telah dilaksanakan sejauh ini mencerminkan adanya kesadaran kelembagaan di tingkat lokal. Dengan adanya Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) sebagai pengelola utama, kawasan Green Kayen telah memiliki struktur dasar tata kelola destinasi wisata berbasis masyarakat. Keberadaan Pokdarwis sebagai aktor sentral merupakan salah satu prinsip penting dalam pariwisata berbasis komunitas, karena mendorong partisipasi aktif warga dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber daya lokal secara kolektif. Ini menunjukkan bahwa pembangunan wisata tidak hanya dilakukan secara top-down, tetapi juga memberi ruang bagi inisiatif warga.

Penguatan kelembagaan semakin terlihat dengan diresmikannya Badan Usaha Milik Kalurahan (Bumkal) Nyawiji pada akhir tahun 2024 sebagai stakeholder baru. Kehadiran Bumkal tidak hanya memperluas spektrum pengambilan keputusan, tetapi juga menjadi potensi baru dalam aspek kewirausahaan dan keberlanjutan ekonomi desa. Dalam rangka pembangunan lokal, sinergi antara Pokdarwis dan Bumkal dapat menjadi kunci dalam membangun tata kelola multipihak yang adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat maupun dinamika pasar wisata.

Program-program yang telah berjalan, seperti persewaan pendopo untuk rapat dinas, simulasi Pilkada, dan senam pagi masyarakat, menunjukkan bahwa fungsi ruang publik di Green Kayen telah melewati batas fungsional wisata semata. Ini memperlihatkan adanya multifungsi ruang yang memberikan nilai tambah bagi masyarakat lokal. Pendopo tidak hanya menjadi aset fisik, tetapi juga menjadi ruang sosial dan kultural yang menyatukan warga dan

memperkuat identitas kolektif. Ini sejalan dengan pendekatan pembangunan berkelanjutan yang tidak hanya mengejar keuntungan ekonomi, tetapi juga memperkuat jejaring sosial dan kebersamaan warga.

Dari sisi kebijakan anggaran, terdapat dinamika yang cukup menarik. Pada awalnya, Kalurahan memberikan alokasi anggaran untuk pembangunan infrastruktur wisata, khususnya untuk memindahkan pendopo ke kawasan Green Kayen. Ini merupakan langkah strategis karena pemindahan fasilitas publik ke kawasan wisata menunjukkan adanya penyesuaian arah kebijakan untuk mendukung fungsi wisata sebagai penggerak ekonomi lokal. Namun, penghentian sementara alokasi anggaran dari Kalurahan dengan alasan fokus pada titik pembangunan lain adalah hal yang wajar dalam konteks distribusi sumber daya desa yang terbatas.

Dalam wawancara bersama Murgiyanto selaku Ulu-ulu Kalurahan Condongcatur, menyampaikan bahwa:

“Untuk saat ini pengelolaan wisata Green Kayen, kita amanatkan kepada pengurus Bumkal Nyawiji. Green Kayen akan masuk dalam unit usaha Bumkal. Kalau program dari Kalurahan untuk Green Kayen, kita adakan pelatihan pengelolanya. Untuk alokasi dananya nanti kita serahkan ke Bumkal, lalu Bumkal yang dikelola bersama Pokdarwis Green Kayen”. (Wawancara 17 Januari 2025)

Pernyataan tersebut mencerminkan pendekatan partisipatif dan berbasis kelembagaan lokal dalam pengelolaan wisata Green Kayen. Pemerintah Kalurahan mengambil posisi sebagai fasilitator dengan mengamankan pengelolaan wisata kepada Badan Usaha Milik Kalurahan (Bumkal) Nyawiji. Strategi ini memperlihatkan upaya untuk memperkuat kelembagaan lokal sebagai motor

penggerak ekonomi desa, sekaligus mendorong kemandirian dalam tata kelola destinasi wisata. Dengan memasukkan Green Kayen ke dalam unit usaha Bumkal, Kalurahan mendorong integrasi antara potensi wisata dan struktur ekonomi desa, sehingga hasil pengelolaan dapat memberikan manfaat ekonomi yang lebih langsung kepada masyarakat setempat.

Pelatihan yang diselenggarakan oleh Kalurahan untuk pengelola Green Kayen menunjukkan adanya komitmen terhadap peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Ini menandakan bahwa Pemerintah Kalurahan tidak sekedar menyerahkan tanggung jawab kepada Bumkal secara formal, tetapi turut mengambil peran aktif dalam membekali aktor-aktor lokal dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menjalankan wisata secara profesional. Pendekatan ini penting untuk memastikan bahwa pengelolaan wisata tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga disertai dengan kemampuan teknis dan pemahaman nilai-nilai keberlanjutan.

Namun demikian, struktur pembagian tanggung jawab yang memisahkan alokasi dana oleh Kalurahan dan pengelolaan oleh Bumkal dan Pokdarwis juga bisa saja menuntut sistem koordinasi dan akuntabilitas yang kuat. Kolaborasi antara Bumkal dan Pokdarwis harus dibangun di atas prinsip transparansi, saling percaya, dan kesetaraan peran. Jika dijalankan dengan baik, model ini dapat menjadi contoh praktik kolaboratif dalam pengelolaan pariwisata berbasis masyarakat, di mana pemerintah desa tidak memonopoli kendali, melainkan mendorong tumbuhnya aktor-aktor lokal yang

berdaya dan memiliki rasa kepemilikan terhadap destinasi wisata di wilayahnya.

Dalam wawancara bersama Febri Aji Saputro selaku pengurus Bumkal Nyawiji, menyampaikan bahwa:

“Kita memang sudah diberikan amanah oleh Kalurahan untuk memasukkan Green Kayen dalam unit usaha Bumkal Nyawiji. Ini dilakukan agar Bumkal ikut serta dalam mengelola Green Kayen. Namun, sejauh ini kita belum ada koordinasi dengan Pokdarwis Green Kayen. Bumkal ini kan baru dibentuk beberapa bulan kemarin. Kemudian, kita juga masih fokus pada unit usaha Pertashop yang dikelola oleh Bumkal saat ini. Mungkin dalam waktu dekat kita akan koordinasi dengan Pokdarwis Green Kayen, sekalian kita menunggu dana dari Kalurahan untuk pengelolaan Green Keyan tersebut”. (Wawancara 5 Februari 2025)

Pernyataan tersebut menggambarkan dinamika awal dalam proses pembentukan tata kelola wisata berbasis kelembagaan lokal. Amanah yang diberikan oleh Kalurahan kepada Bumkal Nyawiji untuk mengelola Green Kayen menunjukkan adanya niat baik dari pemerintah desa untuk mendorong partisipasi kelembagaan dalam sektor pariwisata. Namun, proses ini masih dalam tahap transisi, mengingat Bumkal sendiri merupakan lembaga yang baru terbentuk dan sedang menjalani proses konsolidasi internal, khususnya dalam unit usaha yang saat ini telah berjalan seperti Pertashop.

Belum terjalannya koordinasi antara Bumkal dan Pokdarwis Green Kayen mengindikasikan bahwa pengelolaan wisata masih berada dalam fase perencanaan awal yang memerlukan penguatan komunikasi antar-aktor lokal. Pokdarwis sebagai kelompok yang memiliki kedekatan langsung dengan aktivitas wisata di lapangan seharusnya menjadi mitra strategis dalam pengelolaan Green Kayen.

Ketidakhadiran koordinasi ini berpotensi menciptakan ketimpangan peran, sehingga proses integrasi kelembagaan menjadi kurang optimal. Hal ini wajar terjadi pada tahap awal pembentukan sistem baru, namun tetap memerlukan perhatian agar tidak menimbulkan kebingungan atau bahkan konflik peran di masa depan.

Di sisi lain, pernyataan “menunggu dana dari Kalurahan” memperlihatkan adanya ketergantungan pada alokasi anggaran desa sebagai penopang utama aktivitas usaha Bumkal. Ini mencerminkan tantangan struktural yang dihadapi oleh lembaga ekonomi lokal dalam mengembangkan unit usaha mandiri, terlebih dalam konteks wisata yang membutuhkan investasi awal serta dukungan kapasitas. Agar pengelolaan Green Kayen berjalan berkelanjutan, dibutuhkan kejelasan peran, alur komunikasi yang terstruktur, serta perencanaan bersama antara Bumkal, Pokdarwis, dan Kalurahan. Pendekatan ini akan membuka ruang bagi tumbuhnya ekosistem wisata yang berbasis kolaborasi dan memperkuat rasa memiliki masyarakat terhadap destinasi yang mereka kelola bersama.

Lebih lanjut disampaikan oleh Muhammad Irfan selaku Sekretaris Bumkal Nyawiji, menyampaikan bahwa:

“Saat ini Bumkal Nyawiji mempunyai tiga unit usaha yaitu: Pertashop, Klinik Nyawiji, dan Wisata Green Kayen. Ketiga unit usaha ini berada di naungan Pemerintah Kalurahan sendiri. Namun setelah Bumkal diresmikan kemarin jadi berada dibawah naungan Bumkal. Saat ini pertashop masih berjalan dan cukup memberikan laba keuntungan. Klinik Nyawiji sementara kita tutup karena hasil dari klinik tersebut belum memungkinkan untuk pengelolaanya. Kalau untuk Green Kayen tersebut kita juga sudah punya rencana untuk membuat kafe di sekitar kawasan tersebut. Kita hanya menunggu dana dari Kalurahan, kalau tidak salah dananya sekitar 50 juta nanti”. (Wawancara 5 Februari 2025)

Pernyataan tersebut mengindikasikan adanya transisi kelembagaan dalam pengelolaan unit-unit usaha milik Kalurahan, dari yang sebelumnya dikelola langsung oleh Pemerintah Kalurahan menjadi bagian dari struktur organisasi Badan Usaha Milik Kalurahan (Bumkal) Nyawiji. Peralihan ini sejalan dengan semangat Undang-Undang Desa yang mendorong kemandirian ekonomi desa melalui pembentukan badan usaha yang profesional dan lebih fleksibel. Namun, fase transisi ini tentu tidak tanpa tantangan. Diperlukan penyesuaian dalam hal manajemen, pembagian kewenangan, hingga pola koordinasi antara Kalurahan dan Bumkal agar tidak terjadi tumpang tindih peran atau kebingungan administratif.

Adapun rencana pengelolaan wisata Green Kayen melalui pembangunan kafe menunjukkan adanya inisiatif untuk menciptakan nilai tambah bagi kawasan wisata, serta upaya untuk memperkaya pengalaman pengunjung. Gagasan ini menandakan kesadaran akan pentingnya diversifikasi usaha dan integrasi antara elemen wisata alam dengan aktivitas ekonomi kreatif. Namun, pelaksanaan rencana tersebut masih menunggu kucuran dana dari Pemerintah Kalurahan. Ketergantungan pada dana desa dalam tahap awal seperti ini adalah hal yang umum, tetapi dalam jangka panjang akan lebih sehat jika Bumkal dapat membangun sistem usaha yang mandiri dan bertahap mengurangi ketergantungan terhadap pendanaan eksternal.

Dengan demikian, kondisi yang tergambar dalam pernyataan ini menunjukkan bahwa penguatan kelembagaan dan kapasitas manajerial Bumkal masih menjadi kebutuhan utama. Keberhasilan satu unit usaha seperti Pertashop dapat menjadi pijakan awal untuk membangun portofolio usaha yang lebih luas dan berkelanjutan.

Namun, untuk mencapai keberhasilan serupa pada unit wisata seperti Green Kayen, dibutuhkan lebih dari sekadar perencanaan yakni kolaborasi aktif dengan kelompok masyarakat (seperti Pokdarwis), perencanaan bisnis yang realistis, serta dukungan regulatif dan anggaran yang selaras. Dengan cara ini, Bumkal Nyawiji tidak hanya menjadi perpanjangan tangan Kalurahan, tetapi tumbuh sebagai entitas ekonomi desa yang otonom, adaptif, dan berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.

D. Aliran Politik Keterlibatan Stakeholder dalam Pembentukan Green Kayen

Peran stakeholder dalam pengelolaan wisata menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat lokal dan pemangku kepentingan lainnya dalam proses dalam pengambilan keputusan. Hal ini mencakup mendengarkan aspirasi masyarakat, menghargai budaya lokal, dan memastikan bahwa manfaat ekonomi dari pariwisata dirasakan oleh semua pihak, bukan hanya segelintir orang.

Keterlibatan masyarakat lokal dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan dapat ditingkatkan, memastikan bahwa aspirasi dan kebutuhan mereka terakomodasi dalam pengelolaan pariwisata (Fajri et al., 2022). Artinya bahwa, masyarakat lokal harus dilibatkan dalam setiap tahap pengelolaan wisata, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan. Aspirasi dan kebutuhan mereka harus didengar dan dipertimbangkan agar wisata yang dikembangkan sesuai dengan harapan dan budaya setempat. Selain itu, menghargai dan melestarikan budaya lokal menjadi kunci dalam menarik wisatawan yang ingin merasakan pengalaman autentik. Kegiatan

pariwisata harus mencerminkan nilai-nilai dan tradisi masyarakat, sehingga wisatawan dapat belajar dan menghargai keunikan daerah tersebut. Selain itu, penting juga untuk memastikan bahwa keuntungan dari pariwisata tidak hanya dinikmati oleh pengusaha besar, tetapi juga oleh masyarakat lokal. Program pelatihan dan pemberdayaan ekonomi lokal dapat membantu masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam industri pariwisata.

Kerja sama dilakukan antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam pengelolaan kawasan wisata. Stakeholder dibagi menjadi empat kategori: pembuat kebijakan, pelaksana, fasilitator, dan konservator. Kolaborasi yang transparan dan saling menghormati antar-stakeholder menciptakan lingkungan yang kondusif untuk dialog dan kerjasama dalam pengelolaan wisata. Artinya bahwa, stakeholder bekerja sama dan saling menghormati, menciptakan lingkungan yang kondusif untuk dialog dan kerjasama.

Pelibatan masyarakat dalam program pelestarian lingkungan dapat meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap sumber daya alam dan mendukung keberlanjutan pariwisata. Artinya bahwa pengelolaan pariwisata harus memperhatikan dampak lingkungan dan berupaya untuk menjaga kelestarian alam. Masyarakat lokal dapat dilibatkan dalam program-program pelestarian lingkungan, sehingga mereka merasa memiliki tanggung jawab terhadap sumber daya alam yang ada. Dengan demikian, dalam pengelolaan wisata hubungan yang harmonis antara semua pihak yang terlibat sangat penting. Dengan memperhatikan aspek sosial, budaya, dan ekonomi, pariwisata dapat berkembang secara berkelanjutan dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

Dengan merujuk pada studi-studi tersebut, dapat disimpulkan bahwa peran stakeholder, dalam hal ini khususnya masyarakat lokal padukuhan kayen, sangat krusial dalam pengelolaan wisata Green Kayen yang berkelanjutan. Keterlibatan aktif masyarakat serta komunitas lokal dalam setiap tahap pengelolaan, penghargaan terhadap budaya lokal, pemerataan manfaat ekonomi, kolaborasi antar-stakeholder, dan pelestarian lingkungan merupakan aspek-aspek penting yang harus diperhatikan untuk mencapai pengelolaan wisata alam yang inklusif dan berkelanjutan.

Dalam wawancara bersama Lurah Condongcatur Reno Candra Sangaji, menyampaikan bahwa;

“Kami terus menjalin kerja sama dengan Dinas Pariwisata, komunitas lokal, akademisi, dan pelaku usaha untuk mengembangkan wisata berbasis partisipasi masyarakat. Kalurahan berperan sebagai fasilitator dan regulator dalam pengelolaan wisata, memastikan bahwa kebijakan dan regulasi berjalan dengan baik serta mendukung keberlanjutan desa wisata”. (Wawancara 18 Februari 2025)

Dalam pengelolaan dan pengelolaan wisata sangat penting kolaborasi antara berbagai pihak, termasuk Dinas Pariwisata, komunitas lokal, akademisi, dan pelaku usaha. Ini menunjukkan pendekatan yang inklusif dalam pengelolaan pariwisata, di mana semua pihak yang berkepentingan dilibatkan untuk menciptakan ekosistem pariwisata yang berkelanjutan. Konsep wisata berbasis partisipasi masyarakat menunjukkan bahwa pengelolaan pariwisata tidak hanya berfokus pada keuntungan ekonomi, tetapi juga pada pemberdayaan masyarakat lokal. Ini menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab di kalangan masyarakat terhadap pengelolaan sumber daya wisata.

Kalurahan berfungsi sebagai fasilitator dan regulator, yang berarti bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk mengatur dan memfasilitasi pengelolaan wisata. Ini menunjukkan bahwa pengelolaan pariwisata tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga melibatkan peran aktif dari masyarakat lokal. Penekanan pada pentingnya kebijakan dan regulasi yang berjalan dengan baik menunjukkan bahwa ada kerangka kerja yang jelas untuk mengelola pariwisata. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pengelolaan pariwisata tidak merusak lingkungan atau budaya lokal, serta mendukung keberlanjutan.

Fokus pada keberlanjutan menunjukkan bahwa pengelolaan pariwisata diarahkan untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Ini penting untuk memastikan bahwa desa wisata dapat bertahan dalam jangka panjang dan memberikan manfaat bagi generasi mendatang. Artinya bahwa, ini mencerminkan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan dalam pengelolaan pariwisata, dengan penekanan pada kolaborasi, partisipasi masyarakat, dan pengelolaan yang baik. Ini adalah langkah positif menuju pariwisata yang lebih bertanggung jawab dan berkelanjutan.

Dalam wawancara bersama Riska Dian Nur Lestari selaku Carik Kalurahan Condongcatur, menyampaikan bahwa;

“Untuk koordinasi biasanya kita melalui satu bidang yaitu melalui Ulu-ulu. Misalnya berkaitan dengan pembangunannya maupun kulinernya dan lain-lain. Semua koordinasi kita bisa lewat Ulu-ulu sebagai bidang yang berkoordinasi langsung pihak pengelola wisata Green Kayen. Selain itu, koordinasi tersebut tergantung pada kebutuhan yang diperlukan. Kalau untuk peran dari Kalurahan, kita dapat memonitoring bagaimana kondisi wisata Green Kayen, karena sejauh ini kita

sering menggunakan pendopo Green Kayen, jadi kita dapat melihat langsung kondisinya”. (Wawancara 18 Februari 2025)

Sistem koordinasi dalam pengelolaan wisata Green Kayen yang dilakukan melalui satu bidang, yaitu Ulu-ulu, mencerminkan adanya jalur komunikasi yang terpusat dan fungsional dalam struktur pemerintahan Kalurahan. Dalam konteks tata kelola pemerintahan lokal, penunjukan satu bidang sebagai koordinator utama dapat mempermudah proses komunikasi, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan program. Ulu-ulu, yang secara tradisional bertugas di bidang pertanian dan sumber daya alam, ternyata memiliki peran strategis dalam menjembatani komunikasi antara Pemerintah Kalurahan dan pengelola wisata. Hal ini menunjukkan adanya fleksibilitas peran dalam pemerintahan desa yang menyesuaikan diri dengan dinamika pembangunan sektor pariwisata.

Koordinasi yang bersifat situasional dan berbasis kebutuhan juga menunjukkan bahwa pengelolaan Green Kayen dijalankan secara adaptif. Fleksibilitas dalam koordinasi memungkinkan para pihak untuk menyesuaikan pendekatan mereka dengan urgensi dan konteks persoalan yang muncul, baik itu terkait pembangunan fisik maupun pengelolaan usaha kuliner. Pendekatan ini dapat mendukung efisiensi dan responsivitas, terutama dalam tahap awal pengelolaan destinasi wisata yang masih dinamis dan terus berubah. Namun, model koordinasi semacam ini juga memerlukan sistem dokumentasi dan evaluasi yang baik agar tidak menimbulkan ketidakteraturan dalam jangka panjang.

Peran aktif Kalurahan dalam melakukan monitoring terhadap kondisi Green Kayen menjadi poin penting dalam sistem pengawasan pembangunan lokal. Monitoring yang dilakukan secara langsung, terutama melalui pemanfaatan pendopo untuk berbagai kegiatan, menjadikan Pemerintah Kalurahan tidak hanya sebagai pengawas administratif, tetapi juga sebagai pengguna dan saksi langsung atas dinamika lapangan. Ini menunjukkan pendekatan monitoring yang partisipatif dan berbasis pengalaman nyata yang lebih kontekstual dan memberi ruang pada penilaian kualitatif terhadap kondisi destinasi.

Meskipun sistem koordinasi yang berjalan saat ini terkesan fungsional, ke depan perlu dilakukan penguatan kelembagaan agar mekanisme komunikasi dan monitoring tidak hanya bergantung pada personal atau jabatan tertentu. Misalnya, dibutuhkan penyusunan standar prosedur koordinasi, pelaporan kegiatan, serta mekanisme evaluasi berkala yang melibatkan Pokdarwis, Bumkal, dan Perangkat Kalurahan lainnya. Hal ini akan memperkuat sistem tata kelola dan meminimalkan risiko stagnasi apabila terjadi perubahan personel atau struktur organisasi di masa mendatang.

Dalam wawancara bersama Dadang selaku Ketua Pokdarwis Green Kayen, menyampaikan bahwa:

“Ketika ada event atau kegiatan yang akan dilakukan di Pendopo Green Kayen, kita pastinya musyawarahkan dulu dengan masyarakat dan pemuda sekitar, agar mereka dapat peran dalam kegiatan tersebut. Misalnya, ketika ada kegiatan atau event, pemuda akan mengurus bagian parkir dan keamanan, sedangkan masyarakat terutama ibu PKK membuat katering makanan untuk acara tersebut. Kemudian Pokdarwis juga akan jadi wadah penyampaian ide dari warga untuk pihak Kalurahan mengenai Green Kayen.” (Wawancara 20 Februari 2025)

Berdasarkan kutipan tersebut, dapat dilihat bahwa pengelolaan kawasan wisata Green Kayen menunjukkan praktik partisipasi masyarakat yang cukup kuat, yang tercermin dalam keterlibatan aktif berbagai elemen lokal dalam setiap kegiatan atau event yang diselenggarakan. Keterlibatan tersebut tidak hanya bersifat simbolik, melainkan telah melembaga melalui mekanisme musyawarah yang melibatkan pemuda, ibu-ibu PKK, dan Pokdarwis sebagai aktor sentral. Ini mencerminkan pendekatan *bottom-up* dalam pengembangan pariwisata, di mana masyarakat memiliki ruang untuk menyampaikan aspirasi dan mengambil peran sesuai kapasitasnya masing-masing.

Partisipasi pemuda dalam mengelola parkir dan keamanan menunjukkan adanya pembagian peran yang jelas dan strategis dalam struktur sosial masyarakat lokal. Hal ini tidak hanya mendorong terciptanya rasa tanggung jawab kolektif terhadap keberlangsungan kegiatan wisata, tetapi juga memperkuat kohesi sosial di antara kelompok usia produktif. Selain itu, keterlibatan pemuda dalam aspek teknis pelaksanaan kegiatan menunjukkan bahwa mereka tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi turut menjadi subjek yang aktif dalam proses tersebut.

Peran ibu-ibu PKK dalam menyediakan katering makanan juga menggambarkan adanya pemberdayaan ekonomi lokal berbasis komunitas. Melalui kegiatan ini, masyarakat, khususnya perempuan, tidak hanya berkontribusi pada aspek logistik kegiatan, tetapi juga memperoleh manfaat ekonomi secara langsung. Kegiatan semacam ini menjadi bentuk nyata dari pengarusutamaan gender dalam pembangunan pariwisata, yang seringkali luput dari perhatian dalam

kebijakan formal. Keterlibatan perempuan dalam kegiatan ekonomi berbasis event turut memperkuat struktur ekonomi lokal yang inklusif dan berkelanjutan.

Selanjutnya, peran Pokdarwis sebagai penghubung antara masyarakat dengan pihak Kalurahan menempatkan organisasi ini sebagai lembaga mediasi yang strategis dalam tata kelola wisata berbasis lokal. Pokdarwis tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana teknis kegiatan wisata, tetapi juga sebagai saluran aspirasi masyarakat kepada pemerintah desa. Ini mencerminkan peran penting Pokdarwis dalam kerangka *agenda setting* lokal, di mana ide-ide dan kepentingan masyarakat dapat dijembatani agar menjadi bagian dari kebijakan dan program pengembangan wisata. Dengan demikian, pola komunikasi dan koordinasi antara masyarakat, Pokdarwis, dan pemerintah desa menunjukkan adanya tata kelola kolaboratif yang berpotensi meningkatkan keberlanjutan dan akuntabilitas pengelolaan Green Kayen.

Arif Budi Sasongko selaku ketua Karang Taruna di Padukuhan Kayen, menyampaikan bahwa:

“Setiap ada event atau kegiatan kita selalu dilibatkan. Misalnya jika ada yang harus dikerjakan atau perlu dipersiapkan sebelum kegiatan berlangsung, kami dari pemuda Karang Taruna akan mengambil peran untuk membantu.” (Wawancara 22 Oktober 2024)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemuda Karang Taruna memiliki peran aktif dalam proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di kawasan wisata Green Kayen. Keterlibatan yang konsisten dalam setiap event atau kegiatan menandakan adanya pola partisipasi yang bersifat partisipatif dan berkelanjutan. Dalam

konteks pembangunan pariwisata berbasis masyarakat, keterlibatan Karang Taruna merefleksikan prinsip inklusivitas sosial, di mana kelompok pemuda diberi ruang untuk berkontribusi secara nyata terhadap kemajuan wilayahnya.

Peran pemuda dalam tahap persiapan dan pelaksanaan kegiatan merupakan indikasi kuat bahwa proses pengelolaan wisata di Green Kayen tidak sepenuhnya bersifat top-down. Pemuda Karang Taruna tidak hanya dilibatkan sebagai pelaksana teknis, tetapi juga sebagai bagian dari sistem sosial yang menopang keberlangsungan kegiatan wisata. Keterlibatan mereka secara struktural menunjukkan bahwa modal sosial dalam bentuk solidaritas, tanggung jawab kolektif, dan rasa memiliki terhadap lingkungan lokal menjadi aset penting dalam pengembangan destinasi wisata berbasis komunitas.

Kehadiran Karang Taruna sebagai aktor yang aktif dalam kegiatan wisata juga dapat dilihat sebagai bentuk pemberdayaan pemuda. Mereka tidak hanya memperoleh pengalaman kerja sosial, tetapi juga mengembangkan keterampilan manajerial, kepemimpinan, dan kolaborasi lintas sektor. Dalam kerangka pembangunan berkelanjutan, pemberdayaan pemuda merupakan faktor strategis yang dapat menjamin kesinambungan program-program lokal karena menciptakan regenerasi aktor-aktor lokal yang kompeten dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

E. Faktor Pendukung dan Penghambat

1. Faktor Pendukung

Fasilitas pendukung seperti lahan parkir, toilet, taman, dan penyewaan kapal bagi wisatawan, serta aksesibilitas yang baik, merupakan faktor penting dalam mendukung pengelolaan wisata. selain itu, peran aktif pemerintah dan stakeholder dalam pengelolaan kawasan wisata sangat krusial. (Wahyuningtiyas & Iskandar, 2023) menunjukkan bahwa keterlibatan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dan masyarakat lokal, dalam perencanaan dan pengelolaan kawasan wisata alam dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan dan keberlanjutan destinasi .

Dalam wawancara bersama Taufik Yosi selaku pengurus Pokdarwis Green Kayen, menyampaikan bahwa:

“Salah satu faktor pendukung Green Kayen saat ini adalah adanya pendopo, karena pendopo tersebut sering digunakan sebagai tempat kegiatan, baik dari Kalurahan maupun di dari warga sekitar pendopo seringkali digunakan. Kemudian, kita juga punya semangat gotong royong yang menjadikan kekuatan untuk bertahan dalam mengelola Green Kayen tersebut” (Wawancara 6 September 2024)

Pernyataan tersebut menekankan dua aspek penting dalam keberlangsungan pengelolaan kawasan wisata Green Kayen, yakni keberadaan infrastruktur pendukung berupa pendopo dan nilai budaya lokal berupa semangat gotong royong. Pendopo sebagai elemen fisik infrastruktur berfungsi tidak hanya sebagai sarana pendukung kegiatan wisata, tetapi juga sebagai pusat interaksi sosial yang memperkuat kohesi masyarakat. Dalam perspektif pembangunan pariwisata berbasis komunitas, keberadaan ruang publik seperti

pendopo menjadi simbol penting dari ketersediaan fasilitas yang mampu menunjang aktivitas kolektif masyarakat.

Pendopo yang dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan baik oleh pemerintah Kalurahan maupun masyarakat sekitar menunjukkan fleksibilitas fungsi ruang tersebut dalam mendukung aktivitas sosial dan kultural. Hal ini mencerminkan bahwa pengembangan infrastruktur di Green Kayen tidak hanya berorientasi pada estetika atau keperluan wisatawan, tetapi juga mempertimbangkan aspek kebermanfaatan langsung bagi warga. Dengan demikian, pendopo berperan sebagai infrastruktur multifungsi yang menjadi titik temu antara kepentingan wisata dan dinamika sosial masyarakat lokal.

Selain faktor fisik, nilai sosial seperti gotong royong menjadi pilar utama dalam menjaga keberlangsungan pengelolaan Green Kayen. Gotong royong sebagai praktik sosial yang melekat dalam budaya lokal merupakan bentuk nyata dari modal sosial komunitas. Dalam konteks pengelolaan wisata, semangat gotong royong menciptakan solidaritas antar warga, memperkuat rasa memiliki, dan meningkatkan efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan tanpa bergantung sepenuhnya pada bantuan eksternal. Ini sejalan dengan teori pembangunan berkelanjutan yang menekankan pentingnya aspek sosial dan budaya dalam mendukung keberhasilan pengelolaan destinasi wisata.

Kombinasi antara infrastruktur yang representatif dan kekuatan sosial internal seperti gotong royong menunjukkan bahwa pengembangan Green Kayen mengandalkan keseimbangan antara aspek fisik dan non-fisik. Keseimbangan ini penting untuk menjamin keberlanjutan jangka panjang, karena keberadaan fasilitas tanpa

dukungan sosial akan rentan terhadap kerusakan atau pengabaian. Sebaliknya, semangat gotong royong tanpa dukungan infrastruktur memadai akan membatasi daya jangkau kegiatan wisata. Oleh karena itu, sinergi antara elemen struktural dan kultural menjadi pondasi utama dalam pengembangan Green Kayen sebagai destinasi wisata berbasis komunitas.

Dalam wawancara bersama Lurah Condongcatur Reno Candra Sangaji, menyampaikan bahwa:

“Dukungan yang diberikan Kalurahan yaitu peningkatan SDM melalui pelatihan, penyediaan infrastruktur, serta promosi wisata melalui media sosial dan event”. (Wawancara 18 Februari 2025)

Pemerintah Kalurahan memegang peran strategis dalam pengelolaan dan pengelolaan pariwisata berbasis masyarakat, seperti yang diterapkan di destinasi wisata Green Kayen. Salah satu bentuk dukungan yang signifikan adalah peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) melalui pelatihan. Pelatihan ini mencakup berbagai aspek, seperti pelayanan wisata, pemanduan, pengelolaan dan pemasaran digital. Upaya ini selaras dengan prinsip *Community Based Tourism* yang menempatkan masyarakat lokal sebagai pelaku utama dalam aktivitas kepariwisataan. Melalui pelatihan, warga tidak hanya dibekali dengan keterampilan teknis, tetapi juga dibentuk sikap sadar wisata yang mendukung pengelolaan destinasi secara berkelanjutan.

Selain peningkatan kapasitas SDM, dukungan kalurahan juga tampak melalui penyediaan infrastruktur dasar yang menunjang kelangsungan aktivitas wisata. Akses jalan yang layak, fasilitas parkir, serta ruang publik yang tertata menjadi elemen penting dalam menciptakan kenyamanan bagi wisatawan. Infrastruktur yang baik

tidak hanya mempengaruhi persepsi wisatawan terhadap kualitas destinasi, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap ekonomi lokal, khususnya pelaku usaha kecil dan menengah di sekitar kawasan wisata.

Dukungan promosi juga menjadi aspek krusial yang dilakukan oleh Pemerintah Kalurahan. Strategi promosi melalui media sosial merupakan bentuk adaptasi terhadap perkembangan teknologi informasi yang kini menjadi kanal utama dalam penyebaran informasi pariwisata. Pemerintah Kalurahan secara aktif memanfaatkan platform digital untuk mengenalkan daya tarik wisata Green Kayen kepada khalayak yang lebih luas. Selain itu, penyelenggaraan event-event lokal, seperti festival budaya atau pertunjukan seni, menjadi sarana efektif untuk menarik kunjungan wisatawan sekaligus memperkuat identitas budaya lokal. Kegiatan ini juga memberikan ruang partisipasi bagi masyarakat, khususnya generasi muda, dalam menjaga dan mempromosikan warisan budaya mereka.

Dalam wawancara bersama Dadang selaku ketua Pokdarwis, menyampaikan bahwa:

Kalau untuk faktor pendukung sudah ada beberapa, seperti fasilitas yang ada saat ini yaitu pendopo, gazebo, dan mushola. Selain itu, kita juga tetap berkoordinasi dengan Pemerintah Kalurahan untuk meningkat SDM dalam pengelolaan wisata Green Kayen.” (Wawancara 4 Maret 2025)

Pernyataan tersebut mencerminkan adanya potensi dukungan struktural dan kelembagaan dalam pengelolaan wisata Green Kayen. Ketersediaan fasilitas seperti pendopo, gazebo, dan mushola menunjukkan bahwa kawasan ini telah memiliki infrastruktur dasar yang dapat menunjang aktivitas wisata dan kenyamanan pengunjung.

Infrastruktur ini menjadi faktor penting dalam menciptakan pengalaman wisata yang positif, karena menunjang kebutuhan dasar pengunjung baik untuk bersantai maupun beribadah. Keberadaan fasilitas fisik ini juga menjadi fondasi awal yang cukup menjanjikan untuk dikembangkan lebih lanjut agar dapat menarik lebih banyak wisatawan.

Di sisi lain, koordinasi dengan Pemerintah Kalurahan dalam upaya peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) menunjukkan bahwa pengelola Green Kayen menyadari pentingnya pemberdayaan masyarakat lokal. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip pengelolaan pariwisata berkelanjutan, yang menekankan keterlibatan aktif komunitas dalam setiap aspek pengelolaan destinasi. Peningkatan kapasitas SDM bukan hanya tentang pelatihan teknis, melainkan juga mencakup pembentukan pola pikir kolaboratif dan tanggung jawab kolektif terhadap keberlanjutan kawasan wisata. Dengan adanya sinergi antara fasilitas fisik dan penguatan kapasitas sosial, Green Kayen memiliki potensi tumbuh sebagai destinasi wisata berbasis lokal yang inklusif dan berdaya saing.

2. Faktor Penghambat

Kondisi infrastruktur yang kurang memadai, seperti jalan akses yang rusak dan fasilitas umum yang tidak terawat, dapat menghambat perkembangan wisata. Fatimah Az-Zahra & Hendri Azwar, (2024) menjelaskan bahwa akses jalan yang kurang optimal dan fasilitas umum yang tidak memadai menjadi faktor penghambat utama dalam pengelolaan daya tarik wisata. Selain itu, kurangnya upaya promosi dan pemasaran destinasi wisata dapat menyebabkan

rendahnya tingkat kunjungan wisatawan. Amalia & Rendra, (2018) menjelaskan juga bahwa kurangnya promosi menjadi salah satu faktor penghambat dalam pengelolaan wisata.

Keterbatasan dalam hal sumber daya manusia yang terampil dan kurangnya partisipasi aktif masyarakat lokal dalam pengelolaan wisata dapat menghambat pengelolaan destinasi. Artinya bahwa masyarakat lokal cenderung hanya berperan sebagai pekerja dan tidak terlibat dalam perencanaan pengelolaan wisata, yang menjadi kelemahan dalam pengelolaan destinasi.

Dalam wawancara bersama Taufik Yosi selaku pengurus Pokdarwis, menyampaikan bahwa:

“Kita memiliki kendala pengelolaan Green Kayen ini, baik dari infrastruktur maupun dengan sumber daya manusia. Dari segi infrastruktur kita masih memiliki kekurangan banyak seperti, taman kuliner belum ada, fasilitas lain yang belum lengkap termasuk spot foto buatan juga kita belum ada. Selain itu, SDM juga masih tergolong kurang sehingga pengelolaan Green Kayen ini belum begitu masif. Kemudian dana juga sangat terbatas, namun kami tetap optimis untuk tetap mengelola Green Kayen tersebut.” (Wawancara 6 September 2024)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa pengelolaan kawasan wisata Green Kayen masih menghadapi sejumlah tantangan mendasar yang berkaitan dengan ketersediaan infrastruktur, kualitas sumber daya manusia (SDM), dan keterbatasan pendanaan. Permasalahan ini mencerminkan kondisi umum yang kerap ditemui dalam pengembangan pariwisata berbasis masyarakat, khususnya di wilayah-wilayah yang sedang bertumbuh dan belum memiliki dukungan kelembagaan serta perencanaan yang matang. Ketidaksiapan dalam penyediaan fasilitas dasar seperti taman kuliner,

spot foto, dan sarana penunjang lainnya menunjukkan bahwa Green Kayen masih berada dalam tahap awal pengembangan destinasi.

Infrastruktur merupakan komponen vital dalam pengembangan pariwisata karena berfungsi sebagai pendukung kenyamanan dan aksesibilitas, yang pada akhirnya akan mempengaruhi tingkat kepuasan wisatawan dan durasi kunjungan mereka. Artinya bahwa, pembangunan infrastruktur yang memadai menjadi salah satu prasyarat penting dalam menciptakan destinasi wisata yang berdaya saing. Oleh karena itu, kebutuhan terhadap fasilitas seperti taman kuliner dan spot foto harus dipandang sebagai investasi strategis yang mendukung pertumbuhan pariwisata jangka panjang.

Selain infrastruktur, kualitas dan kuantitas sumber daya manusia menjadi faktor penting yang tidak dapat diabaikan. Pengelolaan pariwisata membutuhkan SDM yang tidak hanya memiliki keterampilan teknis, tetapi juga pemahaman terhadap prinsip keberlanjutan, pelayanan prima, dan pengelolaan kelembagaan. Ketimpangan dalam kapasitas SDM lokal dapat menghambat efektivitas operasional serta memperlambat proses perencanaan dan implementasi kegiatan wisata. Dalam konteks ini, pelatihan dan peningkatan kapasitas masyarakat setempat menjadi prioritas utama yang harus dilakukan secara berkelanjutan oleh pemerintah desa maupun mitra pembangunan lainnya.

Terlepas dari segala keterbatasan tersebut, pernyataan bahwa pihak pengelola tetap optimis menunjukkan adanya komitmen dan semangat untuk terus mengembangkan Green Kayen. Optimisme ini merupakan modal sosial yang penting dalam pembangunan pariwisata

berbasis komunitas, karena mencerminkan adanya rasa memiliki dan kemauan untuk terlibat aktif dari masyarakat. Dalam perspektif pembangunan partisipatif, dukungan moral semacam ini dapat menjadi penggerak utama dalam membangun sinergi antara masyarakat, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya untuk mengatasi kendala yang ada secara bertahap dan kolektif.

Dalam wawancara bersama Lurah Condongcatur Reno Candra Sangaji menyampaikan bahwa:

“Kendala yang dihadapi adalah keterbatasan anggaran untuk pengelolaan lebih lanjut sehingga perlunya peningkatan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan. Selain itu, persaingan dengan destinasi wisata di Sleman cukup tinggi. Namun, kami optimis dengan kolaborasi yang solid, wisata Condongcatur akan semakin berkembang dan memberikan manfaat bagi masyarakat”. (Wawancara 18 Februari 2025)

Dalam upaya mengembangkan pariwisata lokal, Pemerintah Kalurahan Condongcatur menghadapi sejumlah tantangan yang cukup signifikan. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh Pemerintah Kalurahan maupun pengelola wisata. Keterbatasan ini berdampak langsung terhadap lambatnya pembangunan fasilitas penunjang wisata, pengadaan sarana promosi, dan pembinaan sumber daya manusia. Dalam konteks pengelolaan destinasi pariwisata, aspek pembiayaan merupakan pondasi penting yang mempengaruhi kesinambungan operasional serta pengelolaan jangka panjang suatu destinasi.

Untuk mengatasi hambatan tersebut, diperlukan peningkatan partisipasi aktif dari masyarakat setempat dalam setiap tahapan pengelolaan wisata. Pelibatan masyarakat bukan hanya sebagai tenaga kerja, tetapi juga sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas

kegiatan pariwisata. Keterlibatan ini memungkinkan adanya alokasi sumber daya lokal yang lebih efisien serta memperkuat rasa memiliki terhadap destinasi yang dikembangkan. Konsep ini sejalan dengan pendekatan *Community Based Tourism* (CBT) yang menempatkan masyarakat sebagai subjek pembangunan, bukan semata-mata objek dari kebijakan pemerintah atau investor.

Di sisi lain, kompetisi dengan destinasi wisata lain di wilayah Sleman, yang sudah lebih dahulu dikenal secara luas dan memiliki infrastruktur yang lebih mapan, menjadi tantangan tersendiri. Persaingan ini mendorong pengelola wisata Green Kayen serta Pemkal Condongcatur untuk lebih kreatif dan inovatif dalam menawarkan daya tarik yang khas dan berbeda. Diferensiasi produk wisata berbasis kearifan lokal, budaya, dan lingkungan menjadi kunci dalam membangun posisi destinasi di tengah persaingan yang ketat. Hal ini juga menunjukkan perlunya riset pasar dan strategi pemasaran yang adaptif terhadap tren wisatawan masa kini.

Dalam wawancara bersama Dadang selaku ketua Pokdarwis, menyampaikan bahwa:

“Kendala kita saat ini adalah dana karena masih sangat kekurangan dana untuk pengelolaan Green Kayen. Fasilitas penunjang lain juga masih sangat minim, kemudian dari sisi SDM juga masih tergolong minim. Sebab untuk mengelola wisata tersebut kita butuh dana, fasilitas, dan juga SDM mumpuni.” (Wawancara 4 Maret 2025)

Pernyataan tersebut menggambarkan permasalahan klasik yang sering dihadapi dalam pengelolaan destinasi wisata berbasis lokal, yaitu keterbatasan sumber daya baik finansial, infrastruktur, maupun sumber daya manusia (SDM). Ketiga aspek ini merupakan pilar utama dalam menunjang keberlanjutan suatu kawasan wisata. Di

Green Kayen kekurangan dana menjadi kendala fundamental yang menghambat pengembangan fasilitas pendukung seperti aksesibilitas, ruang publik, hingga penunjang kenyamanan wisatawan. Tanpa dukungan finansial yang memadai, banyak rencana pengembangan hanya berhenti di tataran wacana atau terhambat pelaksanaannya secara maksimal.

Minimnya fasilitas penunjang bukan hanya berdampak pada kenyamanan pengunjung, tetapi juga pada citra destinasi itu sendiri. Fasilitas yang memadai tentu berkontribusi langsung terhadap kepuasan wisatawan dan peningkatan kunjungan ulang. Ketika fasilitas tidak optimal, destinasi cenderung mengalami stagnasi dalam perkembangan. Ini menjadi tantangan tersendiri bagi pengelola lokal, yang di satu sisi ingin mempromosikan potensi wisata alam seperti Green Kayen, namun di sisi lain harus bergulat dengan keterbatasan sarana yang belum terkelola dengan baik.

Dari sisi SDM, permasalahan ini memperlihatkan adanya kebutuhan mendesak akan peningkatan kapasitas masyarakat lokal dalam mengelola wisata. SDM yang kompeten tidak hanya mampu menjalankan operasional harian, tetapi juga berperan dalam inovasi, pelayanan, hingga promosi destinasi. Tanpa pelatihan dan pendampingan yang memadai, masyarakat lokal akan terus bergantung pada pihak luar atau mengalami ketimpangan dalam pengelolaan. Dengan demikian, kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan pelaku usaha pariwisata menjadi penting untuk mendorong peningkatan kapasitas ini secara sistematis dan berkelanjutan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pendekatan tiga arus kebijakan menurut Kingdom, yakni aliran masalah, aliran kebijakan, dan aliran politik, dapat disimpulkan bahwa proses *agenda setting* di Green Kayen bersifat berbasis komunitas.

Pada tahap aliran masalah, proses *agenda setting* masih masih belum berjalan secara sinergis dan inklusif. Dalam pengelolaan destinasi Green Kayen masih mengalami ketidaksinkronan dalam pengambilan keputusan sesuai kewenangan dalam pengelolaan. Kehadiran Bumkal Nyawiji sebagai motor penggerak ekonomi lokal belum menjalankan tugasnya secara optimal. Bumkal diberikan amanah oleh Pemerintah Kalurahan untuk memasukkan destinasi wisata Green Keyan sebagai unit usaha Bumkal Nyawiji. Sedangkan Bumkal Nyawiji dengan Pokdarwis belum berkoordinasi terkait pengembangan destinasi wisata Green Kayen, sehingga muncul dualisme kewenangan dalam pengelolaan Green Kayen.

Dalam aliran kebijakan, Pemerintah Kalurahan merespons aspirasi masyarakat dengan memberikan dukungan konkret berupa pembangunan infrastruktur (pendopo, mushola, akses jalan), pelatihan sumber daya manusia, serta penguatan kelembagaan melalui pendirian Pokdarwis dan pelibatan Bumkal Nyawiji. Selain itu, Pemerintah Kalurahan mempunyai kewenangan penuh dalam pembentukan serta pengelolaan wisata Green Kayen. Oleh karena itu,

kebijakan Kalurahan diarahkan untuk mengembangkan konsep wisata berbasis edukasi dan lingkungan, yang sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dan pemberdayaan masyarakat. Namun, terdapat dinamika koordinasi yang belum optimal yaitu hubungan antara Pokdarwis dan Bumkal yang sejauh ini belum ada koordinasi, serta ketergantungan pada dana desa, menjadi tantangan yang perlu diselesaikan secara sistemik dan partisipatif. Perlu adanya konsolidasi peran antar-stakeholder agar pengelolaan wisata berjalan efisien, transparan, dan berkelanjutan.

Sementara itu, aliran politik tercermin dari kuatnya komitmen kolaboratif antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah desa, masyarakat lokal, pemuda Karang Taruna, ibu PKK, Dinas Pariwisata, hingga pelaku usaha lokal. Proses musyawarah, partisipasi dalam kegiatan, serta keterbukaan dalam penyampaian aspirasi memperlihatkan bahwa pengelolaan wisata ini tidak hanya dipandu oleh aktor tunggal, melainkan melalui proses deliberatif yang menempatkan masyarakat sebagai subjek pembangunan.

Selain itu, terdapat faktor pendukung, antara lain: adanya potensi alam yang khas dan menarik, dukungan Pemerintah Kalurahan melalui kebijakan, serta semangat partisipatif awal dari masyarakat dan Pokdarwis. Namun demikian, pengembangan wisata ini juga menghadapi berbagai faktor penghambat, seperti lemahnya koordinasi antar-stakeholder, minimnya anggaran pengelolaan, rendahnya kapasitas SDM pelaksana, serta belum optimalnya peran Bumkal sebagai institusi penggerak ekonomi desa.

B. Saran

1. Penguatan Koordinasi Kelembagaan

Perlu dilakukan penguatan sinergi antara Pokdarwis dan Bumkal Nyawiji melalui forum koordinasi rutin, penyusunan rencana kerja bersama, serta mekanisme pelaporan dan evaluasi. Hal ini akan memperjelas peran masing-masing pihak dalam pengelolaan wisata dan menghindari tumpang tindih kewenangan.

2. Pengembangan Ekonomi Wisata Berbasis Lokal

Upaya pemberdayaan ekonomi lokal perlu diprioritaskan melalui pelatihan wirausaha, penyediaan lapak kuliner khas lokal, dan promosi produk UMKM.

3. Perencanaan Infrastruktur Berbasis Risiko dan Kenyamanan

Pengembangan talud, penerangan, serta penambahan toilet harus dijadikan prioritas untuk memastikan kenyamanan dan keamanan pengunjung.

4. Pendekatan Keberlanjutan dan Inklusif

Segala bentuk pengelolaan hendaknya tetap berpijak pada prinsip keberlanjutan baik lingkungan maupun sosial dengan memastikan bahwa masyarakat tetap menjadi pelaku utama dalam setiap pengambilan keputusan dan aktivitas pengelolaan wisata.

C. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini disusun dengan upaya maksimal untuk menghadirkan pemahaman yang utuh mengenai proses *agenda setting* dalam pembentukan dan pengelolaan destinasi wisata Green Kayen. Namun, penulis menyadari bahwa tidak ada penelitian yang sepenuhnya bebas dari keterbatasan. Keterbatasan muncul dari aspek

sumber daya informasi. Meskipun peneliti telah berusaha menjangkau berbagai pihak yang terlibat, tidak semua stakeholder dapat diwawancarai secara mendalam karena kesibukan atau keterbatasan akses. Hal ini menyebabkan adanya kemungkinan sudut pandang tertentu yang kurang tergali secara optimal, khususnya dari pihak-pihak yang memiliki peran strategis tetapi tidak sempat memberikan keterangannya secara langsung. Oleh karena itu, informasi yang diperoleh masih sangat dipengaruhi oleh narasi para informan yang dapat dijangkau selama proses penelitian.

Keterbatasan lain adalah terkait konteks lokal Green Kayen yang memiliki kekhasan sosial dan kelembagaan tersendiri. Dengan demikian, hasil penelitian ini belum dapat digeneralisasikan secara langsung ke wilayah lain tanpa mempertimbangkan faktor kontekstual masing-masing daerah. Kendati demikian, temuan penelitian ini tetap diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual dan inspiratif bagi pengembangan wisata berbasis masyarakat di tempat lain, dengan menekankan pentingnya partisipasi, sinergi antar-aktor, serta kepekaan terhadap dinamika lokal.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfina, F. K., Salsabila, C. D., Asyiffa, F., Alyssa, I., Dwiputri, M. W., Sari, N. A. L., Asianto Andwi Aswari, T., Darumurti, A., & Rifqi Febrian, K. (2018). Agenda setting Program One Village One Product (Ovop) Kabupaten Bantul. *Journal of Governance and Public Policy*, 4(3). <https://doi.org/10.18196/jgpp.4387>, diakses 5 Mei 2024
- Amalia, R., & Rendra, U. (2018). Faktor penghambat dan pendukung pengembangan usaha wisata di Pantai Marina Kabupaten Bantaeng. *Jurnal Sinar Manajemen*, 5(2), 87–91.
- Andwi Aswari, T., Darumurti, A., & Rifqi Febrian, K. (2017). Agenda setting Program One Village One Product (Ovop) Kabupaten Bantul. *Journal of Governance and Public Policy*, 4(3). <https://doi.org/10.18196/jgpp.4387>, diakses 5 Mei 2024
- Anjani, R., Amru, K., Herningtyas, W., Aryantie, M. H., Ikhwanuddin, M., Winanti, W. S., & Sudinda, T. W. (2024). Penilaian ekowisata Mangrove Sari di Kabupaten Brebes melalui studi kelayakan serta perumusan strategi pengembangannya. *Jurnal Teknologi Lingkungan*, 25(1), 059–070.
- Arlinasari, S., & Yuanjaya, P. (2023). Agenda setting dalam program pembangunan infrastruktur pariwisata di wilayah Prambanan, Sleman, D.I. Yogyakarta. *Journal of Public Policy and Administration Research*, 8(1), 1–17.
- Aspuan, A., & Nugraha, R. N. (2022). Persepsi masyarakat terhadap pengelolaan Taman Wisata Alam Telaga Warna Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 3(6), 6593–6598.
- Bobsuni, N., & Ma'ruf, M. F. (2021). Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan objek wisata alam (Studi kasus wisata Bukit Kapur Setigi,

- Desa Sekapuk, Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik). *Jurnal Publika*, 9(2), 215–226.
- Budiasa, I. M., Dwisusanti, I. A. M., & Abun, V. (2024). Strategi pengembangan ekowisata Mangrove Vatu Lumbang Desa Pamongan, Kecamatan Denpasar Bali Selatan, Kota Denpasar, Bali. *Jurnal Pertanian Berbasis Keseimbangan Ekosistem*, 14(2), 121–129.
- Dahiri, M. L. (2020). Pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan Kecamatan Ternate Utara dalam sistem pelayanan kepada masyarakat menurut Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah. *Justisia*, 7(14), 1059–1090.
- Fajri, H., Permana, I., Yuliarti, Y., & Wahyuni, N. (2022). Peningkatan keterlibatan stakeholder dalam upaya pembangunan wisata nagari. *Jurnal Inovasi Hasil Pengabdian Masyarakat (JIPEMAS)*, 5(2), 221–233. <https://doi.org/10.33474/jipemas.v5i2.14055>, diakses 7 Maret 2025
- Fatimah Az-Zahra, & Azwar, H. (2024). Explorasi faktor penghambat pengembangan daya tarik Pantai Arta Indah di Kabupaten Padang Pariaman. *Jurnal Ilmiah dan Karya Mahasiswa*, 2(4), 189–204. <https://doi.org/10.54066/jikma.v2i4.2294>, diakses 7 Maret 2025
- Hadji, K., Wahyudi, M., & Pratama, A. B. (2017). Potensi dan pengembangan wahana obyek wisata alam sebagai daya tarik wisata edukasi keluarga di Kabupaten Magelang. *The 6th University Research Colloquium 2017 Universitas Muhammadiyah Magelang Potensi*, 231–236.
- Hidayat, M. A., & Dzulkarnain, I. (2024). Pengembangan infrastruktur Community Based Tourism (CBT) wisata halal berbasis ekowisata bahari di Pulau Gili Labak, Madura. *Abdimas Pariwisata*, 5(1), 42–49. <https://doi.org/10.36276/jap.v5i1.484P>, diakses 10 Maret 2025

- Lestari, W., Yulyana, E., & Aryani, L. (2022). Collaborative governance dalam pengelolaan wisata alam Green Canyon di Desa Medalsari Kecamatan Pangkalan Kabupaten Karawang. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(7), 158–165. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6557133>, diakses 13 Mei 2024
- Leonard, D., Sinery, A. S., & Manusawai, J. (2020). Strategi pengelolaan Taman Wisata Alam Gunung Meja melalui penataan kawasan. *Cassowary*, 3(2), 153–191. <https://doi.org/10.30862/cassowary.cs.v3.i2.44>, diakses 5 Maret 2025
- Lumansik, J. R. C., Kawung, G. M. V., & Sumual, J. I. (2022). Analisis potensi sektor pariwisata air terjun di Desa Kali Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 22(1), 13–23.
- Makalew, M. N., Sambiran, S., & Waworundeng, W. (2021). Koordinasi antara pemerintah dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam menciptakan kerukunan umat beragama di Kota Manado. *Jurnal Governance*, 1(1), 1–9.
- Maman, & Kartini, Y. D. S. N. Y. (2016). Agenda setting dalam proses pembentukan Kabupaten Bandung Barat. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 2(12), 66–94.
- Nugroho, & Hermawan, S. (2022). Urgensi strategi kebijakan pemerintah melalui program refocusing dan alokasi anggaran untuk percepatan dampak pandemi Covid-19. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 5(3), 394–419. <https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i3.55727>, diakses 3 Februari 2025
- Rahman Mulyawan. (2015). Sistem Pemerintahan Indonesia (A. K. B. Hibar, Ed.; 1st ed.). UNPAD PRESS.
- Riani, N. K. (2021). Pariwisata adalah pisau bermata dua. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(5).

- Rosalina, P. D., Wang, Y., Dupre, K., Putra, I. N. D., & Jin, X. (2023). Rural tourism in Bali: Towards a conflict-based tourism resource typology and management. *Jurnal Tourism Recreation Research*, 0(0), 1–16. <https://doi.org/10.1080/02508281.2023.2223076>, diakses 9 Mei 2024
- Roza, A. D., Turyono, A., Lestari, E., Afani, E., Fitri, N. A., Solikhah, S., & Raharja, M. C. (2002). Optimalisasi dan pengembangan destinasi wisata Bendungan Slinga Park di Desa Slinga, Kabupaten Purbalingga. *Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Akuntansi*, 24(4), 53–60.
- Sa'ban, L. M. A., Ilwan, & Rosita. (2023). Promotion tourism Wawoangi Village. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 3(8), 7271–7280.
- Safitri, D. (2021). Agenda setting dalam proses kebijakan pengembangan Desa Kota Kapur sebagai destinasi wisata sejarah. *Jurnal Sosial Teknologi*, 1(2), 50–56. <https://doi.org/10.59188/jurnalsostech.v1i2.13>, diakses 5 Mei 2024
- Silfiana, L., & Samsuri, S. (2019). Keterlibatan warga negara muda dalam gerakan kewarganegaraan ekologis untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan. *Jurnal Studi Pemuda*, 8(2), 127. <https://doi.org/10.22146/studipemudaugm.48180>, diakses 10 Januari 2025
- Solihah, R. (2019). Perihal pemerintah dan yang diperintah. In Pengantar Ilmu Pemerintahan.
- Soselissa, F., & Seipalla, B. (2021). Peran stakeholders dalam pengelolaan objek wisata alam Siwang Paradise di Desa Siwang Kota Ambon. *Jurnal Hutan Pulau-Pulau Kecil*, 5(1), 28–39. <https://doi.org/10.30598/jhppk.2021.5.1.28>, diakses 13 Mei 2024
- Suhada, S. H. (2018). Studi pertumbuhan infrastruktur dalam pengembangan ekowisata Swaka Alam Laut Kepulauan Karimata. *Jurnal Teknik Sipil*

<https://doi.org/10.26418/jtst.v17i2.25773>, diakses 7 Maret 2025

- Sugiyono. (2013). Cara mudah menyusun: Skripsi, tesis, dan disertasi (1st ed.). Alfabeta, CV.
- Sugiyono. (2017). Metode penelitian kebijakan (S. Y. Ratri, Ed.; ke-1). Alfabeta, CV.
- Tahir, A. (2018). Kebijakan publik dan good governance. *Jurnal Academia Education*.
- Takome, S., Suwu, E. A. A., & Zakarias, J. D. (2021). Dampak pembangunan pariwisata terhadap perubahan sosial masyarakat lokal di Desa Bobanehena Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat. *Jurnal Ilmiah Society*, 1(1), 1–15.
- Toulwala, R. B., & Hayon, D. R. (2025). Agenda setting pengelolaan pariwisata berbasis kearifan lokal pasca pembangunan Waduk Mbay di Kabupaten Nagekeo. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 14(1), 54–67.
- Verawati Elfrida, S. (2015). Proses membangun agenda setting kebijakan pada portal berita pemerintah dan kesesuaiannya dengan agenda media online. *Jurnal Masyarakat Telematika dan Informasi*, 6(1), 13–26.
- Wahyuningtiyas, L., & Iskandar, D. A. (2023). Peran stakeholder dalam pengelolaan kawasan Taman Wisata Alam Kawah Ijen. *Journal of Regional and Rural Development Planning*, 7(2), 166–178. <https://doi.org/10.29244/jp2wd.2023.7.2.166-178>, diakses 9 Mei 2024
- Zulaika, A. S., Rifai, B., & Aripudin, A. (2023). Pengembangan potensi wisata alam Desa Ngliman. *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 8(1), 83–104.

Sumber lain

https://id.wikipedia.org/wiki/Kebijakan_publik, diakses 10 November 2024

Undang-Undang Dasar 1945 Indonesia

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 74 Tahun 2017
Tentang Pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah Istimewa
Yogyakarta

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2020
Tentang Kelompok Sadar Wisata Dan Desa/Kampung Wisata.

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Desa
Wisata

Profil Kalurahan Condongcatur Tahun 2024

LAMPIRAN

A. Surat Izin Penelitian



Nomor : 372/S-2/VII/2023
Lampiran : 1 bendel
Perihal : Permohonan Ijin Penelitian

Kepada Yth,
Lurah Condongcatur
Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman,
Daerah Istimewa Yogyakarta
di
Yogyakarta

Dalam rangka menyelesaikan studi di Program studi Magister Ilmu Pemerintahan mahasiswa di bawah ini mengharapkan bantuan Bapak/Ibu/Saudara untuk memberikan ijin dan kesempatan untuk melakukan penelitian guna menulis tesis yang berjudul **AGENDA SETTING DALAM PEMBENTUKAN GREEN KAYEN SEBAGAI OBYEK WISATA DI KALURAHAN CONDONGCATUR**

dengan Dosen Pembimbing : Dr. Adji Suradji Muhammad, S.Sos, M.Si. Adapun identitas mahasiswa tersebut adalah :

Nama : Dominggus Ndou Baru
Nomor Mahasiswa : 22610031
Jenjang : Magister
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Tahun Akademik : 2024/2025
Waktu Penelitian : 4 bulan

Demikian permohonan ini dan atas bantuan serta kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 4 Juli 2024
Direktur

Dr. Sugiyanto, S.Sos, MM.
NIY 170 230 210

B. Surat Balasan dari Kalurahan



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
KAPANEWON DEPOK
PEMERINTAH KALURAHAN CONDONGCATUR

Jalan Anggajaya II / 01 Gejayan, Condongcatur, Depok, Sleman, 55283
Telepon : (0274) 885689, Email : condongcatur1946@gmail.com

34.04.07.2003

SURAT KETERANGAN

Nomor : 070 / 052

Berdasarkan surat pengantar dari Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa APMD Yogyakarta dengan Nomor: 372/2-2/VII/2024 tanggal 04 Juli 2024 tentang permohonan Izin Penelitian. Bersama ini kami Lurah Condongcatur, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, memberikan Surat Keterangan Izin Kegiatan di wilayah Kalurahan Condongcatur dari:

Nama : Dominggus Ndou Baru
NIM : 22610031
Program Studi : Ilmu Pemerintahan – S2
Perguruan Tinggi : Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta
Keperluan : Permohonan Izin Penelitian untuk Tesis
Lokasi : Kalurahan Condongcatur, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman,
Daerah Istimewa Yogyakarta
Waktu : 8 Juli – 8 November 2024

Nama tersebut di atas akan melaksanakan penelitian dengan judul “ **AGENDA SETTING DALAM PEMBENTUKAN GREEN KAYEN SEBAGAI OBYEK WISATA DI KALURAHAN CONDONGCATUR** ” Penelitian dilaksanakan di Kalurahan Condongcatur, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, D.I.Yogyakarta.

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan :

1. Menghormati dan menaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah tempat kegiatan penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan kegiatan yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul penelitian yang dimaksud;
3. Melaporkan hasil kegiatan kepada Kalurahan Condongcatur.

Surat keterangan ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut.

Demikian agar menjadikan periksa dan atas bantuannya kami ucapkan terimakasih.

Condongcatur, 08 Juli 2024
Lurah Condongcatur



C. Panduan wawancara

1. Panduan Wawancara Pokdarwis

a. Analisis Situasi:

- Bagaimana sejarah awal terbentuknya wisata Green Kayen?
- Apa saja atraksi/daya tarik wisata yang ada di Green Kayen?
- Bagaimana kondisi pengelolaan lingkungan saat ini?
- Apa saja infrastruktur yang sudah tersedia dan yang masih dibutuhkan?
- Bagaimana perkembangan ekonomi wisata selama ini?

b. Prioritas Pengembangan:

- Menurut anda, apa masalah paling mendesak yang perlu diselesaikan?
- Bagaimana rencana pengembangan ke depan?
- Apa target utama yang ingin dicapai dalam 1-2 tahun ke depan?

c. Keterlibatan Stakeholder:

- Siapa saja pihak yang terlibat dalam pengelolaan?
- Bagaimana pembagian peran dan tanggung jawabnya?
- Bagaimana koordinasi antar stakeholder selama ini?

d. Faktor Pendukung & Penghambat:

- Apa saja yang menjadi kekuatan dalam pengelolaan wisata?
- Apa kendala utama yang dihadapi?
- Bagaimana cara mengatasi kendala tersebut?

2. Panduan Wawancara Masyarakat

a. Analisis Situasi:

- Bagaimana sejarah terbentuknya wisata Green Kayen?
- Bagaimana dampak adanya wisata Green Kayen bagi masyarakat?

- Apakah ada masalah lingkungan yang timbul?
 - Apa saja fasilitas yang masih kurang?
- b. Prioritas:
- Menurut anda, apa yang perlu diperbaiki terlebih dahulu?
 - Apa harapan anda untuk pengembangan wisata ke depan?
- c. Keterlibatan:
- Bagaimana keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan?
 - Apakah masyarakat dilibatkan dalam pengambilan keputusan?
- d. Faktor Pendukung & Penghambat:
- Apa manfaat yang sudah dirasakan dari adanya wisata?
 - Apa kendala yang dihadapi masyarakat?
3. Panduan Wawancara Pemerintah Kalurahan
- a. Analisis Situasi:
- Bagaimana kebijakan kalurahan terkait pengembangan wisata?
 - Apa saja program yang sudah dan akan dilakukan?
 - Bagaimana pengalokasian anggaran untuk wisata?
- b. Prioritas:
- Apa fokus utama pengembangan dalam waktu dekat?
 - Bagaimana rencana jangka panjang?
- c. Keterlibatan:
- Bagaimana koordinasi dengan stakeholder lain?
 - Apa peran kalurahan dalam pengelolaan?
- d. Faktor Pendukung & Penghambat:
- Apa dukungan yang sudah diberikan kalurahan?
 - Apa kendala dalam implementasi program?
4. Panduan Wawancara Karang Taruna
- a. Analisis Situasi:

- Bagaimana keterlibatan karang taruna dalam pengelolaan?
 - Program apa saja yang sudah dilakukan?
 - Apa inovasi yang sudah dikembangkan?
- b. Prioritas:
- Menurut karang taruna, apa yang perlu dikembangkan?
 - Bagaimana rencana program ke depan?
- c. Keterlibatan:
- Bagaimana koordinasi dengan pokdarwis?
 - Berapa anggota yang aktif terlibat?
- d. Faktor Pendukung & Penghambat:
- Apa yang mendukung program karang taruna?
 - Apa kendala yang dihadapi?
 - Bagaimana solusi yang diusulkan?

D. Dokumentasi Informan



Wawancara bersama Dadang
selaku ketua Pokdarwis Green
Kayen



Wawancara bersama Pak Purwanto
selaku Dukuh Kayen



Wawancara bersama Pak
Murgiyanto selaku Ulu-ulu



Wawancara bersama Pak Reno
Candra Sangaji selaku Lurah
Condongcatur



Wawancara bersama Ibu Riska Dian Nur Lestari, selaku Carik Kalurahan Condongcatur



Wawancara bersama Oktavian Riski Ramadan, selaku anggota Karang Taruna Kayen



Wawancara bersama Muhammad Irfan selaku mantan ketua Karang Taruna, dan sekarang menjabat sebagai sekretaris Bumkal Nyawiji



Wawancara bersama Taufik Yosi, selaku anggota Pokdarwis Green Kayen



Wawancara bersama Arif Budi Sasongko, selaku Ketua Karang Taruna Kayen



Wawancara bersama Mas Rahmat, selaku anggota Pokdarwis Green Kayen



Wawancara bersama Jindarto selaku anggota Pokdarwis Green Kayen



Wawancara bersama Pak Karjono selaku masyarakat sekitar Green Kayen



Wawancara bersama Pak Kiai Dadi
selaku tokoh masyarakat
Padukuhan Kayen



Wawancara bersama Pak Rahawa
Hamim selaku masyarakat
Padukuhan Kayen



Wawancara bersama Febri Aji
Saputro selaku anggota Bumkal
Nyawiji, dan Muhammad Irfan
selaku sekretaris



Mushola Green Kayen



Kondisi wisata Green Kayen



Fasilitas Green Kayen, Pendopo dan Gazebo